

Radius Setiyawan

Dalam Bayang bayang Budaya Populer dan Kuasa Negara

“Buku ini sungguh istimewa untuk menggugah pembacanya menyimak sekaligus menguji budaya populer dengan relasi kuasanya yang dilihat dari sisi tak biasanya (*the otherness*)”

- **Dr.Herlambang P. Wiratraman**

Dosen Universitas Gadjah Mada dan Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES



DALAM BAYANG-BAYANG BUDAYA POPULER DAN KUASA NEGARA

Penulis

Radius Setiyawan

Editor

Uswah Sahal

Desain Cover

Masruril Akmal Yazid

Layout

Nurhidayatullah.R

Cetakan 1 Oktober 2022

vii+135, 14x21 Cm

ISBN : 97862-3990-8843

Penerbit :



Unity, Humanity, and Entrepreneurship

surabaya

Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya

Telp. (+62 87701798766)

Email: p3i@um-surabaya.ac.id

www.p3i.um-surabaya.ac.id

Daftar Isi



Cover	i
Daftar Isi	iii
Pengantar Penulis	vii

BAB 1.DILEMA NEGARA

1. Angka Kematian dalam Tragedi 1965, 1998 dan Covid-19	3
2. Crazy Rich dan Gelembung Citra ...	7
3. Dinar Candy, Rasa Malu dan Kenekatan Kolektif	11
4. Imajinasi Menjadi Aparat Negara ...	15
5. Jerinx, Pembelaan dan Teori Konspirasi 20	
6. Kolonialisme Dan Ruang Publik yang Rasis	24
7. Lelucon yang Tak Lucu tentang Perempuan Saat Pandemi.....	28
8. Memahami Kata Terserah dalam ... 'Indonesia Terserah'	33
9. Pemaafan, Beban Sejarah, dan Lupakan Saja Mandela!	37
10 Prank, Dark Jokes, dan Pejabat Kita	42
11.Subaltern dan peran negara	47
12. Kutukan Sisyphus dan New Normal	52

BAB 2. ANAK DAN GENDER DALAM PUSARAN KUASA

13. Berharap pada Sastra Anak	58
14. Jika Bawang Merah-Bawang Putih . Akur Dan Malin Kundang Tidak Dikutuk	63
15. Jilbab di Sekolah	67
16. Krim Anti-Aging Dan Imaji Awet Muda	71
17. Lathi Challenge dan Mitos Hantu Perempuan	75
18. Membaca Papua Melalui Buku Sekolah Dasar	80
19. Perayaan	84
20. Rasis Sejak Dini: Temuan Diskriminasi dalam Tontonan Dan Bacaan Anak tentang Papua	87
21. Oki Setiana Dewi dan Kualitas Bacaan Anak	91
22. Ketika Media Baru Mengancam Otoritas Pemeluk Agama	94

BAB 3. BUDAYA POPULER DAN MEDIA BARU

23. Bencana, Demokratisasi Dan Kecemasan Kita	100
24. Ferdian Paleka Dan Ambiguitas Sikap Kita	104
25. Horornya Perawat dalam Film Indonesia	109
26. Ketika <i>Cyber Sex</i> Jadi Solusi untuk Lajang Menjelang New Normal	115
27. Millennial, <i>Cybersex</i> Dan Pandemi Covid-19	120
28. <i>Panic-gogy</i> , Belajarlah dari Fabel Kancil Vs Siput!.....	124
29. Pinjaman Online dan Masyarakat yang Rapuh	128

30. Populisme Dan Demokrasi Digital..	132
31. Tontonan Kita Menggambarkan Cara Pandang Dominan Terhadap Orang Papua	135
32. Virus 'Lookism' Tidak Kalah Berbahaya dari Rasisme dan Seksisme	139
33. Teaterikal Politik di Era Sosial Media	143
34. Fetism, Aktivitas Virtual dan Ancaman Pelecehan Sexual	147
DAFTAR PUSTAKA	150



Pengantar Penulis Budaya Populer dan Kuasa Negara di Era Digital

Membuka pengantar buku ini, saya teringat dua kejadian yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Dua kejadian yang menurut saya menarik untuk dijadikan penanda penting bagaimana perkembangan budaya populer dan kuasa negara di tengah pusaran arus digital. Peristiwa pertama terjadi pada Mei 2021 tahun lalu. Disaat situasi pandemi belum menentu, ada peristiwa yang cukup menarik perhatian. Hal tersebut yang membuat saya akhirnya mengenal sebuah grup musik asal Korea Selatan besutan *Big Hit Entertainment*, yakni BTS (Bangtan Boys). Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah fans mereka. Mereka menyebut diri mereka adalah Army. Yang kepanjangan dari *Adorable Representative MC for Youth*.

Pada bulan Mei 2021 tahun lalu, BTS melakukan kolaborasi dengan Mc Donald. Kolaborasinya adalah mengeluarkan produk *BTS Meal*. Hal tersebut mendapatkan respon luar biasa dari seluruh Army Indonesia (sebutan untuk penggemar BTS). Paket *BTS Meal* ramai diserbu oleh para-Army di Indonesia. Banyak *driver ojek online* yang mengantre berjam-jam hingga menyebabkan kerumunan di banyak gerai Mc Donald. Tidak hanya itu, para-Army bahkan rela mengeluarkan jumlah uang yang relatif besar, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan dan mengoleksi benda-benda yang terkait dengan idola mereka yang dijual secara *online* oleh reseller. Sesuatu yang bagi sebagian orang terkesan aneh dan tidak berfaedah. Tetapi di balik itu semua, ada sesuatu hal di luar dugaan. Mereka bukan hanya kelompok penggemar yang identik dengan aksi berfoya-foya. Dalam banyak

kesempatan para-Army ternyata banyak melakukan hal-hal yang menarik, seperti: donasi dan mendukung Gerakan Black Live Matter (Gerakan Melawan Rasisme), aktif berkampanye bersama UNICEF tentang isu kesehatan melalui lagu-lagunya dengan tagar #loveyourself di media sosial, mereka juga terlibat dalam aksi penolakan RUU Cipta Kerja pada 2020 lalu dan berhasil mendapat perhatian publik secara global. Yang paling terbaru mereka mampu menghimpun dana ratusan juta untuk korban tragedi Kanjuruhan di Malang. Sebuah komunitas yang dibangun atas dasar kesukaan pada grup musik ternyata aktivitasnya banyak terkait dengan aksi sosial dan politik.

Army adalah generasi yang cara berpikir dan bertidaknya lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi digital. Ada yang menyebut mereka adalah *self-learners* (pembelajar mandiri) yang lebih nyaman menyerap pengetahuan secara daring daripada belajar melalui institusi tradisional. Mereka adalah seorang *digital natives*. Generasi yang aktivitasnya lebih suka dengan segala sesuatu yang dapat diakses melalui digital. Hal tersebut dibuktikan dengan apapun yang diproduksi BTS melalui kanal digital selalu mendapatkan view yang sangat tinggi. Contohnya adalah views youtube yang ditonton hingga miliaran. Sejak periode *Korean Wave* (Gelombang Korea) atau biasa disebut Hallyu pada 1990-an, apapun produk yang diproduksi Korea Selatan seperti (film, drama serial, dan K-Pop Music) merasuk dan menyebar begitu cepat ke berbagai negara Asia seperti China, Hongkong, Malaysia hingga Indonesia.

Peristiwa yang kedua yang menarik perhatian saya adalah kekerasan yang dialami oleh Ade Armando pada April 2022 lalu. Dosen sekaligus pegiat media sosial tersebut dikeroyok secara membabi buta di sebuah lokasi demonstrasi. Berbagai reaksi bermunculan, dari mengutuk aksi tersebut hingga aksi olok-olok atas kejadian tersebut. Dalam aksi demonstrasi di Indonesia, tindak kekerasan memang kerap kali terjadi. Bagi kita yang pernah dan sering terlibat demonstrasi, kekerasan hingga mengeluarkan darah bercucuran adalah sesuatu hal yang sering kita

jumpai. Tindakan membabi buta aparat kepada massa aksi tidak jarang dipertontonkan secara terbuka karena terekam oleh kamera. Bedanya kekerasan kali ini bukan dilakukan aparat kepada peserta aksi. Tetapi dialami oleh peserta aksi dan pelakunya konon juga peserta aksi pula. Ade Armando adalah sosok yang dianggap pendapatnya banyak menuai kontroversi. Dari soal agama, pencemaran nama baik, penghinaan hingga soal lain yang kerap membuat orang marah.

Apa yang menimpa Ade Armando menegaskan bahwa perbedaan di ruang digital sangat mungkin menjalar pada ruang nyata. Kita semua tahu, Ade Armando adalah salah satu pegiat sosial media yang getol membela presiden Jokowi. Apa yang disampaikan olehnya dianggap banyak orang mewakili kepentingan negara. Sehingga Ade dianggap kebal hukum di tengah pendapat-pendapatnya yang kontroversial. Kejadian yang menimpa Ade tidak bisa dilepaskan dari polarisasi politik yang telah lama terjadi di negeri ini. Pertarungan yang mengeras di ruang digital menjadi sesuatu yang wajar di era informasi. Akan menjadi tidak wajar ketika menjalar pada ruang nyata dan berakhir dengan aksi kekerasan yang brutal. Hal tersebut tentunya berbahaya bagi masa depan demokrasi. Apa yang terjadi pada Ade bisa jadi manifestasi nyata dari kebencian, permusuhan dan agresivitas yang dihasilkan dalam ruang digital. Polarisasi politik yang menghasilkan perbedaan cara pandang yang tajam di sosial media harus memakan korban ketika bertemu di dunia nyata.

Kedua kejadian tersebut (Militerisasi Army dan pemukulan Ade Armando) memiliki kesamaan dimana dunia digital sebagai ruang diskursif yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi cara pandang komunal. Selain itu juga, manifestasi dari apa yang terjadi di dunia digital tidak berhenti disitu, apa yang dibicarakan dalam banyak platform digital dipraktikkan dan dilakukan di dunia nyata dan tidak jarang praktiknya kerap dianggap berlebihan dan cenderung destruktif.

Melalui gambaran di atas saya ingin menyampaikan bahwa budaya populer dan polarisasi politik di tengah kemajuan teknologi digital mampu menghasilkan kejutan-kejutan dahsyat. Budaya populer yang dimanifestasikan melalui Army oleh banyak orang dianggap sesuatu hal yang remeh temeh, recehan, irasional, obsesif, tidak bernilai seni tinggi, dan kerap dianggap sebagai budaya yang tidak perlu mendapatkan perhatian serius buktinya mampu melakukan banyak hal, dari sesuatu hal yang oleh kebanyakan orang dianggap kurang berfaedah hingga sesuatu hal yang berarti dan *powerfull*. Sebuah kondisi yang mungkin tidak kita jumpai dalam periode waktu sebelumnya. Sedangkan dalam konteks politik kenegaraan, kehadiran sosial media dan platform digital lain mampu menciptakan polarisasi yang kuat dan mengeras hingga berujung pada tindak kekerasan di dunia nyata.

Membicarakan budaya populer dan kuasa negara di era teknologi digital tentunya mempunyai perbedaan signifikan jika dibanding dengan periode sebelumnya. Budaya populer dalam banyak fakta mampu menjadi kekuatan yang berarti. Baik dalam hal politik, budaya, ekonomi maupun di sektor yang lain. Begitu juga kuasa negara, ketika Indonesia keluar dari era otoritarian dan ditambah dengan adanya proses demokratisasi internet. Tidak secara otomatis pula demokrasi berjalan secara substansial, mampu mensejahterakan dan memakmurkan. Justru banyak fakta yang menyebabkan demokrasi terjerembab pada kondisi yang tidak membahagiakan, seperti: pembelahan, kegaduhan, kebisingan hingga kekerasan komunal. Kesemuanya tentunya menjadi penghalang kesejahteraan. Tema-tema di atas yang akan berusaha saya ulas dalam tulisan di buku ini, dan ulasan tersebut akan menjadi diskursus pembuka dalam memahami berbagai tulisan dalam buku ini.

Ikon Budaya Populer

Budaya populer tentunya memiliki beragam definisi. Definisi tersebut tentunya terikat dengan teritorial, waktu dan kondisi kebudayaan dari sang pembuat definisi.

Ketika kita semua memasuki era digital, maka bisa dipastikan keberadaan instrumen-instrumen media digital mempunyai peran penting dalam mengkonstruksi sebuah kebudayaan. Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam bukunya *Dialectic of Enlightenment* (1982) menjelaskan bahwa budaya populer dalam masyarakat kapitalis berfungsi seperti industri dalam memproduksi produk (konten) yang terstandarisasi dan mampu menghasilkan orang-orang yang “terstandarisasi” pula. Fenomena Army dalam cerita di atas adalah contoh bagaimana sebuah kelompok fans sebuah group musik mempunyai sikap loyal dan mampu bergerak secara seragam meski mereka belum tentu saling kenal dan pernah bertemu. Salah satu hal yang mampu menggerakkan mereka adalah sebuah imajinasi yang sama yang bersumber dari apa yang mereka kagumi dan cintai, yakni BTS. Kehadiran media digital adalah salah satu faktor dominan yang membuat imajinasi kolektif para fans BTS terstandarisasi dan terkonsolidasi.

Danesi (2007) mengungkapkan dua gejala yang disebabkan oleh budaya populer. Pertama, budaya populer mendorong banyak orang mengalami rasa haus terus-menerus terhadap segala hal yang terkait dengan objek konsumsi yang baru dan bentuk-bentuk hiburan baru yang lain. Hal tersebut ditanamkan di dalam jiwa (*psyche*) modern, melalui citraan, pesan, dan segala jenis tontonan media. Hal tersebut bisa disebut sebagai neomania. Fenomena neomania bisa kita lihat dari kolaborasi komersil McDonald dan BTS yang cukup menghebohkan di tahun 2021 lalu. Sebuah kondisi yang membuat banyak orang rela mengeluarkan uang relatif mahal dan membuat kerumunan di tengah pandemi hanya untuk sebuah produk makanan yang kemasannya ditempelkan identitas idola mereka. Praktik konsumsi tersebut banyak terjadi di era masyarakat modern yang haus atas objek-objek konsumsi. Dalam konteks tersebut, konsumsi bukan hanya dimaknai sebagai praktik untuk membuat mereka kenyang dalam arti harfiah (makan-minum). Konsumsi di era modern tentunya akan lebih kompleks. Karena hal tersebut terkait simbol, identitas dan kode kebudayaan yang didalamnya terdapat *prestise*, kelas bahkan harga diri.

Gejala budaya populer yang kedua yakni kecenderungan yang meluas, yang dialami manusia untuk selalu merasa muda dan menarik, baik secara fisik maupun sosial, seperti para aktor dan tokoh yang mereka lihat di televisi, iklan, dan bioskop. Hal tersebut bisa kita sebuah sebagai juvenilisasi. Masyarakat modern yang praktik konsumsi lebih banyak bersumber dari media dalam banyak contoh kerap mengalami fenomena tersebut. Imajinasi untuk mengikuti gaya hidup tokoh idolanya dan berusaha mati-matian untuk mendekati dan meniru adalah kondisi yang banyak terjadi hari ini. Adorno dan Horkheimer yang menyebut budaya populer sebagai sesuatu yang standar, dangkal, buatan pabrik, tidak autentik, dan tidak memicu pemikiran yang lebih jauh. Perspektif tersebut tidak hanya berlaku terhadap produknya namun juga para penggemarnya. Fandom K-pop dan fandom-fandom lainnya hanya dilihat sebagai kumpulan massa yang terbutakan oleh produk pabrik sehingga tidak kritis. Stereotipe negatif tersebut tentunya tidak semua benar. Banyak fakta yang menjelaskan bahwa banyak fandom yang mampu bersikap kritis atas fenomena sosial dan mampu bergerak melakukan sesuatu yang berarti. Fandom adalah aktor yang aktif dan tidak melulu mengikuti keinginan pasar. Setidaknya hal tersebut bisa kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Army di atas.

Dalam konteks yang lain, budaya populer juga bisa dimaknai sangat politis. Fenomena yang terjadi pada McDonald yang berkolaborasi dengan BTS oleh Setyowati (2021) bisa dimaknai usaha mempertahankan dominasi. Bagaimana dua kekuatan industri besar yakni McDonald (Amerika Serikat) dan BTS (Korea Selatan) berkolaborasi secara komersial untuk mempertahankan dominasi mereka di dunia. Jika dulu, Amerika merupakan negara yang budayanya mendominasi dunia dan menjadi barometer dalam banyak aspek kehidupan, kini tidak lagi demikian. Artinya, di level peripheral Korea Selatan telah membangun kekuatan kompetitif atas Barat. Hal tersebut tentunya sesuatu yang menarik untuk diamati. Banyak

negara berusaha menggunakan budaya populer sebagai alat diplomasi. Melalui budaya populer mereka berusaha mengenalkan nilai-nilai ideologi sebuah negara. Hal tersebut bisa kita lihat bagaimana Korea Selatan, Jepang, Amerika, China dan beberapa negara melakukan hal tersebut.

Dalam konteks Indonesia, fenomena budaya populer yang terkait dengan kritik sosial ternyata bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum itu Frederick 1982; Lockhard 1998 dalam Ariel Heryanto; 2012 menjelaskan kemunculan budaya populer yang terkait dengan politik atau dominasi negara. Di masa itulah muncul bintang pop istimewa bernama Rhoma Irama. Dialah orang pertama yang secara tegas muncul di hadapan publik dengan identitas Islam. Lirik-lirik dalam musiknya mengacu pada Islam dan sarat kritik sosial yang menyengat status quo. Rhoma Irama mengabdikan bakatnya pada ragam musik dangdut (campuran unsur-unsur musik melayu, India, dan Arab), sesuatu yang pada masa itu masih dianggap bermutu rendah, kasar, dan berselera artistik buruk. Namun, dengan berbekal instrumen musik Barat, dan terilhami musik pop Barat mutakhir, Rhoma Irama mencetak sejarah dalam ranah budaya pop Indonesia secara umum. Dalam konteks ekonomi, apa yang terjadi pada Rhoma Irama tidak jauh berbeda dengan BTS. Rhoma mempunyai banyak sekali penggemar dan mampu menjadikan dangdut sebagai mesin penghasil uang yang berlipat-lipat, tentunya dalam konteks itu memanfaatkan media televisi sebagai alat yang strategis. Sementara dalam konteks politik, dangdut juga kerap menghadapi pencekalan dari pemerintah kala itu. Dangdut menghadapi tanggapan keras pemerintah. Dangdut dicekal di satu-satunya jaringan televisi milik negara yang ada saat itu (TVRI) dan di tiap stasiun radio. Ironisnya, tekanan dan penistaan terhadap dangdut justru membuat musik ini jadi lambang pembangkangan politik orang-orang kelas menengah Indonesia di perkotaan. Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Satu dekade setelah itu, semuanya mendadak berubah, tidak ada partai politik (termasuk partai politik pemerintah, Golkar) yang dapat mengabaikan jasa dangdut dalam kampanye pemilihan

umum. Sejarah politik dangdut dan posisi Rhoma Irama di dalamnya, kembali berubah secara dramatis sejak tumbanganya Orde Baru di tahun 1998. Gambaran di atas menegaskan bahwa budaya populer dalam banyak ruang selalu bersentuhan dengan kuasa negara. Meskipun tidak secara langsung tetapi relasi keduanya menarik untuk diulas. Dalam banyak momentum aktor-aktor politik, termasuk partai politik, banyak menggunakan budaya populer sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tentunya hal tersebut menjadi penting, apalagi memasuki era digital. Menjadi viral adalah sesuatu hal yang banyak dikejar. Kemunculan budaya populer di era ini tidak mungkin lepas dari hal tersebut.

Selain budaya populer yang kehadirannya banyak ditopang oleh media digital, kuasa negara di era digital juga menjadi perhatian yang menarik. Penggunaan media digital oleh negara untuk pelayanan birokrasi, media informasi, pola komunikasi hingga alat agitasi tentunya sudah menjadi keniscayaan. Dalam banyak hal tentunya cukup membantu tetapi dalam hal lain tidak jarang mampu menciptakan kebisingan. Di era teknologi informasi ini, apa yang dikatakan negara tidak menjadi sesuatu yang otoritatif. Demokratisasi informasi membuat semua orang berhak mempunyai cara pandang yang berbeda dengan negara dan hal tersebut bisa disampaikan secara langsung dan didengar oleh khalayak. Polarisasi di era digital adalah sesuatu hal yang tidak bisa hindari. Hal tersebut banyak terjadi di banyak negara. Bagaimana Indonesia?

Demokrasi, Sosial Media dan Polarisasi

Hari ini kita sedang memasuki kondisi yang relatif baru dalam berdemokrasi. Teknologi telah menjadi salah satu bagian penting yang merubah pola tersebut. Demokrasi baru melahirkan para pemimpin yang kehadirannya dimediasi oleh citra. Kita kerap kali terkondisikan untuk bersimpati, terkagum hingga benci oleh sesuatu hal yang kita kenali tidak secara utuh. Tanpa harus bertemu langsung seorang figur kita bisa menjadi seorang pengagum yang loyal. Dan kebalikannya pula, kita bisa

menjadi pembenci yang militan. Suatu kondisi yang hari ini kita jumpai. Media menciptakan gelembung-gelembung citra yang mampu mengatur opini dan mengarahkan sikap kita atas sesuatu hal. Sosial media dan platform digital lain telah mendemokratisasi informasi. Sehingga semua orang punya hak yang sama dalam berpendapat. Hal tersebut bukan membuat kondisi semakin cair. Yang terjadi malah teknologi cenderung mempertemukan pertautan-pertautan baru yang dibangun atas dasar kesamaan identitas. Dalam konteks tersebut keterbelahan di masyarakat menjadi semakin kuat dan tidak jarang dibumbui dengan pragmatisme pemimpin politik.

Sindhunata (2019) menyebut kondisi aktual yang dimediasi oleh jaringan Internet dan jejaring media sosial menjadikan dunia yang nyaris anarkis. Manusia bisa menumpahkan apa saja di internet, termasuk kebencian, permusuhan, agresivitas, egoisme, dan naluri destruktifnya. Seolah-olah tidak ada hukum dan otoritas yang bisa mengontrolnya. Kabar bohong merajalela tanpa halangan di jejaring media sosial. Kejadian yang menimpa Ade Armando seperti contoh di atas menjadi alarm bagi kita semua. Tindakan kekerasan terhadap Ade Armando jelas dilakukan oleh pihak yang selama ini berseteru dengannya di sosial media. Yang oleh sebagian kita dilabeli kadrun vs cebong. Polarisasi dalam politik membuat sebagian kita terbelah dan terkotak dengan prinsip *'you're either with us or against us'*. Dengan model berpikir ini mereka menciptakan polarisasi antara "kita" dengan "yang lain". Implikasi dari cara berpikir di atas akan mengakibatkan normalisasi kekerasan apabila hal tersebut terjadi pada kelompok di luar dirinya. Kondisi tersebut bisa dipastikan akan merusak demokrasi di Indonesia. Di tengah derasnya informasi yang mendera, kita harus tetap berpikir reflektif. Tidak mudah menuduh, berprasangka dan memberi penilaian atas sesuatu hal yang kita belum paham secara utuh. Kita butuh mendapatkan informasi yang mumpuni sebelum berargumen ke ruang publik. Hal tersebut penting agar ruang digital kita tetap terjaga dari agitasi politik murahan yang merugikan dan cenderung mengarah pada perpecahan. Selain itu juga,

di tengah polarisasi yang semakin kuat. Ada baiknya kita berusaha bersuara jujur dan adil atas realitas. Menahan diri dari sikap dangkal, fitnah, mudah menuduh dan mengumbar amarah di ruang digital. Semuanya demi demokrasi Indonesia yang berkeadaban dan maju.

Polarisasi yang sedang terjadi hari ini tidak lepas dari rentetan peristiwa jelang 2019. Di tahun tersebut menunjukkan makin meningkatnya peran kebencian yang didorong maraknya klaim politik identitas (Tapsell, 2021), dan misinformasi (Mujani dan Kuipers, 2020). Kita semua tidak tahu kapan polarisasi yang destruktif itu berakhir. Hampir setiap hari kita menyaksikan pertarungan, bergerak dari pertarungan satu ke pertarungan yang lain. Sosial media yang kita bayangkan mampu menjadi ruang publik yang partisipatif karena bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat ternyata dalam beberapa hal tidak terbukti. Media sosial dalam banyak hal mampu menjadi pendorong polarisasi politik. Hasil survei CIGI dan Ipsos tahun 2019 menunjukkan sebanyak 58% responden di Indonesia setuju media sosial dapat meningkatkan polarisasi politik. Hanya 6% responden yang merasa polarisasi politik berkurang sedangkan 37% responden lainnya tidak merasakan dampak apapun. Meskipun menjadi pendorong polarisasi politik, tetapi bukan berarti teknologi sepenuhnya menjadi alat yang destruktif. Teknologi dalam perjalanannya harus kita akui memiliki potensi sebagai 'teknologi kebebasan'. Dalam konteks yang lebih sederhana, teknologi dapat menjadi cara untuk memiliki kebebasan dari belenggu pemerintahan yang berkuasa. Bagi pejuang reformasi, mereka tentu tidak akan lupa dengan gerakan 'bawah tanah' yang dimulai dalam mailing list Indonesia-L (Hill & Sen, 2005). Jadi bisa dipastikan bahwa kehadiran media digital seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi mampu menggerakkan ke arah demokratisasi yang substansial, di sisi lain juga mendorong ke arah yang destruktif. Sebuah kondisi yang menarik untuk diulas dan akan banyak ditemui dalam buku ini. Pengantar dalam buku ini akan menjadi pintu masuk memahami berbagai isu terkait budaya populer dan kuasa negara yang lebih beragam. Berbagai isu tersebut akan ditemui dalam buku yang sedang anda pegang.

Gagasan dalam Buku

Uraian terkait budaya populer dan kuasa negara akan lebih banyak ditemukan dalam buku yang sedang anda pegang ini. Banyak fenomena menarik yang akan diulas dalam buku terkait isu tersebut. Budaya populer dan kuasa negara di era digital merupakan pembahasan yang luas dan menarik. Kehadiran buku ini akan berusaha melengkapi diskursus budaya populer dan kuasa negara yang ada. Berbagai peristiwa yang terjadi mutakhir banyak dibahas dalam buku ini. Sengaja buku ini memilih judul “Dalam Bayang-Bayang Budaya Populer dan Kuasa Negara” karena hampir semua tulisan terkait dengan isu di atas. Konsentrasi saya pada *Cultural Studies* yang membuat saya mempunyai ketertarikan kepada isu-isu gender, media baru, kolonialisme, rasisme dan hal lain terkait. Secara general buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang dilema negara. Dari hal-hal yang sifatnya historis, kebijakan hingga lelucon-lelucon yang diungkapkan oleh pejabat publik atau artis. Dengan menggunakan perspektif kritis buku ini melihat banyak fenomena yang muncul yang disebabkan oleh peran negara yang dianggap kurang optimal.

Bagian kedua, buku ini berfokus pada isu gender dan anak. Dua hal yang kerap kali problematis di Indonesia. Beberapa isu terkait ketimpangan gender kerap mengemuka di ruang publik kita. Tidak jarang hal tersebut diungkapkan oleh pejabat atau publik figur. Gender dan isu anak penting untuk terus disuarakan mengingat kedua hal tersebut modal besar membangun peradaban Indonesia yang maju dan beradab. Bagian ketiga membicarakan soal media baru dan demokratisasi. Dalam bagian ini akan lebih banyak membahas sebuah fenomena baru yang disebabkan oleh kehadiran media baru, terutama sosial media. Praktik-praktik yang dulu belum pernah ada kini hadir dan dalam banyak hal menyebabkan kontroversial. Seperti: cybersex, tingkah laku youtuber, fenomena lookisme dan tema-tema menarik lainnya.

Buku yang sedang anda pegang ini adalah kumpulan tulisan yang sudah pernah terpublikasi di beberapa media, baik cetak maupun online. Diantaranya : Jawa Pos, The Conversation, Remotivi, Alif.id, Kumparan, Qureta dan beberapa media lain sejenis. Kumpulan tulisan ini terhimpun sejak akhir 2019. Banyak tulisan-tulisan dalam buku ini yang hadir di tengah pandemi. Disaat saya merasakan bagaimana hidup dalam pusaran rasa takut dan stress yang tinggi. Info kematian hampir terdengar setiap hari, kerabat terdekat banyak yang terpapar covid-19 dan terpaksa harus hidup dengan membatasi diri dan keluarga dari pergaulan. Dalam kondisi tersebut, menulis adalah obat penurunan rasa stres dan hal tersebut terbukti ampuh.

Terbitnya buku ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Dari teman dekat yang terhimpun dalam Surabaya Academia Forum (SAF): *Center for Reseach and Humanity*, Adik-adik IMM dan beberapa rekan dosen di UM Surabaya.

Terakhir tentunya buku ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta. Evilia Rosanti Yanuariska (Istri terkasih), Aufkla Rain Ananta Diev (Mas Kla) dan Aksara Ramadian Allendra Diev (Dik Alle). Semoga buku ini mampu memberi arti dalam diskursus tentang budaya populer dan kuasa negara. Selamat membaca!

**- Buku ini saya persembahkan kepada Evilia, Aufkla
dan Alle -**

BAB 1. DILEMA NEGARA



Angka Kematian dalam Tragedi 1965, 1998 dan Covid-19



Salah satu hambatan terberat bangsa ini adalah beban Sejarah yang tidak selesai. Kita kerap kali tidak sadar bahwa masa lalu yang membentuk bangsa ini. Masa lalulah yang paling berperan bahkan saling bersinggungan dengan kondisi hari ini. Apa yang kita alami hari ini bisa jadi semacam *dejavu*.

Dalam konteks Indonesia, peristiwa 1965, reformasi 1998 dan wabah Covid-19 memiliki kesamaan pola. Ketiganya memakan korban yang tidak sedikit. Selain itu juga, peristiwanya hingga hari ini belum selesai dan menjadi beban sejarah bangsa. Ketiga peristiwa di atas layak kita sebut tragedi serius bangsa ini.

Setiap tragedi menyisakan luka mendalam. Besarnya jumlah korban adalah salah satu indikator bahwa suatu peristiwa layak disebut tragedi. Tragedi memiliki karakter serius dan berakhir dengan ketidakbahagiaan.

Meskipun mempunyai latar yang berbeda, ketiga tragedi di atas mempunyai persoalan yang sama, yakni perdebatan tentang berapa angka korban dan gagalannya negara meminimalisir angka kematian. Kegagalan penyelesaian tragedi masa lalu tentunya akan menjadi beban dan menyisakan persoalan.

Perdebatan soal angka korban

Tragedi 1965 adalah peristiwa yang memiliki banyak versi terkait total korban. Versi Komisi Pencari Fakta bentukan Soekarno pada Desember 1965 menyebutkan bahwa jumlah korban 80 ribu jiwa.

Versi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) pada 23 Juli 2012 menyatakan peristiwa tersebut diduga menewaskan lebih dari 500 ribu jiwa. Belum lagi versi *Washington Post* yang dikutip John Roosa dalam bukunya memperkirakan ada setengah juta orang telah mati dibunuh. Selain versi di atas tentunya banyak versi yang lainnya.

Selain terkait tragedi 1965, peristiwa reformasi 1998 juga memiliki perbedaan jumlah korban. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka.

Pertama, data dari tim relawan yang menyatakan terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 orang dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang, dibakar sebanyak 564 orang dan korban yang luka-luka sebanyak 91 orang.

Sementara versi Polda Metro Jaya sebanyak 451 korban meninggal sedangkan korban luka tidak tercatat. Versi dari Kodam yang menyatakan terdapat 532 korban, rinciannya: 463 korban meninggal dan 69 orang luka-luka. Terakhir, data dari Pemda DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 288 orang meninggal dunia dan 101 orang luka-luka.

Dalam konteks Covid-19 yang hingga hari ini belum berakhir. Total kematian di Indonesia pun jadi perdebatan. Kawal Covid-19 mengungkap laporan kematian pemerintah pusat lebih sedikit dibandingkan pemerintah daerah, terdapat selisih hingga 19.000 kasus. Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota terdapat 124.790 warga meninggal akibat positif Covid-19 per 7 Agustus 2021.

Di tengah perdebatan tentang jumlah kematian akibat Covid-19, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan indikator angka kematian dari komponen pengamatan terhadap penanganan Covid-19. Sesuatu hal yang cukup memicu kontroversi. Pemerintah dianggap menyembunyikan data dan membahayakan rakyat.

Perdebatan jumlah korban terjadi dalam tiga tragedi tersebut. Versi pemerintah dan versi non pemerintah

tidak pernah menemukan titik temu. Hal tersebut akan menambah deretan panjang beban sejarah. Angka kematian tidak selayaknya dipandang soal jumlah semata. Dari angka akan menegaskan latar sosiologis kejadian, penilaian situasi, tingkat kedaruratan, dampak psikologis hingga siapa yang harus bertanggung jawab.

Kegagalan negara

Perdebatan tentang angka kematian di setiap tragedi adalah anomali di negara demokrasi ini. Negara lagi-lagi gagal untuk mencegah tingginya korban. Pelaku, soal siapa yang benar dan siapa yang salah tidak jelas batas ujungnya. Suatu kondisi yang memilukan, anarkis dan berlarut-larut.

Tragedi 1965 merupakan bukti kegagalan negara mengelola masyarakat majemuk yang bertikai. Dalam konteks aparat yang harusnya menjadi pelindung di tengah pertikaian malah bersikap sebaliknya. Pembunuhan massal terjadi. Ingatan tentang kebencian pada semua hal yang berbau komunis berusaha diawetkan oleh rezim yang berkuasa saat itu.

Selain itu juga, pelanggaran HAM saat reformasi 1998 juga belum tuntas. Salah satu hal yang mengemuka pada saat itu adalah terkait sentiment anti-Tionghoa. Tragedi yang diwarnai dengan pembakaran, perkelahian, perusakan, penjarahan bahkan pemerkosaan. Sampai hari ini pun, dalang di balik kejadian tersebut tidak terungkap. Kasus hukumnya pun seolah tidak berujung dan menguap.

Kondisi aktual yang tidak kalah memilukan adalah tragedi penanganan Covid-19. Rasanya tidak terlalu susah menemukan dimana letak kesalahan pemerintah. Sejak awal kasus Covid-19, pemerintah cenderung abai. Langkah strategis yang seharusnya diambil untuk membatasi mobilitas malah bersikap sebaliknya dengan mempromosikan wisata yang jelas malah mendorong mobilitas.

Selain itu juga, dalam penanganannya tidak jarang menjadi ajang berebut panggung antar elit politik. Akibat dari buruknya penanganan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian harian tertinggi (Worldometers, 10/8/2021)

Sejarah selalu berulang. Apa yang dialami hari ini seperti tragedi sebelumnya. Banyak versi dan tidak berujung. Tragedi kemanusiaan yang telah terjadi akan selalu diingat. Ingatan akan tragedi akan masuk dalam memori publik, dan secara terus menerus diwariskan dari generasi-generasi. Kita akan hidup dengan beban sejarah yang tidak selesai.

Seperti apa kata Cicero seorang filsuf Romawi bahwa "Sejarah adalah kesaksian yang mengiringi berjalannya waktu; dia menyoroti kenyataan, menyegarkan ingatan, memberi tuntunan dalam hidup sehari-hari, serta membawakan kita kabar akan zaman dulu". Kalau sudah demikian, rasanya berat membangun Indonesia dengan beban sejarah kelam yang tak kunjung selesai.

Bagaimana mungkin menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang terjadi hari ini, sementara tragedi-tragedi sebelumnya masih menjadi beban. Pelanggaran HAM yang cenderung diabaikan akan menghalangi bangsa ini membangun kesamaan hak bagi semua warga bangsa. Padahal kesamaan hak adalah salah satu dasar penting membangun demokrasi yang bermartabat. Prospek demokratisasi akan mengarah pada kesuraman, karena tiadanya sejumlah prasyarat yang diperlukan, yakni kesamaan, keadilan dan jaminan rasa aman dari negara. Lagi-lagi kita gagal belajar dari sejarah

Crazy Rich Dan Gelembung Citra



Sebuah pengakuan yang cukup mencengangkan keluar dari korban aplikasi trading bodong di tahun 2022. Mereka mengalami depresi, abai terhadap anak dan pasangan, hingga sempat mau mengakhiri hidup. Ada juga yang mengakui tidak jarang berbohong, mencuri, hingga menipu orang terdekat untuk kepentingan trading. Ratusan juta rupiah mereka hilang tanpa bekas.

Tipu daya trading bodong menjadi semacam hipnotis yang mengelabui korban. Tanpa berpikir panjang, mereka terseret ke dalam arus kecepatan teknologi hingga membuat mereka tidak mampu menemukan arah keluar.

Seorang filsuf Prancis Paul Virilio dalam bukunya *Speed and Politics: An Essay on Dromology* (1986) menyatakan, realitas kebudayaan dewasa ini digerakkan oleh logika dan obsesi akan kecepatan. Kemajuan teknologi yang mendongungkan kecepatan dan akselerasi seolah tidak memberikan pilihan ruang dan semua hal dipaksa mengikuti arus yang serba cepat. Masyarakat seolah terseret ke dalam sebuah ruang dan memaksa mereka terperdaya tipuan citra. Hal tersebut tergambar, misalnya, dari kesaksian seorang ibu yang dengan mudahnya percaya kepada mereka yang disebut sultan atau *crazy rich*.

Gelembung citra

Doni Salmanan dan Indra Kenz adalah dua sosok yang banyak disorot akhir-akhir ini karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan investasi bodong dan trading. Untuk meyakinkan para korbannya, mereka kerap membuat masyarakat, terutama netizen dunia maya,

terkagum - kagum atas kekayaannya. Dari membagikan uang di ruang publik, membeli barang mewah dengan mudah, hingga memberikan uang Rp 1 miliar secara cuma-cuma. Citra menjadi *crazy rich* tersebut menjadi semacam alat hipnotis.

Fenomena itu menegaskan bahwa masyarakat kita hidup dalam kerentanan. Mereka mudah percaya kepada citra dalam dunia siber atau meminjam istilah Reza A.A. Wattimena dalam bukunya sebagai gelembung-gelembung citra. Yakni gelembung informasi dan gelembung harapan.

Gelembung informasi yang dimaksud adalah mudahnya otak kita diserang informasi dari iklan, media sosial, berita, hingga gosip. Akibat dari itu semua, masyarakat kita mudah percaya kepada seseorang yang membangun citra diri lebih dari aslinya. Hal tersebut tergambar dari bagaimana sosok Doni Salmanan dan Indra Kenz mampu memperdaya mereka. Citra kaya raya seolah memberikan harapan kepada para korban.

Masyarakat yang rentan

Kecepatan teknologi membuat sebagian orang mudah terpana pada identitas buatan yang jauh dari realitas. Orang tidak perlu benar-benar mempunyai banyak uang untuk terlihat kaya raya. Semuanya bisa terwujud di era kecepatan informasi.

Fenomena trading bodong bisa menjadi contoh bahwa di era kecepatan, masyarakat kita menghadapi kerentanan. Masyarakat kita dalam banyak hal yang terkait dengan dunia digital sering menjadi korban. Misalnya pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Korbannya tidak jauh berbeda dengan korban trading bodong. Kerap mengalami depresi berat hingga perilaku ingin bunuh diri.

Situasi tersebut menegaskan begitu rentannya masyarakat kita di dunia siber. Kerentanan tersebut disebabkan beberapa hal. Pertama, kondisi ekonomi yang berat di era pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Indonesia per September 2021

adalah 26,50 juta orang atau 9,71 persen. Memang terjadi penurunan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tapi, seperti data yang dirilis lembaga *Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)*, terjadi pertambahan jumlah pengangguran sekitar 356 ribu orang.

Kondisi tersebut yang membuat Indonesia memiliki beban kemiskinan dan pengangguran yang cukup berat ketika memasuki 2022. Kondisi ekonomi yang berat tidak menutup kemungkinan orang akan mudah tergoda oleh iming-iming peningkatan dana atau aset secara instan di dunia siber.

Kedua, terkait masih banyaknya masyarakat kita yang abai terhadap data privasi. Dalam trading, pinjol, *e-commerce*, ataupun hal lain, masyarakat selalu diminta untuk menyerahkan data pribadinya. Terkadang masyarakat menganggap hal tersebut sesuatu yang biasa. Padahal, di era digital, jual beli data privasi menjadi sesuatu yang rawan disalahgunakan. Data privasi dalam dunia siber adalah aset penting yang harus dijaga. Jika masyarakat abai dengan hal tersebut, kerentanan akan terjadi. Praktik kejahatan di era digital kini telah bertransformasi dan tidak jarang menggunakan data pribadi untuk disalahgunakan.

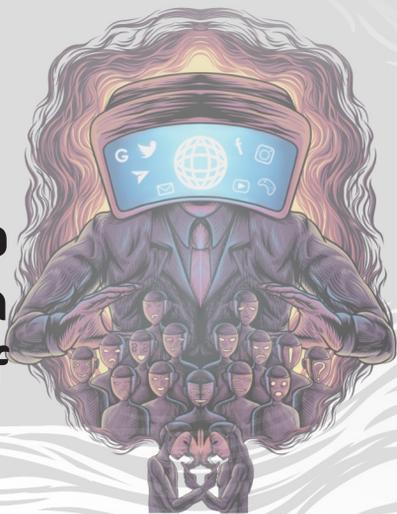
Ketiga, terkait lemahnya literasi digital. Sebagian masyarakat kita mudah sekali teperdaya citra diri dalam dunia digital. Kasus trading bodong ini adalah contohnya. Citra diri afiliator trading yang melakukan *flexing* atau pamer kekayaan menjadi salah satu pendorong orang untuk tergoda dan berani berinvestasi.

Dalam kondisi banjir informasi seperti sekarang ini, kita semua perlu berpikir reflektif. Kita tidak bisa lagi melihat dunia dari sisi permukaan saja. Semua penilaian, asumsi, dan prasangka harus ditunda terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang mumpuni dan mendalam. Kecepatan teknologi cenderung menciptakan pendangkalan yang berakibat sebagian masyarakat mudah sekali teperdaya.

Keempat, terkait literasi keuangan yang minim. Sebagian masyarakat masih susah membedakan dan bahkan abai dalam hal trading atau judi. Sebagian masyarakat kita masih awam dengan dunia trading. Mereka dengan mudah berinvestasi hanya dengan mengikuti para *influencer* yang diidolakan. Padahal, dalam konteks trading, dibutuhkan pemahaman operasional khusus agar tidak mudah terjebak pada investasi bodong.

Empat kerentanan tersebut secara faktual dihadapi masyarakat kita. Kecepatan teknologi menghasilkan gelembung citra dan harapan yang berujung pada kerentanan masyarakat. Gelembung tetaplah gelembung yang setiap waktu bisa meletus. Di satu sisi kita mengalami gelembung informasi, tetapi di sisi lain kita mengalami krisis literasi. Sebuah kondisi ironis di era kecepatan informasi.

Dinar Candy, Rasa Malu dan Kenekatan Kolektif



Protes atas kondisi memang beraneka macam. Tidak jarang pula dilakukan dengan cara yang tidak lazim. Dinar Candy adalah salah satu artis yang sedang melakukan protes atas perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di saat Covid 19 sedang tinggi - tingginya, melalui akun sosial mediana dia mengungkapkan rasa stresnya atas perpanjangan PPKM.

Ketika PPKM diperpanjang dia melakukan apa yang dia sampaikan di akun media sosialnya. Dia turun ke jalan dengan hanya mengenakan bikini sambil membawa papan yang bertuliskan, "saya stres karena PPKM diperpanjang."

Dalam konteks Indonesia, hal tersebut termasuk tidak lazim dan kontroversial. Sehingga tidak sedikit yang menghujat dan bahkan infonya dia harus menjadi tersangka. Protes seperti yang dilakukan oleh Dinar bukan sesuatu hal yang baru. Di luar negeri tercatat beberapa protes perempuan atas kondisi sosial dilakukan begitu vulgar hingga telanjang dada.

Hal tersebut bisa kita lihat dalam beberapa demonstrasi di Inggris, Chile, Tunisia, Perancis, Australia dan beberapa negara lain. Isunya pun beragam, dari isu perubahan iklim, kekerasan sexual, HAM dan isu lain.

Tetapi tulisan ini tidak akan mengulas tentang cara mereka protes apalagi mengaitkannya dengan persoalan hukum. Dimana akhir dari itu semua adalah bersalah atau tidak. Isu atau isi protes tidak kalah penting dari pada cara

protes. Antara cara protes dan isi protes jelas sesuatu yang berbeda. Apa yang digugat oleh Dinar menarik untuk dilihat dari persepektif yang berbeda.

Ruang, rasa malu dan elit politik

Dinar bisa jadi mewakili sebagian masyarakat yang berada dalam posisi tertekan atau stress atas kondisi yang ada. Terlepas urusan bahwa PPKM membawa efek yang baik atau tidak, bagi sebagian orang dengan profesi tertentu akan merasakan dampak secara langsung atas kebijakan tersebut.

Penghasilan berkurang drastis, PHK terjadi dimana-mana dan hal-hal lain yang memporak-porandakan stabilitas ekonomi masyarakat. Bikini dan protes harus dilihat dua hal yang berbeda. Membedakan hal tersebut rasanya relevan agar kita juga melihat maksud dari protes, bukan cara berpakaian dia yang dianggap menyalahi norma yang ada.

Selain itu juga, apa yang dilakukan Dinar membuat kita semua layak meninjau kembali mana ruang publik dan mana ruang privat. Demokratisasi internet banyak mengubah tatanan kehidupan sosial kita.

Perdebatan tentang ruang privat kita sudah mulai dipertanyakan ketika internet dan budaya siber hadir. Ketika Dinar dituduh mencemari ruang publik lantas bagaimana dengan acara televisi, konten-konten di sosial media atau platform digital lainnya yang menyiarkan perempuan berbikini atau adegan vulgar lainnya?

Pertunjukan vulgar era digital akan sangat mudah untuk diakses dan disaksikan khalayak. Kalau sudah demikian kita perlu melihat secara kritis bagaimana ruang publik dan privat di era digital begitu problematis. Dalam konteks yang lain, yang tidak kalah penting adalah ulasan tentang Dinar dengan bikininya yang dianggap sebagian orang kehilangan rasa malu. Di tengah kondisi krisis dengan tekanan ekonomi yang sulit begini, tidak sedikit orang yang merasakan betapa berat dan getirnya hidup dalam kondisi pembatasan.

Banyak orang berbuat nekat agar didengar dan bisa bertahan hidup. Tetapi kalau boleh jujur, Dinar sebenarnya tidak seberapa tepat disebut kehilangan rasa malu. Mereka para elit politik dengan baliho-baliho narsis yang massif dan tersebar di seluruh Indonesia yang layak untuk disorot dan dipertanyakan rasa malunya. Mereka para elit politik yang harusnya sibuk dan fokus berpikir menguatkan solidaritas antar sesama dan mendorong kebijakan pro-rakyat malah berfokus pada nasibnya di pemilu 2024.

Kalau sudah demikian, siapa di antara kita yang sedang kehilangan rasa malu di tengah krisis. Rakyat tidak akan kenyang dengan seruan-seruan kosong di baliho yang tidak akan mengubah apa-apa.

Kenekatan kolektif

Di banyak media Dinar disorot, beberapa orang lupa tentang apa isi protes dan lebih suka membahas bikininya. Beberapa orang lupa bahwa Dinar sedang mengingatkan kita bahwa situasi susah dan krisis sangat mungkin mendorong orang menjadi sangat nekat.

Tekanan hidup yang berat karena pandemi cenderung banyak membuat orang stress. Stress dan kenekatan merupakan dua hal yang berkaitan.

Kalau kenekatan-kenekatan yang didorong oleh rasa stress banyak muncul, negara perlu hadir untuk mengurangi risiko stresnya. Bukan menangkap orang-orang stress tersebut yang berpotensi membuat mereka lebih stress.

Kenekatan kolektif warga negara yang tidak puas dan didorong oleh kondisi hari ini tentunya berbahaya bagi keberlangsungan negara. Terbukti kondisi *chaos* di banyak negara disebabkan oleh ketidakmampuan negara mengelola rasa aman dan emosi warga negaranya.

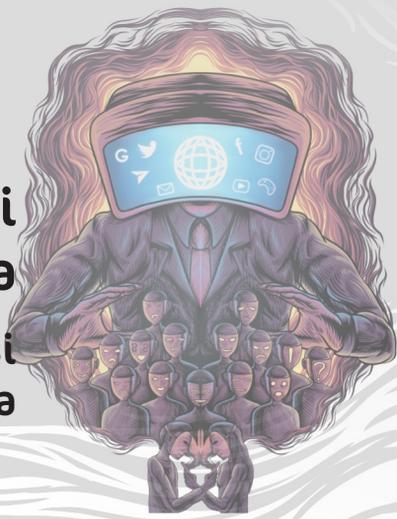
Kita semua tidak menginginkan hidup di negara dengan konsep yang kuat yang bertahan (*survival of the*

fittest). Siapa kuat, dia menang. Siapa yang lemah pasti akan kalah ditaklukkan yang kuat. Negara harus mampu melindungi semuanya. Tidak melihat latar belakang ekonomi, ras, agama dan suku.

Pandemi harus menjadi momentum merajut kembali solidaritas antar sesama untuk menang melawan virus. Toh virus tidak melihat latar belakang seseorang. Semua sangat mungkin bisa terjangkit. Semoga pandemi segera berakhir dan tidak ada lagi praktik kenekatan seperti yang dilakukan Dinar Candy.

Imajinasi Menjadi Aparat Negara

Kokang Senjata, Imajinasi Ideal, dan Masyarakat Kita



Pertengahan tahun 2020 jagat *Twitter* diramaikan dengan unggahan video Bripda GAP tentang aksinya memamerkan kokang senjata. Viral video seorang polisi muda menenteng senjata laras panjang sambil berkata, '*Pacar kamu ganteng? Kaya? Bisa gini nggak*'_sambil mengokang senjata tersebut. Pemilik akun @kapansarjana_ mengunggah video itu dan membubuhi kalimat bernada kritik.

Video tersebut menuai banyak respons netizen. Akun *Twitter* tersebut yang memulai keramaian dengan mengunggah video tersebut. Unggahan tersebut meluas, khususnya di *Twitter*. Per 15 Mei siang, video sudah ditonton 4,8 juta kali, dibagikan dan disukai lebih dari 50 ribu kali.

Netizen meresponsnya dengan komedi ditambah nyinyir, beberapa ada yang membuat versi parodi. Mereka merasa apa yang dilakukan Bripda GAP tidak etis dan tidak tepat. Perdebatan berlanjut terkait dilaporkannya akun yang dianggap menyebarkan video tersebut. Hal tersebut pun memantik banyak respons netizen.

Saya tidak ingin mengulas perdebatan tentang bagaimana secara hukum proses pelaporan tersebut. Satu hal yang cukup menarik perhatian saya adalah terkait perilaku Bripda GAP dan kondisi sebagian masyarakat kita.

Menjadi aparat negara, baik polisi maupun TNI, adalah mimpi sebagian masyarakat kita. Saya hidup di sebuah daerah di mana menjadi abdi negara (Polisi, TNI,

dan PNS) adalah cita-cita ideal banyak orang. Pekerjaan tersebut adalah idaman anak muda. Tidak sedikit keluarga yang rela berbuat apa saja agar anaknya menjadi abdi negara.

Imaji ideal menjadi aparat negara

Sampai hari ini pun saya kerap kali menemui anak muda yang didorong keluarganya untuk tetap mendamba menjadi aparat negara. Profesi Bripda GAP adalah idaman sebagian masyarakat kita.

Beberapa ulasan tentang motif yang melatarbelakangi seseorang berusaha keras agar bisa menjadi aparat negara penting untuk diulas. Menjadi aparat negara merupakan profesi yang mulia karena secara langsung menjadi bagian dari negara melayani masyarakat.

Tiga hal menurut pengamatan saya mengapa orang begitu antusias menjadi abdi negara:

Pertama, menjadi aparat negara menjanjikan jaminan keamanan finansial individu melalui serangkaian gaji dan tunjangan. Menjalani hidup dengan adanya kepastian finansial dan jaminan hari tua adalah dambaan setiap orang. Profesi abdi negara menyediakan hal tersebut. Maka tidak heran sebagian masyarakat kita berebut memimpikan hidup tersebut.

Kedua, menjadi aparat negara adalah *prestise* di tengah masyarakat. *Prestise* yang dimaksud adalah status sosial, kehormatan, wibawa, dan kedudukan di tengah masyarakat.

Bripda GAP secara tidak langsung menegaskan itu. Menjadi polisi adalah *prestise* tersendiri baginya di masyarakat. Video tersebut menegaskan pembeda (*distingsi*) dia dengan orang di luar dirinya.

Bagi kelas sosial tertentu, hal tersebut dilakukan agar terlihat berbeda dengan orang se-usianya dan mungkin juga kelompok di luar dirinya. Hal tersebut bisa disebut sebagai praktik *distingsi* (*distinction*).

Bourdieu dikutip Haryatmoko (2013) menjelaskan bahwa praktik distingsi dilakukan sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan posisi status kelas tertentu agar dianggap berbeda dengan yang lain. Apa yang dilakukan Bripda GAP melalui video menggambarkan tentang hal itu. Dengan menenteng kokang senjata, dia menegaskan bahwa tidak banyak orang bisa melakukan itu.

Ketiga, menjadi aparat negara khususnya polisi dan TNI identik dengan superioritas di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi penanda adalah penggunaan senjata yang tidak semua profesi bisa menggunakan.

Senjata dipakai untuk mendukung segala aktivitas keamanan dan pertahanan diri. Bripda GAP melalui videonya menegaskan hal tersebut. Senjata dibuat untuk mendukung maskulinitasnya sebagai laki-laki.

Dari ketiga hal di atas, ada sisi lain yang mungkin tidak disadari oleh sebagian masyarakat kita. Menjadi aparat negara atau yang bekerja untuk pemerintahan secara otomatis akan membatasi dirinya. Kepatuhan terhadap negara adalah salah satu doktrin agar loyal dan berbakti pada negara.

Abdi negara pada hakikatnya adalah alat negara. Alat yang digunakan untuk keamanan negara dan hal tersebut berlaku pada polisi. Dalam konteks itu, maka seluruh kebebasannya sebagai manusia terenggut untuk kepentingan negara.

Di satu sisi membayangkan *prestise*, kemapanan finansial, dan imaji superioritas, tetapi di sisi lain akan sangat mungkin menjadi manusia yang teralienasi atas kehidupan diri yang bebas. Hal tersebut disebabkan seluruh aktivitas dirinya hanya diperuntukkan untuk negara.

Alienasi atau keterasingan merupakan kondisi ketika individu manusia merasa terpisah, atau bahkan terputus dari masyarakat dan kebudayaan dominan. yang mana kebebasan menjadi ciri khasnya.

Konstruksi Orde Baru

Apa yang terjadi pada Bripda GAP mengingatkan saya pada kejadian yang dialami oleh seorang komandan distrik militer (Dandim) di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang saat itu dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak bisa “mengendalikan” istrinya. Hal ini terkait unggahan opini sang istri di halaman Facebook-nya.

Apa konteks yang mengaitkan kejadian itu dengan Bripda GAP. Melalui ungunya dalam video Bripda GAP berusaha menegaskan kepada wanita bahwa keren dan ganteng itu hanya dimiliki oleh orang yang menenteng senjata seperti dirinya.

Dalam konteks tersebut, ada semacam anomali yang dijanjikan. Padahal menjadi istri tentara tidak sebebaskan jika dibanding dengan profesi lainnya. Negara menentukan bagaimana individu harus bergaul, bertingkah laku, dengan siapa mereka berinteraksi dan bahkan urusan jatuh cinta, bagaimana mereka bisa bersenang-senang, sampai harus berpendapat apa.

Peristiwa komandan Dandim Kendari beberapa waktu lalu memberikan contoh atas hal tersebut. Selain itu, berita terbaru tentang seorang istri anggota TNI yang memposting dalam Facebooknya ‘Semoga Rezim Tumbang’, menyebabkan suaminya yang anggota TNI AD ditahan 14 hari. Hal tersebut menegaskan bahwa pekerjaan menjadi abdi negara (PNS/tentara/polisi) memposisikan perempuan sebagai pendukung karier (*konco wingking*). Istri dikendalikan penuh dalam ideologi gender. Status sosial perempuan akan sangat dipengaruhi oleh laki-laki. Jika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keluarga, maka sangat mungkin perempuan akan disalahkan paling besar karena semua beban reproduksi dan domestik dibebankan kepadanya.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan Suryakusuma (2012) bahwa ideologi negara orde baru juga dapat dinamakan Bapak-Ibuisme dimana “bapak” sebagai sumber kekuatan primer kekuasaan dan “ibu” sebagai

perantara kekuasaan tersebut. Dengan begitu, bapakisme memimpin kekuasaan formal, sementara ibuisme memimpin kekuasaan informal. Menurut Julia, dalam negara berideologi macam itu, perempuan didefinisikan seturut relasinya dengan laki-laki: sebagai istri, ibu, atau keduanya.

Dalam pengamatan saya, relasi tersebut sepertinya masih sangat kuat dan terjadi dalam konteks hari ini. Pewarisan atas ideologi negara sepertinya masih terus berlangsung. Peristiwa komandan Kodim yang pernah terjadi menjadi salah satu bukti.

Uraian di atas merupakan usaha melihat fenomena dari cara pandang yang berbeda. Meskipun bersifat kritis, saya tetap meyakini bahwa menjadi abdi negara adalah tugas yang mulia. Hal tersebut penting mengingat negara membutuhkan perangkat administrasi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Tentunya semua itu berorientasi pada kepentingan rakyat. Jadi melalui uraian ini paling tidak ada kesadaran pentingnya beranjak dari pewarisan atau pola konstruksi lama yang sudah tidak relevan lagi. Produktivitas kerja aparat negara sangat mungkin juga berbanding lurus dengan relasi gender yang setara.

Menjadi aparat negara adalah menjadi pelindung masyarakat, bukan memposisikan diri paling superior dan cenderung mengeksklusi kelompok yang berbeda di luar dirinya.



Jerinx, Pembelaan dan Teori Konspirasi

“Terus terang yang ngeritik saya masih suka minum dan main cewek, kalau semua di SID seragam, kalem, enggak ada yang suka minum, it's not SID, semboyan kita Bhineka Tunggal Ika in rock and roll way,” kata Jerinx.

Kutipan di atas saya ambil dari sebuah percakapan di sebuah media tahun 2018. Dalam percakapan itu Jerinx ingin menjelaskan bahwa dia memang berbeda dengan rekan satu bandnya di Superman Is Dead (SID).

Dia menegaskan tentang karakter rekan satu bandnya. Bobby pribadi yang kalem, Eka itu kocak dan humoris. Dia sebut dirinya *kampungan*. Maksudnya adalah perilaku-perilaku yang dia sebutkan dalam kutipan di atas (suka minum, main cewek dan perilaku ngawur lainnya). Dia mengakui kerap kali sering membuat banyak orang jengkel, termasuk para fans SID sendiri. Nama SID punya filosofi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan adalah ilusi. Karena itu tidak perlu terlalu kaget dengan gaya, perilaku dan omongannya yang seenaknya.

Beberapa minggu ini namanya menjadi buah bibir karena tuduhan dia tentang teori konspirasi. Dia didukung oleh para pengagumnya dan juga dicaci banyak orang yang tidak sependapat. Bukannya kalau kita lihat rekam jejaknya. Dia kerap kali membuat onar dan membuat kegaduhan di jagad media sosialnya. Belum hilang dari ingatan kita cara dia memaki Via Vallen yang dianggap tanpa izin menggunakan lagu SID. Setelah itu disusul gayanya yang bak pahlawan menantang dr. Tirta terkait anggapan konspirasi dalam kasus covid-19.

Saya termasuk orang yang mengagumi SID sejak di masa-masa SMA. Salah satu lagu yang paling saya ingat adalah adalah lagu 'Punk Hari Ini' dari album 'Kuta Rock City' yang rilis bulan Maret 2003. Sebuah lagu yang mengkritik tren era '90-an dan 2000-an awal. Sebuah lagu yang menurut saya punya lirik yang keren dan reflektif. Meskipun tidak terlalu percaya diri disebut sebagai *outsider* (fans SID) yang militan tapi rasanya hati ini terpanggil untuk membela Jerinx. Meskipun saya yakin, dia tidak butuh dibela ditengah *bully-an* yang tajam. Yang ada *bully-nya* bakal diajak duel.

Sesi perdebatannya dengan dr. Tirta sebenarnya adalah moment yang saya nantikan saat itu. Dalam keyakinan saya, ia bakal dihajar habis oleh si dokter dengan argumen-argumennya yang kokoh. Tetapi faktanya tidak, perdebatan di *live* instagram malam itu bukanlah perdebatan. Bisa dikatakan itu hanya obrolan biasa seorang yang tidak pernah kenal sebelumnya. Canggung, saling sapa seperti orang mau pacaran, banyak basa-basi dan endingnya tidak selesai karena persoalan jaringan internet. Meski dengan gayanya Jerinx menuduh itu adalah ulah elit global yang sedang sabotase obrolan mereka. CIA mungkin ya. Ya sudahlah, paling tidak lumayan buat hiburan setelah berbuka.

Tidak lama setelah obrolan *ngalur-ngidul* dengan dr Tirta. Jerinx diundang ke sebuah stasiun televisi swasta. Ketika *flayer* tentang info tersebut rilis. Tidak sedikit orang *bully* dia. Orang yang sukanya menuduh media *mainstream* salah satu biang dari persoalan, eh sekarang bersedia diundang di media *mainstream*. Bagi sebagian orang mungkin seperti menjilat ludah sendiri. Tapi bagi saya tidak. Penampilan Jerinx malam itu benar-benar memukau. Tentunya yang memukau bukan soal pembahasannya tentang Covid-19. Lho kok bukan tentang itu? Ya jelaslah, yang ada nanti saya ikutan di-*bully* kalau ikut membela. Jerinx sudah kebal dianggap asal bunyi dan berbicara tidak memakai data. Sedangkan saya tidak.

Jerinx dan 4 hal penting

Setidaknya ada 4 hal yang membuat saya kagum dengan dia. *Pertama haters*-nya harus tahu, meski diundang ke media *mainstream*, dia tidak segan-segan menyebut dan menuduh media sebagai biang dari kekacauan yang ada. Ibarat perang, dia sedang memanfaatkan kesempatan di kandang musuh untuk menyerang habis-habisan. Bahwa hasilnya makin memperburuk citranya. Itu urusan lain. Dia mematahkan anggapan para *haters*. Bahwa dia sedang menikmati posisinya karena tampil di sebuah media *mainstream*. Perdebatannya dengan Aiman sang presenter membuktikan itu.

Yang *kedua*, justru ini yang sedang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Beberapa kali dia menyarankan agar masyarakat tidak panik. Secara gagah dia menyebut teori psikomatik. Suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran mempengaruhi tubuh, hingga memicu munculnya keluhan fisik. Hal tersebut bisa terjadi pada beberapa orang karena rasa panik yang berlebihan atas Covid-19. Hal tersebut lagi-lagi disebabkan oleh media *mainstream* yang terus menerus memberitakan kepanikan. Paling tidak sisi ini yang saya anggap paling penting dari semua pendapatnya.

Ketiga, sisi lain yang menarik dan baru diucapkan di acara malam itu adalah kepercayaannya pada presiden Jokowi. Secara terbuka dia mengungkapkan bahwa apa yang dia yakini benar juga diyakini presiden benar. Jerinx menjadi contoh yang baik bagi para pembantu presiden. *Lo kok bisa?*

Beberapa kali ketika presiden mengeluarkan *statemen*. Tidak lama berselang pasti ada saja *statemen* menteri yang tidak sejalan. Terutama menteri urusan segalanya. Dan yang paling *gres* terkait larangan mudik. Jelas-jelas Jokowi melarang, eh ada menteri yang baru sembuh dari Covid-19 terkesan membolehkan. Contoh dong Jerinx, meski suka kritik pemerintah. Dia percaya dengan presiden dan yakin pikirannya sama.

Keempat, hal yang menurut saya penting dipahami *haters* adalah Jerinx hanya musisi, bukan ilmuwan politik atau kesehatan. Jadi argumen-argumennya terkait konspirasi dan Covid-19 anggap saja sebuah pengayaan wacana dari seniman. Tidak usah muluk-muluk tanya data apalagi tanya legitimasi keilmuan berbasis teori. Dia ikut peduli dengan memberikan argumen berbeda itu sudah bagus. Bahwa itu akhirnya jadi gaduh. Ya salah kalian sendiri yang menganggap segala ucapan yang keluar darinya itu penting.

Ya apapun itu, Itulah Jerinx. Jelas tidak sempurna dan malah lebih sering membuat orang murka. Sejak awal dia kan memang kampungan. Suka mabuk, suka main perempuan dan perilaku-perilaku kampungan lainnya. Mungkin tuduhan terkait konspirasi itu juga bagian dari kampungan itu sendiri. Akhir kata, Jerinx tidak perlu dibela atas kengawurannya, dia sudah maha segalanya. Bela-lah mereka yang diperlakukan tidak adil. Dan Jerinx sudah melakukan itu. Mari angkat gelas dan bersulang untuk dia. Ditunggu aksi-aksi lainnya. Dirinya tetap pahlawan di mata pengagumnya.



Kolonialisme dan Ruang Publik yang Rasis

Selalu saja terulang. Ungkapan dan tindakan rasis di ruang publik kita. Kali ini hinaan bernada rasis terjadi dalam dunia sepak bola. Hinaan yang dialami oleh pemain dan pelatih asal Papua, Rivaldo Wally dan Ardiles Rumbiak. Kejadian tersebut terjadi pada babak 32 besar liga 3 antara Belitong FC versus Persikota Tangerang di Stadion Benteng, Tangerang di awal tahun 2022 .

Rasisme sudah menjadi kanker yang masuk dalam akar ruang publik kita. Perlakuan rasisme terhadap Obby Kogoya di tahun 2016. Persekusi pada mahasiswa Papua di Surabaya di tahun 2019, aksi rasisme terhadap *youtuber* Papua 2020 lalu dan di tahun 2021 lalu ungkapan salah satu menteri yang mengancam ASN yang tidak cekatan dalam bekerja untuk di mutasi di Papua.

Kanker akut rasisme di ruang publik bukan persoalan yang sederhana. Cara pandang terhadap Papua belum juga beranjak meskipun kita sudah belasan tahun lepas dari otoriterisme Soeharto. Berhentinya dominasi Soeharto yang sangat jawa-sentris harusnya juga menghentikan cara pandang minor terhadap identitas di luar Jawa, terutama Papua.

Tetapi faktanya tidak begitu, Papua atau masyarakat Timur seringkali mengalami tindakan rasis dan tindakan tidak menyenangkan lainnya. Wacana merendahkan seolah berjalan tanpa henti dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Kolonialisme internal

Anggapan rendah terhadap kelompok lain bisa jadi disebabkan oleh cara berpikir oposisi *biner*. Diri dianggap pusat sementara yang lain dianggap pinggiran. Dalam konteks Indonesia, relasi Papua dan Jawa mempunyai sejarah panjang. Purba (2010) menjelaskan bagaimana pembangunan wacana ke-Indonesiaan dalam masa orde baru yang sangat Jawa-sentris.

Hal tersebut tergambar bagaimana proses transmigrasi masyarakat Jawa ke Papua. Wacana kolonial tampaknya tidak bisa dilepaskan dalam proses tersebut. Saat itu mungkin hingga saat ini juga, masyarakat Papua ditempatkan masih sebagai makhluk yang belum dewasa (*mature*) dan hendak didewasakan sangat mirip dengan wacana kolonial di Afrika.

Sebuah persepsi yang menempatkan kultur 'dijajah' sebagai "kekanak-kanakan' berarti menggadaikan bahwa logika kedewasaan hanya bisa dicapai oleh 'si terjajah' apabila masuk dalam sistem kuasa 'si penjajah'. Maka tidak berlebihan ketika saya menyebutnya praktik yang terjadi di Papua selama ini adalah kolonialisme internal.

Dalam artikel yang berjudul *Internal Colonism dan Nation Development*, González Casanova (1965) menjelaskan bahwa kolonialisme internal adalah efek tidak merata dari pembangunan ekonomi pada basis regional di mana eksploitasi kelompok mayoritas kepada minoritas dalam masyarakat yang lebih luas dan mengarah pada ketidaksetaraan politik dan ekonomi antara daerah dalam suatu negara.

Kolonialisme internal dapat dilihat sebagai penguasaan negara yang secara *de jure* sudah diakui merdeka tapi secara sah menguasai tanah, membatasi kebebasan, atau menjajah suku atau rakyat dari bangsanya sendiri. Bertahun-tahun Papua hidup dalam cara pandang di atas. Dianggap kurang berperadaban dan dianggap hidup dalam keterbelakangan.

Anggapan tersebut mempunyai implikasi yang serius dalam relasi kehidupan sehari-hari. Karena dianggap tidak setara maka dengan mudah disudutkan dan bahkan direndahkan. Tingkah rasis tersebut yang sering kita dengar di ruang publik kita. Pelabelan orang Papua sebagai “orang bodoh”, “udik” dan *stereotype* lain akan terus berlangsung.

Rasisme yang menubuh

Warisan cara pandang terhadap orang Papua telah menubuh lama dan mandarah daging di sebagian orang Indonesia. Bahkan ada anggapan tentang sikap orang Papua yang dianggap tidak tahu diri padahal telah diberi otonomi khusus (Otsus).

Kita semua lupa bahwa pengakuan atas hak dan martabat tidak bisa di distibusikan dengan menggunakan anggaran. Apalagi berandai-andai bahwa segala bentuk pengakuan itu dapat dirumuskan dalam format kebijakan yang formal dan kaku yang selama ini dilakukan negara. Pengakuan adalah soal penghormatan kepada kemanusiaan.

Selama hal tersebut masih belum menjadi perhatian utama. Maka bisa dipastikan akan ada saja aksi konyol merendahkan dan bahkan menghina martabat orang Papua di ruang publik kita. Mental rasis mengendap sekian lama dan mengharuskan kita selalu memiliki keinginan untuk menundukkan siapa saja yang dianggap rendah. Ini persoalan akut bangsa ini.

Modal utama menjadi negara demokratis adalah pengakuan atas kesamaan dari segala macam perbedaan. Indonesia yang multikultur tidak akan bisa besar jika hambatan-hambatan seperti rasisme tetap ada dan cenderung dibiarkan. Ujaran konyol akan terus keluar di ruang publik kita meski terkadang berdalih ketidak-sengajaan.

Kemanusiaan harus menjadi nilai utama dalam membangun ke-Indonesiaan. Papua harus diposisikan

sebagai bangsa yang sama dan mempunyai hak yang sama pula. Relasi yang dibangun harus berangkat dari solidaritas warga bangsa bukan atas dasar belas kasihan ataupun sikap lain yang merugikan bahkan merendahkan.

Negara harus hadir mengurai masalah serius tersebut. Membangun cara pandang baru melalui pendidikan dan budaya. Bukan pendekatan formal tanpa dialog. Bukan pula pendekatan militer yang jelas melanggar HAM.



Lelucon yang Tak Lucu tentang Perempuan Saat Pandemi

Dalam sebuah obrolan dengan teman perempuan di kantor, dia bercerita bagaimana harus tetap bekerja di luar rumah tetapi juga harus berperan penuh atas aktivitas domestik di rumah. *Work From Home* (WFH) saat pandemi justru lebih banyak memposisikan perempuan dalam kondisi yang berat. Sebuah kondisi dimana banyak aktivitas-aktivitas yang baru harus dibebankan kepada perempuan. Ketika aktivitas belajar anak pindah ke rumah, ketika harus memasak sendiri karena khawatir atas kondisi di luar, ketika aktivitas di rumah yang padat sehingga membuat rumah makin sering kotor dan berbagai aktivitas baru lainnya. Hampir semua aktivitas baru tersebut lebih banyak dibebankan pada perempuan.

Selain itu, perempuan juga kerap kali mengalami tindakan kekerasan dan diskriminatif. Berdasarkan data SIMFONI PPA yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2 Maret-25 April 2020, tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa, dengan total korban 277 orang, serta 368 kasus kekerasan yang dialami anak, dengan korban 407 anak.

Kondisi di atas ternyata tidak berhenti di situ. Sudah jatuh tertimpa tangga. Hal tersebut adalah gambaran yang dialami oleh perempuan di masa pandemi. Di tengah kondisi krisis begini, masih ada saja ungkapan yang cenderung mengarah pada kekerasan simbolik. Sebuah lelucon seksis, misoginis dan tidak peka pada kondisi. Sialnya lagi, beberapa hal tersebut diungkapkan oleh pejabat negara.

Lelucon yang tidak lucu

Selama pandemi ini tercatat beberapa lelucon yang kerap kali muncul ke publik. Beberapa ungkapan yang mungkin dianggap lelucon padahal punya implikasi yang cenderung merendahkan bahkan diskriminatif. Beberapa contoh di bawah ini memberi gambaran atas kondisi tersebut.

Di bulan awal penyebaran Covid-19, viral sebuah pernyataan yang dianggap lelucon, yakni "*corona negatif istri positif*". Saya tidak tahu dari mana asal ungkapan tersebut, tetapi kalau mau jujur narasi tersebut seolah-olah menempatkan perempuan hanya sebagai pemuas seksual ketika berada di rumah. Otoritas tubuh perempuan menjadi sangat dikontrol oleh laki-laki. Ketika perempuan mempunyai rahim. Hal tersebut sertamerta di pahami bahwa bahwa tugas perawatan atas anak menempel padanya seperti halnya rahim yang digunakan untuk melahirkan dan payudara yang digunakan untuk menyusui.

Dua bagian vital tersebut dimaknai mempunyai fungsi dan peran sosial yang diterjemahkan secara tidak proporsional. Sehingga tidak heran sebagian kita kerap kali bersikap tidak adil atas hal tersebut. Bisa jadi dalam kondisi pandemi yang meneror begini, perempuan memiliki keinginan untuk istirahat atau menghentikan proses reproduksi dan hal tersebut memang relevan dan masuk akal.

Lelucon tentang janda adalah cerita lain dari Anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP saat mengikuti rapat penanganan virus corona. Dengan nada santai, Ribka berbicara soal singkatan 'korona' yakni "*komunitas rondo mempesona*". Hal itu disampaikan Ribka saat rapat kerja (Raker) bersama dengan Menkes Terawan Agus Putranto di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Janda adalah posisi yang kurang menguntungkan secara psikologis, biologis dan sosiologis. Kondisi tersebut

malah tidak membuatnya mendapat empati tetapi cenderung mendapatkan stigma yang tidak mengenakkan. Di sebagian masyarakat, janda kerap kali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah, lemah, penggoda lelaki orang, tidak berdaya dan membutuhkan belas kasih sehingga dalam kondisi sosial budaya seringkali terdapat ketidakadilan. Jadi membuat lelucon janda di tengah pandemi begini menegaskan akan hilangnya rasa empati. Baik terhadap perempuan maupun kemanusiaan.

Yang terbaru, lelucon datang dari Mahfud MD, salah seorang Menteri Koordinator yang membawahi hukum dan HAM yang mendapat kiriman meme dari menteri kordinator juga, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Meme berbahasa Inggris berjudul *"Corona is like your wife"*. *"Corona itu seperti istrimu,"*. *"Ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia. Tapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu. Sesudah itu, you learn to live with it. Ya sudah, sudah begitu."* Pernyataan ironis tersebut sudah mendapat banyak kecaman.

Menyamakan corona dengan istri adalah cara berpikir menindas dan misoginis. Sebuah ungkapan yang secara tidak langsung menyalahkan perempuan. Dalam konteks yang lain, perempuan memang selalu di-alam-kan dan diasosiasikan dengan binatang, seperti: ayam, kucing, ular bahkan virus. Kata-kata yang dipakai di atas jelas menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan alam. Misalnya, tanah yang digarap, bumi yang dikuasai, hutan yang diperkosa, binatang buas yang ditaklukkan dan lain-lain.

Secara sadar ada keinginan untuk menaklukkan perempuan. Jadi rasanya tidak mengada-ada bila perempuan dan alam mempunyai kesamaan secara simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin.

Ucapan Mahfud ini menyiratkan *stereotype* bahwa perempuan sudah sepatutnya ditaklukkan dan mungkin juga akan diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan domestik. Perempuan secara tidak sadar diidealkan oleh otak maskulin agar lebih pasif atau submisif.

Lelucon tersebut terasa aneh ketika keluar dari seorang menteri yang paham betul tentang HAM. Tetapi lelucon tersebut menurut ceritanya dikirim oleh seorang menteri yang banyak fokus menangani sumber daya alam. Jadi, apakah hal tersebut wajar? Tetap saja tidak wajar dan justru semakin menegaskan bahwa nasib perempuan dalam pikiran sang menteri akan tidak jauh dengan nasib alam di Indonesia.

Bahayanya lelucon seksis dan misoginis

Bagaimana mungkin lelucon yang tujuannya menghibur dan untuk menghilangkan stres malah mempunyai dampak yang berbahaya. Lelucon adalah sesuatu hal yang menyehatkan tetapi tidak semuanya. Lelucon seksis dan misoginis adalah contohnya. Mengapa kita harus menghindari dan bahkan melawan model lelucon begini?

Ketika kita membiarkan lelucon model di atas akan ada kecenderungan menganggap hal tersebut lumrah dan lazim. Secara tidak langsung kita mendukung budaya kekerasan verbal. Dalam konteks ini perempuan diposisikan sebagai objek atas lelucon yang sensual yang mendiskrimasi dan menyakitkan.

Sebuah penelitian dari Western California University menunjukkan bahwa orang yang kerap terpapar humor seksis dapat menyebabkan orang tersebut menoleransi perilaku memusuhi dan mendiskriminasi perempuan. Paparan humor seksis pada diri seseorang juga akan berpengaruh pada perilaku orang tersebut. Bukan hanya itu, dalam penelitian yang sama juga ditemukan bahwa orang-orang yang terpapar gambar dan humor seksis juga cenderung setuju dengan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan.

Dalam penelitian yang lain, Julie A. Woodzicka dan Thomas E. Ford pada 2010 menjelaskan lelucon seksis itu justru melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong perilaku seksis di kalangan pria. Padahal, ketika perempuan menjadi target guyonan, mereka justru

memperoleh efek emosional yang merugikan, contohnya rasa jijik, marah, dan merasa dirinya dipermalukan.

Kalau sudah begitu? Masih mau bermain-main dengan lelucon sexis?

Memahami Kata Terserah Dalam 'Indonesia Terserah'



Terserah adalah satu kata yang kerap kali multitafsir dan sering membuat sebagian dari kita bingung. Apalagi kata terserah diucapkan oleh orang terkasih, baik pacar atau pasangan hidup kita. Bagi kita yang menerima ucapan tersebut harus benar-benar berhati-hati. Bisa jadi hal tersebut menjadi awal perang dunia dengan pasangan ketika salah langkah dalam memahami makna terserah.

Kata “terserah” dalam konteks sosial mempunyai beberapa makna. Bergantung pada *setting* dan kondisi sosialnya. Inilah beberapa makna terserah yang saya pahami berdasarkan pengalaman sehari-hari.

Terserah bermakna kekecewaan ketika harapan tak sama dengan kenyataan. Apalagi ketidaksamaan harapan tersebut dipicu oleh perilaku yang tidak seharusnya. Terserah bisa juga bermakna tidak peduli karena sudah lelah dengan kondisi yang berkali-kali berulang. Seolah ada kesengajaan melakukan hal tersebut.

Terserah bisa juga dimaknai sebuah pertanda bahwa kita diminta peka atas keinginan yang tidak sempat terucap oleh kata. Dengan mengucap terserah bisa jadi pasangan kita menginginkan sesuatu hal yang diinginkan tetapi kita abai dan terkesan tidak peduli.

Terserah bisa juga bermakna ungkapan lelah oleh kondisi yang melelahkan dan tak kunjung berubah. Beberapa hal di atas menegaskan bahwa memaknai kata terserah bukan hal yang sederhana. Dalam hubungan dengan pasangan, kita kerap dibuat bingung sendiri

dengan kata tersebut. Apalagi ketika pasangan *mood*-nya lagi kurang bagus. Apa yang ada di pikiran kita tentang kata terserah ketika dikaitkan dengan “Indonesia Terserah”?

Indonesia terserah, sebuah alarm yang serius

“Indonesia Terserah” masih menjadi pembahasan dan diperbincangkan serius oleh publik di pertengahan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh beredarnya di sosial media sebuah *hashtag* ataupun ucapan dari para tenaga medis. Frasa ini muncul setelah dibagikan oleh para tenaga medis yang seolah sudah “terserah” dengan segala sikap sebagian masyarakat yang cenderung abai dengan penyebaran wabah virus corona. Hal ini terlihat usai viral adanya kerumunan saat penutupan McD Sarinah dan adanya keramaian di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2020) lalu.

Selain itu, kondisi tersebut juga bisa kita kaitkan dengan wacana yang beredar bahwa pemerintah tengah merencanakan pelonggaran PSBB di tengah penyebaran virus Covid-19 yang masih sangat tinggi. Selain itu, tagar tersebut bisa menjadi semakin massif oleh beberapa aksi konyol yang dipertontonkan ke publik. Dari aksi sesaknya bandara, bergerombolnya orang di Mal dan yang super heboh, aksi konser donasi yang diadakan BPIP dan MPR. Dimana para pejabat negara tidak mepedulikan protokol kesehatan “*physical distancing*” ketika acara.

Dari gambaran kondisi di atas, apa makna terserah dalam konteks “Indonesia Terserah”? Andai kita memposisikan para tenaga medis sebagai pasangan terkasih kita. Bisa jadi kata terserah di atas terangkum dalam beberapa makna.

Indonesia terserah bermakna kecewa atas perilaku sebagian masyarakat yang abai atas protokol kesehatan. Lelah karena perilaku tersebut terjadi berulang-ulang. Atau bisa juga bermakna tidak peduli karena para pejabat kita kerap kali tidak peka dengan kondisi yang terjadi. Sebuah

kondisi yang memang menyebalkan, dari minimnya alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan, kebijakan yang kerap kali berubah-ubah dan dianggap *anti-science* dan yang terakhir masyarakat kerap dipertontonkan pertunjukan saling serang antar pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Lantas kalau sudah begitu, kita hanya bisa berharap kepada masyarakat agar kembali paham dan menyadari bahwa kata terserah itu *alarm* serius untuk kita semua. Bayangkan jika para tenaga medis itu mogok kerja. Apa jadinya Indonesia, pasti akan ada pergeseran dari Indonesia terserah menjadi Indonesia menyerah. Sebuah kondisi yang tidak ingin saya bayangkan.

Munculnya tagar “Indonesia Terserah” dari tenaga kesehatan adalah *alarm* serius. Apakah mereka bakal menyerah? Saya yakin tidak. Ratusan bahkan ribuan tenaga kesehatan di Indonesia mempunyai janji profesi yang tidak mungkin mereka khianati. Seandainya hal tersebut terjadi, berarti sudah di luar batas kemampuan para tenaga kesehatan. Saya yakin itu.

Saya yakin kita semua belum terlambat untuk memperbaiki keadaan. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah bergabung dengan kaum rebahan dan kembali rebahan. Saya yakin tidak semua orang bisa begitu. Sebagian dari kita masih harus menyambung hidup dan rasanya susah sekali untuk tidak keluar rumah. Tetapi bagi sebagian kita yang masih bisa bertahan, tetaplah di rumah dan tahan nafsu konsumtif kita.

Tiga seruan kembali rebahan

Kaum rebahan hari ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kaum rebahan dianggap bisa mengurangi laju virus. Kaum rebahan adalah sosok yang waktunya lebih banyak di rumah namun tetap bisa eksis merencanakan, melaksanakan bahkan mengendalikan segala kegiatan yang menjadi tujuan dan harapan hidupnya. Saya kira kondisi hari ini belum terlambat. Mari kembali ke rumah dan bergabung dengan kaum rebahan. Apa maknanya?

Pertama, keluar rumah hanya untuk urusan yang penting-penting saja. Kendalikan nafsu untuk berbelanja baju lebaran. Di saat krisis begini, orang tidak akan terlalu

peduli dengan penampilan atau baju baru yang kita pakai. Ini hari-hari dimana nafsu konsumtif kita sedang diuji.

Kedua, mari galang donasi untuk warga yang terdampak. Sudah saatnya ada gerakan masyarakat menolong masyarakat di tengah negara yang sedang bingung. Tentunya cara menggalang donasi yang memperhatikan protokol kesehatan. Tidak seperti yang dicontohkan para pejabat kita beberapa hari yang lalu. Generasi rebahan pasti punya cara kreatif untuk itu. Biarlah negara yang sedang bingung tetap mencari jalan agar mampu membawa masyarakatnya keluar dari krisis ini.

Ketiga, mari bersatu dengan generasi rebahan untuk jadi *watch dog* (agen pengawas sosial). Kaum rebahan melalui tagar atau komentarnya di media sosial telah banyak melakukan perubahan sosial. Dengan rebahan dan senjata *gadget*, saya yakin akan banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya dengan membuat tagar (*hashtag*) yang dimaksudkan untuk menolak atau menyeru dalam bingkai bersama atas suatu isu. Melalui tagar, kita dapat terkoneksi, walaupun narasi, pandangan, dan makna yang diberikan bisa sangat berbeda sesuai dengan aspirasi, harapan, keyakinan, keluhan, dan gaya hidup masing-masing. Tagar terbukti mampu mengubah banyak hal.

Ketiga seruan di atas adalah cara paling sederhana yang bisa kita lakukan agar Indonesia terserah tidak berubah menjadi Indonesia menyerah. Sebuah kondisi yang pastinya tidak kita inginkan. Jadi yang masih sering keluar rumah, mulailah kembali ke rumah. Bergabunglah dengan kaum rebahan.

Pemaafan, Beban Sejarah, dan Lupakan Saja Mandela!



Idul fitri di tahun 2020 dan 2021 begitu berbeda. Sebuah kondisi di mana perbatasan interaksi manusia menjadi cirinya. Implikasi dari itu semua adalah banyak orang berusaha membatasi diri untuk bertemu dan berjabat tangan. Tetapi perubahan tersebut tidak akan mengubah substansi dari Idul fitri, yakni momen saling bermaaf-maafan. Momen di mana banyak orang secara terbuka minta maaf dan mungkin juga memaafkan.

Memaafkan tentunya bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Terkadang kita mudah berpura-pura tersenyum dan mengucapkan kata maaf tetapi hati orang tidak ada yang tahu. Karena sejatinya hal yang terberat dalam memaafkan adalah kemauan untuk menundukkan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri agar ketika mengingat sebuah kesalahan yang menyakitkan ada imunitas diri yang menguatkan untuk mau menerima dan memaklumi.

Sejarah pemaafan besar di dunia ini adalah sejarah tentang Nelson Mandela. Figur besar yang benar-benar berhati besar. Nelson Mandela seorang tokoh politik Afrika Selatan. Setelah pembebasan dirinya dari masa kurungan yang kejam selama 27 tahun akibat politik apartheid, dia mengatakan:

"Ambil pistol, pisau, dan badik kalian, lalu buang ke laut. Akhiri perang sekarang juga!"

Mandela berbicara di lautan rakyat sebesar 100.000 di stadion Kriket di Durban. Meskipun mengalami siksaan yang kejam karena politik apartheid, dia memohon agar perang saudara yang menghabisi nyawa ribuan orang dihentikan.

Dalam pidatonya dia menegaskan bahwa rasa dendam dan saling membenci sudah sepatutnya tidak punya ruang berkembang kalau mereka mendambakan kehidupan demokrasi dan kesetaraan martabat sebagai manusia. Tanpa kemampuan memaafkan, cita-cita itu mungkin tidak pernah kejadian.

Sejarah pemaafan yang dicontohkan Mandela adalah sejarah untuk dunia dalam konteks kemanusiaan. Apa yang dilakukan Mandela menginspirasi banyak negara yang pernah atau sedang mengalami konflik berkepanjangan.

Indonesia dan beban sejarah

Sejarah Indonesia hari ini adalah sejarah tentang banyaknya konflik yang masih banyak menyisakan persoalan. Tercatat beberapa peristiwa yang dianggap belum tuntas di antara: Peristiwa 1965, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Penembak Misterius (Petrus), kasus Wamena dan Wasilor, penculikan dan penghilangan paksa aktivis, peristiwa Talangsari, peristiwa dukun santet, ninja, dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998.

Satu catatan penting dalam konteks Indonesia adalah bagaimana mungkin sebuah bangsa yang besar bisa menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik sementara masih banyak beban sejarah yang belum tuntas. Perjalanan sebagai bangsa besar pasti akan terkendala bagai duri dalam daging. Ibarat orang berlari maka akan selalu ada beban yang mengganggu.

Salah satu persoalan yang kerap kali selalu muncul adalah tentang wacana kebangkitan komunisme atau PKI. Apapun peristiwa atau momentum besar yang sedang dihelat atau terjadi di negeri ini, hal tersebut kerap muncul menjadi salah satu hal yang dibicarakan. Pandemi

Covid-19 kali ini juga tidak lepas dari adanya pihak yang memanfaatkan kondisi dengan menyebarkan informasi tentang adanya gerakan PKI yang memanfaatkan kondisi yang terjadi.

Peristiwa 1965 sudah lewat 55 tahun silam. Sampai hari ini kita kerap kali menghadapi pertarungan wacana dalam merebut pemaknaan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kompetisi antar-kelompok untuk menafsirkan dan menguasai tafsir secara monolitik berlangsung terus-menerus dan itu mulai bergulir pada era reformasi dengan intensitas yang sangat tinggi.

Hal di atas yang masih terjadi di Indonesia. Komunisme sebagai sebuah paham kerap kali makna dan posisinya diperdebatkan. Hal tersebut yang menurut saya berbeda dengan apa yang dialami oleh Nelson Mandela. Pengalaman di Afrika Selatan sangat berbeda dengan Indonesia.

Hal di atas yang membuat kondisinya begitu berbeda dengan apa yang dialami oleh Afrika Selatan. Di sana penindasan dan diskriminasi dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam. Putih melawan hitam, seperti Belanda melawan Indonesia.

Tetapi yang terjadi dalam konteks komunisme di Indonesia tidaklah sesederhana itu. Dan hal tersebut terbukti hingga saat ini. Perdebatan tentang hal tersebut masih sering berlangsung sengit.

Jadi sebelum menemukan siapa yang bersalah dan mau mengakui kesalahannya, rasanya akan terasa susah menentukan siapa yang harus meminta maaf. Apa yang dicontohkan Mandela menjadi tidak relevan. Mengingat persoalannya tidak hanya sekadar meminta maaf atau memaafkan. Tetapi butuh jalan panjang untuk meniti itu semua. Jadi untuk sementara ini lupakan Mandela dalam konteks Indonesia. Pemanfaatan ternyata menjadi sesuatu hal yang tidak sederhana.

Pertanyaannya kemudian, sampai kapan bangsa ini bisa berdamai dengan masa lalu? Energi yang dikeluarkan untuk berkonflik yang begitu besar akan lebih bermanfaat jika dicurahkan pada kerja-kerja produktif membangun bangsa yang dapat memberikan warisan tatanan yang beradab bagi generasi masa depan.

Karena itu, di tengah warisan pertarungan yang tidak ada habisnya tersebut, jalan membiarkan setiap anak bangsa mewacanakan dan mencari narasi atas sejarah menjadi relevan.

Generasi muda di tengah pertarungan wacana

Saya adalah generasi yang lahir di era 1980-an akhir. Semasa SD sempat mendapat pelajaran tentang bahaya laten komunisme, baik melalui media buku maupun televisi. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena kita memasuki era reformasi.

Diskursus tentang komunisme di era reformasi mengalami sedikit perubahan. Angin reformasi membuka jalan baru untuk lebih terbuka pada banyak hal. Memasuki masa di perguruan tinggi, meskipun tidak diajarkan secara langsung di kampus. Kajian-kajian tentang hal tersebut menjadi salah satu bahan kajian dalam pergulatan dunia gerakan mahasiswa.

Apa yang dikatakan Ariel Heryanto dalam sebuah opini tahun 2004 menjadi relevan dengan yang saya alami ketika mahasiswa. Bahwa marxisme sendiri telah mengalami krisis serius dan dikritik banyak pihak, termasuk para bekas tokohnya. Tetapi, dari krisis dan kritik ini telah bertumbuh aneka pergulatan intelektual cerdas dan *trendy*. Ironisnya, pergulatan ini terjadi bukan di negara-negara komunis yang represif, tetapi di negeri liberal kapitalistik, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, Jepang, India, dan mungkin juga seperti di Indonesia yang pernah rasakan.

Generasi muda Indonesia berhak mendapat kesempatan mempelajari dinamika intelektual itu. Apalagi setelah mereka dibebani biaya pendidikan maha berat. Tetapi, hak dan kesempatan belajar itu telah dihambat, bukan oleh orang-orang jahat yang anti-Marxisme.

Larangan itu sering kali datang dari mereka yang tidak paham apa itu Marxisme karena tidak pernah dididik tentangnya ketika bersekolah. Berbeda dari para pendiri bangsa ini yang bersekolah pada zaman kolonial Belanda. Maka, jangan heran sejarah nasional juga sering bengkok atau gelap pada bagian kisah tentang para tokoh gerakan nasionalis ini.

Saya percaya bahwa generasi baru hari ini dengan akses yang begitu terbuka akan mampu menemukan jalan atas beban sejarah di atas. Bahwa hegemoni atau dominasi yang sebelumnya begitu kuat untuk mengawetkan ingatan atas sebuah paham akan terkikis dengan sendirinya.

Pertarungan generasi lama (untuk tidak mengatakan generasi tua) yang penuh dengan kebencian dan insiniasi buruk akan digantikan dengan pertarungan gagasan dengan menjadikan ilmu sebagai tumpuan. Biarlah waktu yang menjawab dengan harapan Indonesia segera terbebas dari beban sejarah yang begitu berat.



Prank, Dark Jokes, dan Pejabat Kita

Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan akibat pandemi Covid-19 tingkat stres masyarakat meningkat. Stres didorong oleh berbagai hal, dari pembatasan interaksi, menyesuaikan aktivitas hingga informasi media yang begitu meneror. Guna menurunkan stres, menonton video atau tayangan humor kerap kali bisa mengurangi rasa stres. Humor atau lelucon dianggap dapat membantu meringankan beban di tengah pandemi Covid-19. Tetapi humor yang bagaimana?

Melalui ulasan ini akan dibahas dua hal genre humor. Prank atau istilahnya "*practical jokes*" dan *dark joke*. Dalam sebuah situs voi.id (12/09/2019) diceritakan tentang prank tertua dalam sejarah pada era Kekaisaran Romawi Elagabalus. Arkeolog Australia Warwick Ball mencatat kisah Elagabalus yang memerintah pada tahun 218 hingga 222 itu dalam karya tulisnya, *Rome in the East: The Transformation of an Empire*.

Warwick bercerita tentang sisi kelam Elagabalus sebagai seorang tiran berdarah dingin yang gemar berpesta pora. Elagabalus dikisahkan pernah mencekik tamunya dalam sebuah makan malam bersama. Namun, dalam sisi lain, Elagabalus juga punya sisi humor. Sisi itu ditunjukkan Elagabalus ketika mengerjai tamu-tamunya.

Dikisahkan, Elagabalus meletakkan bantal-bantal kulit di sebuah meja lesehan. Selama jamuan makan, anak buah Elagabalus membocorkan udara keluar dari bantal. *Practical joke* yang diperagakan Elagabalus dan anak-anak buahnya membuat tamu-tamu terduduk ke lantai yang keras.

Prank kini sudah jadi hal yang tidak baru di Indonesia. Para *youtuber* seringkali membuat konten dengan menggunakan *prank* sebagai cara untuk meningkatkan jumlah penontonnya. Meski terkadang menghilangkan sisi manusiawi seperti yang dilakukan oleh Ferdian waktu lalu. *Prank* hari-hari ini cukup marak mengisi konten *youtube* di Indonesia.

Selain *prank*, humor lain yang kerap kali menjadi perbincangan adalah *dark jokes* (humor hitam). Dalam konteks Indonesia beberapa waktu lalu seorang komika mencuit di *twitter* sebuah joke yang cukup ramai mendapat hujatan. Choky yang kerap dianggap sebagai komika spesialis *dark jokes* mentwit, “*Gong Xi Fa Cai!! Apakah di Tiongkok pas buka angpao dibuka isinya Virus Corona?*” Sontak hal tersebut memancing reaksi netizen. Hal tersebut dianggap tidak lucu dan cenderung miskin empati atas apa yang terjadi.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa hal tersebut *dark joke*. Karena *dark joke* adalah sebuah film, lakon, atau hal lain yang melihat sisi lucu dari berbagai hal yang kelihatannya serius seperti kematian atau penyakit.

Horison seorang penulis naskah komedi menjelaskan bahwa ciri-ciri *dark joke* yang paling menonjol, meski sering sangat getir, adalah sifatnya yang mampu menertawakan diri sendiri. *Dark joke* memang bukan sekadar joke biasa. Ia punya persyaratan ketat. Penyampai *dark joke* harus benar-benar memahami relasi kuasa jangannya sampai jatuh pada situasi mengolok-olok korban. Juga memahami dengan baik topik yang disampaikan. Syarat lain adalah jangan sampai menabrak batas hingga ke jalur fakir empati. Dalam konteks di atas, jelas apa yang dikatakan Choky bukanlah *dark joke*.

Pejabat kita dan lelucon di masa Covid-19

Lalu apa kaitannya *prank* dan *dark joke* dengan para pejabat kita? Beberapa kejadian yang berkaitan dengan Covid-19 beberapa bulan lalu hingga berbagai statemen dan kebijakan yang dibuat pejabat negara kita agaknya menemukan momentumnya ketika kita mengaitkan

dengan kedua pembahasan di atas. Di bawah ini adalah kompilasi guyonan para pejabat kita.

“Alhamdulillah 243 WNI yang pulang dari Wuhan dan diobservasi 14 hari di Natuna dinyatakan bersih dari corona. Dalam kelakarnya, Menko Perekonomian Airlangga mengatakan: Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk. Tapi *omnibus law* tentang perizinan lapangan kerja jalan terus,” tulis di *twitter* Menkopolkam Mahfud MD.

“Katanya virus corona enggak masuk ke Indonesia karena izinya susah,” Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

“[Ini] guyonan sama Pak Presiden ya. Insy Allah [virus] Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal,” Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi:

“Corona [Masuk Batam]? Corona kan sudah pergi.... Corona mobil?” Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan

“Secara medis doa, semua karena doa, saya yakin doalah yang membuat kita semua [bebas virus corona],” Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Sedangkan hal yang terkait dengan *prank* adalah kebijakan tentang larangan mudik dan kenaikan angsuran BPJS. Kenapa larangan mudik saya katakan sebagai *prank*. Kebijakan membuka kembali akses transportasi yang tiba-tiba ketika aturan larangan mudik berlaku cukup membuat masyarakat jengah, ditambah lagi dengan statemen yang tidak sejalan antara Menteri Perhubungan dan Presiden. Tadinya semua orang mulai menahan diri untuk mudik. Dengan dibukanya akses transportasi, seketika itu juga masyarakat goyah dan sangat mungkin berpikir untuk melakukan mudik.

Sedangkan hal yang kedua terkait kenaikan iuran BPJS. Setelah adanya putusan MA, publik sedikit lega. Tetapi

ketika presiden mengeluarkan Perpu tentang kenaikan iuran BPJS, seketika itu juga saya merasa kena *prank*. Meski dalihnya hanya berlaku untuk kelas 1 dan 2. Hal di atas juga ditegaskan dengan sebuah hastag *#JokowiKingOfPrank* yang lagi *trending* di twitter ketika ulasan ini ditulis.

Lelucon yang tidak lucu

Gambaran di atas tentunya membuat sebagian dari kita mengerutkan dahi ketika melihat kondisi hari ini. Apakah ungkapan para pejabat kita di atas *dark joke* dan *prank*?

Lelucon yang dilontarkan para pejabat kita di atas tujuannya mungkin dalam rangka menciptakan kondisi agar tidak panik atau tegang. Tetapi hal tersebut akan terasa menjengkelkan ketika hampir semua yang diucapkan tidak ada yang benar. Tetapi dalam hati kecil berbisik, namanya saja joke jadi kalau tidak benar ya wajar. Tapi tetap saja terasa menjengkelkan. Apalagi hal tersebut terucap dari para pejabat negara.

Guyonan tersebut seperti *dark joke* yang kehilangan joke. Sehingga yang tersisa tinggal dark-nya. Sebuah kondisi hitam pekat seperti hari ini. Gelap tersebut cocok menjadi metafor yang tepat di era pandemi Covid-19. Kita semua tidak tahu dan meraba-raba apa yang menjadi rencana negara ke depan. Semuanya gelap dan gaduh. Tontonan tentang sengkabut wewenang, konflik antar elit menjadi makanan sehari-hari. Alih-alih bukan menghibur masyarakat, yang ada malah membuat masyarakat makin stres. Jadi apa yang diucapkan oleh para pejabat kita termasuk *dark joke*? Kalian semua yang berhak menilai.

Selain *dark joke*, ada juga sebagian dari kita yang merasa dipermainkan dengan aksi *prank* mudik dan kenaikan iuran BPJS. Bagaimana mungkin hal tersebut tidak kita sebut *prank*, sudah sangat jelas kebijakan tersebut cukup membuat kita semua kaget. Semacam pemerintah sedang membuat kejutan untuk masyarakatnya.

Apa hal tersebut menghibur? Jelas tidak. Justru level kejengkelannya sama dengan ketika Ferdian Paleka melakukan *prank* pada para transpuan. Tetapi apa pun itu, kita semua harus memaklumi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menteriya jika semua itu tidak lucu. Karena mereka semua bukanlah komedian, apalagi pelawak. Dan inilah kelucuan yang tidak membuat kita tertawa malah membuat kita semua hampir menangis. Ironis memang, melucu untuk membuat orang menangis.

Subaltern dan Peran Negara



Pandemi Covid-19 menjadi teror bagi kita semua. Banyak orang memutuskan mengurangi aktivitasnya di luar rumah, termasuk saya. Tetapi tidak sedikit pula orang yang memutuskan untuk tetap beraktivitas di luar rumah demi keberlangsungan hidup. Dalam sebuah kesempatan aksi sosial. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang yang terpaksa harus tetap bekerja di jalanan. Dari pembicaraan tersebut tulisan ini hadir. Yang pertama, Pak Gimán namanya.

Sudah 14 tahun merantau ke Surabaya. Pria berusia 65 tahun ini mempunyai keluarga di Nganjuk. Pekerjaan sehari-hari adalah pengayuh becak di sebuah pasar di Surabaya. Setiap hari dia bergumul dengan panas dan debu jalanan. Pandemi kali ini membuat dia harus menghela napas panjang karena pendapatannya berkurang drastis. Pak Gimán adalah salah satu dari sekian orang yang tinggal di Surabaya tetapi secara administrasi bukan warganya. Dia kerap kali tidak bisa mengakses program dan fasilitas dari Pemerintah Kota mengingat dia tidak ber-KTP Surabaya. Hal tersebut dia jalani selama bertahun-tahun karena tidak mungkin dia harus memboyong keluarganya ke Surabaya. 2 bulan sekali dia harus pulang ke rumah kecilnya di Nganjuk untuk menunaikan kewajibannya menafkahi istri dan anak-anaknya.

Beda lagi dengan Yessy, seorang waria yang biasanya mengamen di salah satu jalanan di Surabaya. Pendapatannya dari ngamen berkurang drastis karena mulai banyak warung-warung pinggir jalan yang sepi pengunjung. Selain itu juga dia mulai mengurangi

aktivitasnya di jalanan. Karena rasa takut yang pasti juga dirasakan banyak orang. Yessy siang itu terpaksa keluar karena uang di kantongnya mulai menipis. Dengan gayanya dia bercerita susahnyanya menjadi waria. Dalam kondisi normal saja mereka kerap diusir, apalagi dalam kondisi begini. Kelompok waria adalah kelompok rentan yang kehadirannya kerap kali dipandang sebelah mata baik oleh masyarakat maupun negara. Perilaku diskriminatif dan pelecehan seringkali mereka dapatkan sehari-hari.

Yoyon, adalah seorang difabel tuna daksa yang kesehariannya berjualan koran di salah satu perempatan jalan utama di Surabaya. Wabah membuat pendapatannya berkurang tajam. Orang di jalan mulai enggan berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal karena kekhawatirannya tertular virus. Hal tersebut membuat korannya tidak banyak terjual. Sehari terjual 5 buah dia sudah senang sekali, itupun orang membeli bukan atas dasar kebutuhan tapi lebih banyak atas dasar belas kasihan. Cerita-cerita di atas saya dapatkan dalam agenda beberapa hari yang lalu ketika bergerak memberikan bantuan sembako kepada mereka yang masih beraktivitas di jalan. Tentunya ribuan bahkan jutaan orang yang saat ini merasakan dampak dari pandemi ini. Mulai dibatasi aktivitasnya, gajinya tidak dibayarkan utuh bahkan terpaksa di-PHK dan persoalan lain yang membuat kehidupan mereka dalam aspek ekonomi mengalami masalah. Tetapi ketiga orang yang saya ceritakan di atas cenderung berbeda. Mereka mengalami apa yang saya sebut sebagai kelompok sosial sub-ordinat, dalam tulisan ini saya sebut sebagai sub-altern.

Subaltern dan Peran Negara

Istilah sub-altern dipopulerkan oleh pemikir Italia, Antonio Gramsci. Menurutnya, istilah ini merujuk pada kelompok sosial subordinat, yakni kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa.(Reed, 2012). Dalam referensi yang lain Gayatri Spivak dalam esainya, *Can Subaltern Speak*, menjelaskan bahwa sub memiliki tiga karakteristik:

Pertama adanya penekanan dan di dalamnya bekerja suatu mekanisme pendiskriminasian. Kedua, ketidakmampuan untuk menyuarakan aspirasi atas ketertindasannya. Ketiga, kaum subaltern tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kondisinya, sehingga diperlukan kaum intelektual yang sering dianggap sebagai “wakil” kelompok subaltern (Morris, 2010).

Istilah ini saya pinjam untuk menggambarkan kondisi-kondisi ketiga orang di atas yang saya temui. Pak Gimman yang aktivitasnya lebih banyak di Surabaya tetapi karena urusan administrasi dia lebih sering tidak mendapatkan akses dan fasilitas atas persoalan yang dia hadapi. Wabah hari ini membuat dia berada pada posisi sangat rentan mengingat untuk hidup saja susah, apalagi berpikir terhindar dari virus. Nasib Yessy pun tidak kalah memilukan, dalam kehidupan normal saja dia sering mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat atau bahkan dari keluarga. Apalagi dalam kondisi begini. Yoyon pun juga demikian. Nasibnya tidak kalah buruk, pandemi menjadikan dia harus berjuang agar tetap bisa hidup.

Nasib ketiga orang yang saya ceritakan bisa jadi dialami oleh banyak orang di Indonesia. Mereka berada dalam posisi rentan. Mengakses apa yang disediakan negara saja rasanya susah. Selain disebabkan oleh faktor akses juga terkait tingkat pemahaman atau pendidikan. Mereka tidak paham kewajiban negara terhadap warganya. Alih-alih mau menuntut ke pemerintah, yang dipikirkan mereka adalah gimana mereka dapat hidup di tengah kondisi yang semakin memburuk. Apa masih mungkin bagi mereka berharap pada para intelektual jika sementara para intelektual lebih banyak yang menjadi juru bicara negara. Andai pun dia bukan juru bicara negara, pasti mereka akan berpikir beratus-ratus kali untuk mengkritik negara. Mengingat makin kesini negara kita makin kejam pada pengkritik-pengkritiknya.

Gambaran di atas juga menegaskan selalu ada orang-orang yang dibungkam di berbagai belahan dunia, mereka absolut tidak punya suara dan tidak dapat berbicara. Mereka rentan dan tidak mampu menyuarakan apa yang mereka alami. Kondisi struktur ekonomi-politik yang membuat mereka begitu. Di tengah kondisi begini, rasanya penting sekali menjadi mayoritas yang tidak bungkam. Saatnya menggerakkan energi kita untuk memberi perhatian kepada mereka agar tidak selalu menjadi *subaltern* dan berada pada posisi paling dasar kerentanan dalam kondisi pandemi begini.

Dilema PSBB dan mudik

Pandemi Covid-19 yang semakin hari tidak membuat kondisi sosial-ekonomi semakin baik membuat pemerintah mengeluarkan aturan. Aturan Pembatasan Wilayah Berskala Besar (PSBB) bagi beberapa wilayah dan larangan mudik sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua hal tersebut akan menambah beban baru bagi Gimán, Yessy dan Yoyon. Ketika PSBB diterapkan apakah Gimán harus tetap bertahan di Surabaya. *Toh* umpama bertahan apakah dia mendapat subsidi dari pemerintah daerah setempat. Ketika dia harus mudik, ada larangan dari pemerintah yang infonya bakal dikenakan sanksi. Atau mungkin, Gimán ini masuk kategori harus pulang kampung seperti apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Apapun itu, bagi Gimán pulang kampung atau mudik tanpa membawa uang adalah sesuatu hal yang benar-benar buruk, sementara ketika bertahan di Surabaya apa mungkin dia berharap atas keberlangsungan hidupnya pada pemerintah.

Beda lagi dengan Yessy dan Yoyon, keduanya kerap dianggap tidak sempurna di masyarakat. Orang-orang yang dalam kehidupan normal sudah harus berjuang keras dan pada saat wabah pun harus meningkatkan perjuangannya berlipat-lipat agar bisa hidup. Bagi mereka mungkin tidak mudik bukan persoalan, *toh* mereka juga orang asli Surabaya. Tetapi ketika ada PSBB diterapkan, apa kondisi mereka tidak semakin terjepit? Waktu yang akan menjawab hal tersebut. *Sub-altern* akan selalu terjadi

ketika perhatian negara hanya terfokus pada yang kaya (pemilik modal) dan menjadikan yang miskin makin termiskinkan oleh kebijakan-kebijakan. Yang menindas semakin leluasa menindas, yang tertindas semakin tak bisa bersuara dalam penindasan yang semakin merajalela.

Sejujurnya saya agak pesimis berharap pada negara terkait kondisi dari tiga orang di atas yang sangat mungkin ada banyak orang yang bernasib seperti mereka. Tetapi akan merasa bersalah dan berdosa sekali jika hal tersebut tidak saya tulis dan ulas. Hanya itu saja motivasi saya menulis ini. Kenapa begitu, sebulan lebih ini kita dipertontonkan kejadian bagaimana negara gagap



Kutukan Sisyphus dan New Normal

Albert Camus adalah seorang sastrawan, seniman, wartawan sekaligus filsuf yang terkenal. Beberapa novel telah dia hasilkan. Salah satu novel yang sempat menjadi perbincangan dan dianggap relevan dengan kondisi hari ini adalah novel yang berjudul *La peste* (Sampar), terbit pada tahun 1947.

Banyak ulasan terkait novel tersebut yang berusaha mengaitkan kejadian pandemi covid-19. Wabah sampar yang dianggap memiliki kesamaan dengan covid-19. Beberapa penulis berusaha menyejajarkan dengan situasi penyebaran pandemi hari ini.

Akibat dari hal tersebut, dilansir dalam *theguardian.com*, di Inggris, penjualan buku *La Peste* melonjak tajam sampai di angka 2.156 pada awal Maret 2020. Selain itu, *The Guardian* juga mencatat 1504 buku terjual per minggu dengan pembaca generasi muda. Membaca ulasan yang mengaitkan antara novel dan kejadian hari ini memang menarik. Puluhan ulasan saya dapati dan tentunya mempunyai beragam interpretasi.

Saya tentunya tidak berusaha mengulas lagi hal tersebut. Karena sudah banyak yang berusaha mengulas novel dan mengaitkannya dengan kejadian hari ini. Justru dalam cerita Camus yang lain saya menemukan satu hal yang layak untuk kita jadikan refleksi kondisi hari ini. Sebuah cerita legenda Sisyphus yang datang dari mitologi Yunani Kuno. Seorang raja Sisyphus dari kerajaan Efira yang licik dan tamak yang menerima kutukan yang luar biasa. Hal tersebut disebabkan oleh berkali-kali ia

membangkang terhadap dewa, berbuat hal-hal mengerikan kepada rakyatnya, serta yang paling besar dosanya adalah membocorkan rahasia Dewa.

Sisyphus dilempar ke dalam neraka. Dalam kutukan tersebut dia terus-menerus mendorong sebuah bongkahan batu besar ke atas puncak bukit. Setelah sempat merasakan kelegaan sedikit saat di puncak, batu besar itu menggelinding kembali ke kaki bukit. Karena dikutuk oleh obsesinya untuk mendorong batu, ia lakukan pekerjaan tersebut terus-menerus berkali-kali tanpa boleh berhenti. Sisyphus lebih menganggap hukumannya adalah kesenangan. Sesuatu hal yang aneh, tetapi itulah Camus dengan segala ambigusitasnya.

New Normal dan Kutukan

Pandemi covid-19 di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang membahagiakan kala itu. Aneka keruwetan informasi, pejabat yang cenderung meremehkan, tontonan konflik antar elit politik dan kebijakan yang tidak konsisten kerap menjadi tontonan beberapa minggu lalu. Kita hari ini sedang memasuki era transisi menuju *new normal*. Dimana sebuah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diakhiri oleh banyak daerah.

Kondisi di atas yang membuat saya mengaitkan dengan apa yang terjadi pada Sisyphus. Apa yang terjadi di Indonesia anggaplah sebuah kutukan atas perilaku kita selama ini. Kutukan kepada rakyat sekaligus kepada pejabatnya yang tidak siap atas bencana yang terjadi. Bagi sebagian negara hal tersebut bukan kutukan, mengingat kesiapan mereka. Sedangkan bagi Indonesia, hal tersebut relevan disebut kutukan mengingat sejak awal pejabatnya cenderung meremehkan dan implikasinya pada kesiapan menyambut bencana besar ini.

Berbulan-bulan saya menjalani kerja dari rumah, membatasi aktivitas dan banyak hal yang lainnya. Kita akan memasuki kondisi yang banyak orang sebut sebagai *new normal*. Sebuah kondisi dengan pola interaksi baru

dimana masyarakat diminta agar bisa berdamai dengan virus. Berbagai aturan sedang disiapkan, dari aturan kantor hingga fasilitas publik.

Pertanyaannya, apa hal tersebut relevan di tengah sebaran virus yang masih begitu besar? Apakah mungkin aturan-aturan dalam *new normal* yang bakal kita lakukan setiap hari bakal mampu membendung laju virus? Apa hal tersebut tidak akan berakhir pada korban jiwa yang besar sehingga aturan-aturan tersebut berujung pada kesia-siaan?

New normal sangat mungkin disebut sebagai kutukan jika pertanyaan-pertanyaan tersebut terbukti dengan jawaban "kesia-siaan". Masyarakat diminta menjalankan aktivitas-aktivitas baru setiap hari tetapi negara tidak menjamin dengan pertimbangan yang ilmiah bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat.

Alegori kutukan Sisyphus tersebut menggambarkan pola kehidupan *new normal* yang akan kita jalani. Dan pastinya akan kita ulangi setiap hari. Akankah hal tersebut bernasib sama seperti Sisyphus? Usaha untuk sampai ke puncak bukit sebagai metaphor dari usaha kita menerapkan aturan *new normal* yang hasil akhirnya harus kembali ke dasar bukit, yakni sebuah kesia-siaan.

Haruskah tetap bahagia seperti Sisyphus?

Tuduhan tentang kesia-siaan tersebut bukan tanpa dasar, mengingat beberapa bulan ini kita dipertontonkan cara penanganan sebaran covid-19 yang serba gamang. Katanya tidak berbahaya faktanya cukup banyak korban yang meninggal, katanya dilarang mudik tetapi transportasi tetap dibuka dan hal-hal gamang lainnya.

Pertanyaannya apakah *new normal* yang sedang disiapkan ini bukan bagian dari kesia-siaan? Sebuah kesia-siaan yang harus dilakukan rakyat yang kita semua tidak tahu mau diarahkan kemana di tengah krisis yang melanda.

Akankah kita bisa tetap bahagia menjalani ini semua? Sebuah kondisi yang kita semua tidak tahu bagaimana akhirnya. Kita bukan Sisyphus yang digambarkan Camus. Tetapi dalam beberapa hal apa yang dilakukannya menjadi relevan. Berusaha untuk tetap berbahagia atas kondisi yang ada.

Kita memang bukan Sisyphus yang asli, namun kita adalah personifikasi kondisi hari ini. Dimana kita akan menjalani kutukan new normal dengan aturan-aturan yang baru setiap harinya. Kita berusaha menjalankan hal tersebut siang dan malam tanpa lelah, tanpa tahu apakah hal tersebut ada hasilnya.

Dalam kondisi tersebut apakah kita masih bisa bahagia? Camus menutup kisah Sisyphus dengan senyuman yang barangkali sedikit angkuh. Orang harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kita tercengang memandang senyum seperti itu: bahagia untuk apa?

Di tengah masyarakat yang berjibaku dengan tekanan teror menyeramkan dari covid-19 agaknya kita perlu menengok Sisyphus yang sedang mendorong batu karangnya. Dan kita percaya Camus bahwa "dia bahagia". Pada akhirnya, Sisyphus mengajarkan kita, seburuk apapun situasinya, kita tidak akan pernah patah dan menyerah. Kita semua harus membayangkan Sisyphus, bahagia.

Akankah nasib kita seperti Sisyphus? Kita semua tidak tahu. Selamat datang new normal. Semoga kondisi baru tersebut bukan kutukan yang diceritakan yang berakhir dengan "kesia-siaan".

2. ANAK DAN GENDER DALAM PUSARAN KUASA





menghadapi kondisi ini. Dari persoalan inkonsistensi ucapan, ketidakkompakan dan hal-hal konyol lainnya. Bagaimana mungkin suara *sub-altern* terdengar, wong kita ??

Berharap pada Sastra Anak

Program belajar dari rumah (*learning from home*) telah diterapkan selama pandemi di tahun 2020 - 2021. Hampir semua aktivitas pembelajaran bergeser dari ruang kelas ke ruang daring. Hal tersebut membuat sebagian orang tua jadi sangat permisif terhadap *gadget*. Sebagiannya lagi mulai khawatir. Sikap permisif terhadap gadget atau instrument pembelajaran digital lain dapat menyebabkan anak-anak kita kecanduan, kemudian bisa mengantarkan anak kita menjadi semakin egois atau *selfish*. Mereka lupa dengan dunia di luar mereka dan menjadi a-sosial.

Kondisi di atas membutuhkan peran orang tua. Orang tua perlu menjadi teman sekaligus guru untuk mengontrol aktivitas tersebut. Selain itu, kondisi wabah ini menjadi momentum bagi orang tua untuk menekankan pentingnya kerja tim dan nilai saling peduli kepada anak.

Sejak dini anak dikenalkan dengan nilai-nilai humanisme. Sebuah nilai tentang kepedulian terhadap sesama manusia tanpa membedakan agama, ras ataupun identitas lainnya.

Salah satu alat untuk mampu membentuk karakter anak yang humanis sejak dini adalah mengenalkannya dengan sastra. Karya sastra merupakan salah satu alat untuk membangun karakter.

Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya penelitian yang mengungkapkan bahwa sebuah cerita mampu menjadi *medium* untuk membangun imajinasi anak yang produktif dan humanis. Waktu bersama dengan anak yang relatif banyak ketika pandemi harus dimanfaatkan orang tua untuk mengenalkan dan menggunakan narasi-narasi dalam sastra sebagai bagian dari pembelajaran dan interaksi dalam rumah.

Sastra anak

Dalam konteks Indonesia, sastra anak belum terlalu mendapatkan perhatian yang serius. Padahal sastra anak memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk watak dan cara berpikir seseorang ketika dewasa. Dengan sastra pula, anak mengasah imajinasi, rasa sosial, rasa etis, kemampuan fantasional, ide-ide, dan visi untuk menyehatkan daya nalarnya.

Bandura dalam Udasmoro (2012) menjelaskan bahwa anak adalah peniru ulung atas apa yang dilihatnya. Melalui pengalaman kesehariannya, mereka mengamati dan meniru hal-hal yang dia amati. Menciptakan bacaan dan narasi yang humanis berupa teks sastra adalah upaya strategis di tengah wabah yang cenderung membuat anak dan orang tua terjebak pada kebosanan.

Friedrich Schiller (1993) menjelaskan bahwa sastra bisa menjadi semacam permainan penyeimbang segenap kemampuan mental manusia, yang di dalamnya terdapat kelebihan energi yang harus disalurkan.

Singkatnya sastra mengalihkan kelebihan energi menjadi kreatifitas, perasaan, kepekaan, dan sensitivitas kemanusiaannya. Maka bisa jadi manusia terhindar dari tindakan-tindakan destruktif, sempit, kerdit, picik dan mudah marah.

Dalam konteks sejarah, KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah memberi teladan bagaimana sastra di manfaatkan. Penguatannya melakukan perubahan dalam bidang pendidikan dan sosial kala memanfaatkan sastra

dan seni sebagai medium transformasi nilai.

Dalam novel *Sang Pencerah*, Basral (2010) menceritakan bahwa *Tembang Dolanan Lir-Illir* sering diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan permainan biola kepada para muridnya untuk memberikan semangat belajar dan menuntut ilmu.

Dolanan termasuk tembang berbahasa Jawa yang biasanya digunakan anak-anak sebagai sarana bersenang-senang mengisi waktu luang dan sarana komunikasi yang mengandung pesan mendidik dan menggerakkan. Danandjaja (1997) mengategorikan *dolanan* sebagai sastra lisan Jawa. Sastra yang lebih banyak diperuntukkan untuk anak-anak. Gambaran diatas menegaskan bahwa sastra anak kala ini menjadi bagian penting dalam membangun imajinasi anak.

KH Ahmad Dahlan di era itu sadar betul akan pemanfaatan medium sastra sebagai bagian dari dakwah. Salah satu tembang dolanan yang populer adalah lir-illir. Tembang ini liriknya bernilai religius dan menggambarkan kearifan wali songo yang mengajarkan Islam secara menggembirakan dan tidak terasa menggurui.

Cerita anak yang patriarkal dan tidak produktif

Kontribusi sastra anak dalam perkembangan emosional, intelektual, imajinasi, rasa sosial, rasa etis, serta religiusitas dari seseorang atau sebuah komunitas menjadi bagian penting dari pembentukan karakter. Sastra anak adalah salah satu sumber terpenting untuk kesadaran itu.

Akan tetapi apakah semua karya sastra anak mengandung nilai-nilai positif untuk anak? Tentu saja tidak. Orang tua perlu secara cerdas membaca narasi-narasi sastra yang dikonsumsi oleh anak.

Setiyawan (2020) dalam penelitiannya menjelaskan tentang narasi-narasi sastra anak dalam cerita rakyat, fabel, dongeng dan cerita islami masih banyak yang cenderung patriarkal. Menempatkan laki-laki sebagai pusat utama

dalam cerita meskipun pemeran utamanya perempuan.

Salah satu contohnya adalah cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Dalam cerita tersebut digambarkan konflik antara dua perempuan. Salah satu yang memicu konflik adalah perebutan sosok laki-laki, yakni Pangeran.

Dalam cerita itu digambarkan begitu jelas bagaimana perempuan berada pada satu konflik dan menempatkan laki-laki sebagai pusat dari cerita yang diperebutkan. Hal serupa juga terjadi pada narasi cerita yang lain. Beberapa hal tersebut tergambar dalam beberapa poin.

Pertama, dominansi wacana kecantikan dalam kisah-kisah seperti Bawang Merah, Cinderella, *Cinderellas*, *Beauty and The Beast*, dan Sangkuriang. Tidak ada satupun dalam kisah itu yang menanggalkan wacana kecantikan perempuan sebagai bagian dari narasinya.

Kedua, inferioritas perempuan tergambar dari domestifikasi tokoh-tokoh perempuan dalam kisah-kisah itu. Tokoh perempuan tetap menjadi bagian dari sosok yang bekerja di dalam rumah, rajin melakukan pekerjaan dalam rumah, menunggu di rumah, tidak melakukan aktivitas perburuan hewan dalam hutan, tidak melakukan sabung ayam, bahkan perannya sebagai Ibu pun harus diputuskan oleh tokoh laki-laki seperti yang dikisahkan dalam Abu Nawas.

Ketiga, inferioritas perempuan terlihat dari minornya penceritaan tokoh perempuan dalam kumpulan kisah-kisah kancil, Abu Nawas, dan Nasrudin. Ketiga hal itu adalah wujud relasi patriarki yang jika hanya dibaca sekilas tanpa ditelaah dan dianalisis mendalam tidak akan muncul kepermukaan.

Selain dalam persoalan patriarkal, beberapa cerita anak berusaha membangun imajinasi yang tidak produktif.

Hal tersebut Nampak dalam kisah Malin Kundang. Citraningtyas (2004) dalam penelitiannya menegaskan terkait dikutuknya Malin menjadi batu justru menimbulkan sebuah masalah baru. Malin dikutuk menjadi batu, sebuah

benda mati yang tidak produktif: keras, dingin, mati.

Kutukan menjadi benda mati yang tidak produktif ini mematikan dan membelenggu pihak yang dikutuk dan menjadi tidak bisa produktif kembali. Selain itu juga, memberi pesan bahwa orang yang bersalah/durhaka tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Pada versi cerita *Malin Kundang* yang lebih baru, biasanya sudah diceritakan bahwa Malin telah memohon maaf pada ibunya, namun sudah terlambat. Hal ini justru lebih parah karena mengajarkan untuk tidak memberi maaf kepada orang yang bersalah. Meskipun telah meminta maaf, Malin tetap dikutuk.

Menghadapi narasi-narasi sastra anak yang cenderung patriarkal dan tidak produktif. Orang tua atau guru perlu melakukan rekonstruksi.

Rekonstruksi cerita bukan sekadar *re-telling* (menceritakan kembali). Rekonstruksi mengubah skema dan menggantinya dengan yang lebih baik. Penggantian ini selayaknya dilandasi dengan mengacu pada nilai-nilai humanis, tentunya setting dan pembangunan karakternya

disesuaikan dengan zaman.

Jika Bawang Merah- Bawang Putih Akur dan Malin Kundang Tidak Dikutuk



Masa pandemi kebanyakan dari masyarakat telah menjalani *Work from Home* (WFH). Sebuah kondisi yang terpaksa harus dinikmati dan dijalani. Hampir seluruh aktivitas kantor dikerjakan di rumah. Hal yang sama juga dilakukan oleh anak kami, seluruh aktivitas belajarnya dilakukan di rumah dipandu oleh orang tuanya. Bisa dibayangkan aktivitas rumah saat pandemi, padat dan mudah terjebak pada aktivitas yang monoton serta membosankan. Sebagai orang tua, butuh cara yang kreatif untuk menyiasati agar kondisi rumah tetap menyenangkan dan tidak mudah terjebak pada kejenuhan.

Waktu yang relatif lama bersama anak memberi kita kesempatan untuk mengetahui banyak hal tentang anak. Termasuk hal-hal detail yang selama ini belum kita sadari. Dalam satu kesempatan kami menggunakan waktu untuk membacakan buku cerita sastra anak. Kami percaya, sastra anak mampu menanamkan pentingnya nilai-nilai karakter dan nilai saling kemanusiaan antar sesama. Persoalannya kemudian, apakah semua karya sastra anak mempunyai nilai-nilai etis seperti di atas?.

Belum tentu juga, karena cerita anak memang bukanlah cerita netral yang tidak memiliki tujuan atau agenda tertentu bagi pembacanya. Cara pandang anak atas sesuatu bisa jadi sangat dipengaruhi atas apa yang dibaca, didengar dan dilihat. Melihat berbagai teks

sastra anak secara kritis menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Berbulan-bulan bergelut dengan bacaan anak membuat saya mempunyai catatan atas beberapa cerita anak populer.

Membaca sastra anak

Mendefinisikan sastra anak tidak dapat dilakukan secara tunggal. Pakar sastra mendefinisikannya menurut perspektif yang berbeda. Akan tetapi, apabila semua definisi dirangkum, dapat dikatakan bahwa sastra anak adalah 'sastra yang ditulis dan diciptakan secara khusus untuk dibaca oleh anak' (Oittinen dalam Udasmoro, 2012).

Pertanyaannya kemudian, apa pentingnya membaca sastra anak bagi anak-anak kita? Melalui sastra anak karakter anak sangat mungkin dipengaruhi. Bandura dalam Udasmoro (2012:36) mengungkapkan bahwa anak adalah peniru ulung. Anak melalui pengalaman kesehariannya lewat proses mengamati dan meniru hal-hal yang dia amati. Oleh sebab itu membaca sastra anak secara kritis menjadi sangat penting.

Dalam konteks Indonesia, sastra anak belum terlalu mendapatkan perhatian yang serius. Padahal sastra anak memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk watak dan cara berpikir seseorang ketika dewasa. Dengan sastra pula, anak mengasah imajinasi, rasa sosial, rasa etis, kemampuan fantasional, ide-ide, dan visi untuk menyehatkan daya nalarnya.

Bawang Merah dan Bawang Putih yang misoginis

Dalam kisah "Bawang Merah dan Bawang Putih" digambarkan pertikaian antara keduanya. Sebuah pertikaian yang merebutkan seorang Pangeran, yang tentunya laki-laki. Secara tidak sadar hal tersebut menegaskan bahwa perempuan adalah manusia labil dan mudah berkonflik. Ini merupakan wujud dari kekerasan simbolik berbentuk eufimisasi atau penghalusan.

Hal tersebut secara tak sadar sedang mengkonstruksi

watak anak perempuan bahwa berkonflik dengan sesama perempuan itu hal yang wajar. Sementara dalam konteks lainnya, Bawang Putih yang digambarkan pasrah pada keadaan, meskipun sejatinya teraniaya. Dia harus terus diam meski dalam posisi dimarginalkan dalam menghadapi penyiksaan sehingga mereka akan terus disebut sebagai perempuan yang baik, bahkan bisa jadi mereka akan mendapat predikat sebagai hero.

Hal ini tentu sejalan dengan pendapat Bourdieu (1991:163) bahwa masyarakat pada era sekarang ini tidak menyadari bahwa ada kekuasaan yang membelenggu mereka, meski kekuasaan tersebut terlihat jelas di depan mata. Wacana patriarkal yang disusun sedemikian rupa menjadi kisah-kisah apik yang nyaman untuk dinikmati. Padahal, sebenarnya kisah-kisah itu adalah bagian dari melanggengkan wacana patriarkal.

Gambaran di atas yang saya sebut sebagai misoginis. Sebuah bentuk kekerasan dan serangan terhadap perempuan yang dianggap normal, institusional, dan terorganisir. Bawang Merah dan Bawang Putih adalah cerita yang sudah bertahun-tahun mengisi ruang sastra anak kita. Sudah saatnya membongkar cerita-cerita sejenis dengan nalar yang kritis dan merekonstruksi ceritanya agar lebih lebih ramah terhadap anak.

Malin Kundang yang tidak dimaafkan

Citraningtyas (2004) Malin dikutuk menjadi batu, sebuah benda mati yang tidak produktif: keras, dingin, mati. Kutukan menjadi benda mati yang tidak produktif ini mematikan dan membelenggu pihak yang dikutuk dan menjadi tidak bisa produktif kembali.

Selain itu juga, memberi pesan bahwa orang yang bersalah, durhaka tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada versi cerita *Malin Kundang* yang lebih baru, biasanya sudah diceritakan bahwa Malin telah memohon maaf pada ibunya, namun sudah terlambat.

Hal ini justru lebih parah karena mengajarkan

untuk tidak memberi maaf kepada orang yang bersalah. Meskipun telah meminta maaf, Malin tetap dikutuk. Gambaran cerita yang tidak produktif di atas tentunya punya dampak buruk ketika narasinya diterima begitu saja oleh anak.

Uraian di atas bukan serta merta menganggap bahwa cerita dalam sastra anak merupakan varian tunggal atas sikap anak yang tidak ramah gender atau sikap antagonis lain ketika mereka tumbuh dewasa. Lingkungan keluarga yang sehat dan masyarakat yang mendukung juga menjadi salah satu varian penting dalam membangun karakter. Semoga pandemi ini menjadi momentum yang bagus untuk merekonstruksi bacaan sastra anak. Menghadapi narasi-narasi sastra anak yang cenderung patriarkal dan tidak produktif. Orang tua atau guru perlu melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi cerita bukan sekadar *re-telling* (menceritakan kembali). Rekonstruksi mengubah skema dan menggantinya dengan yang lebih baik.

Penggantian ini selayaknya dilandasi dengan mengacu pada nilai-nilai humanis, tentunya *setting* dan pembangunan karakternya disesuaikan dengan zaman. Rekonstruksi bukan berarti alur ceritanya tidak ada tokoh antagonis, semua dibuat bahagia dan tidak ada konflik. Seperti Bawang Merah dan Bawang Putih dibuat akur atau Malin Kundang tidak dibuat durhaka. Rekonstruksi adalah memahami betul bahwa konflik yang terjadi dalam cerita anak harus dipastikan mampu merangsang daya pikir anak untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab, adil sejak dalam pikiran dan mempunyai rasa empati. Jadi pilihan judul dalam esai ini bukan semata-mata menawarkan agar Bawang Merah dan Bawang Putih tidak berkonflik atau Malin Kundang tidak dikutuk ibunya. Lebih dari itu semua dan yang paling penting adalah menjadi pembaca yang kritis untuk anak dan adik-adik kita.

Jilbab di Sekolah



Hampir setiap tahun, perdebatan tentang penggunaan jilbab di sekolah kembali mengemuka. Tahun 2020 sebuah surat terbuka dari seorang aktivis perempuan dikirim kepada Mendikbud, Nadiem Makarim. Ia meminta agar Nadiem bertindak atas pemaksaan tidak tertulis dan secara halus terselubung dalam penggunaan jilbab di beberapa sekolah di Indonesia.

Perdebatan tentang jilbab di sekolah negeri bukan sesuatu yang baru. Beberapa tahun lalu, perdebatan serupa pun mengemuka di Yogyakarta, Banyuwangi, Jakarta, dan beberapa wilayah di Indonesia. Dari semua hasil perdebatan tersebut selalu berujung pada ungkapan permohonan maaf pihak sekolah negeri atau pencabutan aturan (surat edaran) terkait keharusan penggunaan jilbab.

Satu hal yang menarik untuk diulas adalah selalu ada usaha untuk mewajibkan penggunaan jilbab di sebuah institusi pendidikan dan lagi-lagi menuai perdebatan. Dinamika penggunaan jilbab dalam konteks Indonesia mempunyai perjalanan yang tidak sederhana. Kuasa negara, perlawanan masyarakat, dan industrialisasi mengambil peran penting atas dinamika tersebut.

Sekolah negeri sebagai arena bertemunya etnis, ras, dan agama (terutama di sekolah negeri) kerap kali menjadi arena pertarungan identitas. Perdebatan kerap hadir dipicu oleh usaha memaksakan penggunaan jilbab untuk siswi yang merasa tidak menjadi bagian dari identitas tersebut.

Jilbab dalam buku sekolah

Penggunaan jilbab di sekolah mengalami pasang surut dalam sejarah Indonesia. Jilbab yang dulu pernah dilarang, kini bisa dibilang menjadi bagian dalam identitas sekolah. Salah satu penanda yang hadir secara jelas dan hal tersebut dilegitimasi negara adalah kehadiran ikon anak perempuan berjilbab dalam buku teks sekolah. Dalam buku Sekolah Dasar (SD) terbitan Kemendikbud kurikulum 2013, ada sosok Siti yang menggunakan jilbab.

Hal tersebut tentunya tidak kita jumpai dalam buku sekolah masa Orde Baru (Orba). Buku teks SD yang dulu hanya didominasi oleh nama Budi dan Ani, kini sudah banyak mengakomodasi nama lain. Atas nama reformasi, keberagaman mulai dihadirkan. Hal tersebut diungkapkan Muhammad Nuh (Mendiknas 2009-2014) kala itu. Dia mencontohkan bahwa nama-nama dalam buku kurikulum 2013 mulai beragam, Siti mewakili dari Jawa, Beni (Sumatra, Batak), Lina (Manado), Udin (Sunda, Jawa), Dayu (Bali), dan Edo (Papua). Wajahnya berbeda-beda. Artinya, dari awal ingin menghadirkan representasi Indonesia yang beragam.

Secara sekilas, argumentasi di atas cukup baik. Tetapi jika kita lihat secara kritis, kemunculan Siti yang berjilbab tersebut menegaskan bahwa identitas jilbab menjadi pengecualian. Mengingat ketidakhadiran identitas fisik agama lain yang melekat pada ikon tokoh lain dalam buku. Terlihat jelas negara melalui buku memberikan perhatian yang lebih kepada Siti yang menjadi representasi Islam untuk dimunculkan.

Atribut kultural yang menempel pada ikon dalam buku bertujuan menjadi penanda atas identitas. Jadi bisa dikatakan negara melalui buku teks sekolah melegitimasi kehadiran jilbab di sekolah dan memberikan perhatian yang lebih atas identitas tersebut.

Hal tersebut tentunya didorong oleh sebuah dinamika yang panjang dan berbagai aspek lain yang strategis. Kuasa negara yang berkaitan dengan politik, kuasa budaya yang didorong oleh gerakan rakyat, dan kuasa modal yang didorong oleh industri *fashion*.

Ekspresi kultural dan industri *Fashion*

Ariel Heryanto dalam buku *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar di Indonesia* (2015) mengulas secara menarik tentang dinamika penggunaan jilbab di Indonesia. Dalam bukunya diulas tentang adanya pelarangan penggunaan jilbab oleh negara pada tahun 1980-an. Karena larangan tersebut, penggunaan jilbab bagi beberapa perempuan kala itu mempunyai tujuan untuk penegasan sikap politik dan bahkan mengutip Brenner (1999) dianggap sebagai pembangkangan politik secara terbuka. Hal tersebut dikuatkan sebuah fakta sejarah di mana Cak Nun dengan drama kolosalnya yang bertajuk "Lautan Jilbab".

Pagelaran tersebut ditujukan sebagai kritik sosial kepada pemerintah dan khalayak umum yang menganggap perempuan berjilbab secara sebelah mata. Sebuah pementasan yang kala itu diperhitungkan dan mempunyai dampak yang luas.

Kondisi di atas akhirnya harus bergeser. Memasuki tahun ke 1990-an, berjilbab mulai menjadi *tren mode*. Hal tersebut seiring berubahnya sikap negara pada organisasi-organisasi Islam.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana fenomena penggunaan jilbab era reformasi begitu masif dan terkadang bertransformasi menjadi sebuah aturan di sekolah?

Era reformasi adalah kondisi di mana kebebasan dirayakan. Berbagai ekspresi kultural lintas agama dan etnis berusaha mendapatkan pengakuan negara. Negara yang berusaha keluar dari cengkeraman Orde Baru berusaha mengakomodasi banyak identitas.

Salah satunya dalam lingkungan sekolah. Negara yang dulu begitu kuat, kini tidak bisa lagi bersikap semena-mena.

Penggunaan jilbab yang kerap kali dianjurkan bahkan diwajibkan pihak sekolah merupakan konsekuensi dari

era reformasi. Inisiatif dari sekolah tersebut biasanya didorong oleh pemangku kebijakan sekolah, baik kepala sekolah atau guru. Ekspresi keagamaan para pemangku kebijakan tersebut diekspresikan dalam bentuk aturan.

Lantas bagaimana sikap negara?

Pemimpin daerah kerap kali tak berdaya menghadapi hal tersebut. Pertimbangan politik menjadi faktor terbesar. Memperoleh simpati publik atas warga mayoritas adalah strategi populis yang kerap kali dilakukan. Sehingga tidak heran banyak daerah bersikap ambigu atas kebijakan tersebut.

Selain itu juga, dalam konteks industrialisasi atau fashion, jilbab cukup mendapat perhatian. Menjamurnya berbagai *brand* busana muslim di Indonesia adalah tanda paling jelas. Kapitalisme terbukti mampu berjalan seiring dengan identitas agama. Menggunakan jilbab kerap kali dianggap sebagai bagian dari kesalehan dan hal tersebut diserukan oleh industri fashion melalui iklan-iklan yang masif.

Hal tersebut yang terkadang disadari atau tidak mendorong sekolah mengharuskan penggunaan jilbab sebagai strategi untuk pemasaran. Di tengah mayoritas Islam, citra sekolah yang islami dan menjunjung tinggi etika agama menjadi dambaan banyak orang.

Dalam konteks itu, identitas jilbab menemukan relevansinya. Dengan menggunakan jilbab, anak-anak perempuan dianggap bisa terhindar dari perilaku yang amoral. Padahal kualitas iman seseorang ditentukan oleh apa yang dilakukan atau diperbuat, bukan hanya apa yang dipakai seperti jilbab.

Gambaran di atas paling tidak menegaskan bahwa proses Islamisasi era reformasi yang salah satunya melalui penggunaan jilbab akan terus bergulir. Hal tersebut didorong oleh ekspresi keagamaan yang bebas, kebijakan politik yang berpijak pada simpati mayoritas, dan sangat mungkin disambut oleh kapitalisme melalui industri fashion.

Krim Anti-Aging dan Imaji Awet Muda



Dalam obrolan dengan istri menjelang berbuka, dia bercerita tentang kebiasaan salah satu kelompok ibu-ibu sosialita di suatu kompleks perumahan. Sebuah kelompok ibu-ibu kelas menengah atas yang rata-rata usianya 40-an. Mereka mengeluh karena di masa pandemi begini aktivitas rutin perawatan mereka ke klinik kecantikan agak terganggu. Mereka jadi was-was berada di luar rumah dalam waktu yang lama.

Setiap bulan mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk sebuah aktivitas di klinik kecantikan tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari menghindari tanda-tanda penuaan. Berbagai perawatan dilakukan, dari mengkonsumsi krim anti-aging, kapsul, minum vitamin sampai mempraktikkan gerakan-gerakan layaknya senam atau yoga. Sebuah usaha yang cukup keras untuk mempertahankan agar tetap nampak muda di usia yang tidak muda lagi.

Dalam kesempatan yang lain, saya mendengar sendiri percakapan istri dengan salah satu sales minuman fermentasi yang sebulan sekali selalu datang ke rumah untuk menawarkan produknya. Saking seringnya istri menjadi akrab dan terkadang jadi tidak enak kalau tidak membeli minuman yang diujakan. Usianya kepala 4 dan berasal dari kelas sosial yang pas-pasan. Kalau bicara antusias sekali. Sampai lupa memberi kesempatan bicara orang yang diajak bicara. Dalam obrolan pagi itu, dia menceritakan kebiasaan dia melakukan suntik vitamin C dan menggunakan krim atau obat anti-aging. Saya menikmati obrolan khas ibu-ibu sambil menyiram tanaman di pekarangan rumah.

Yang membedakan cerita saya yang pertama dan kedua adalah tentang cara berusaha yang dilakukan. Yang pertama dilakukan di klinik kecantikan sementara yang kedua tidak. Kenapa tidak? Ya karena biaya perawatan di klinik kecantikan yang relatif mahal. Dia lebih banyak mengkonsumsi obat atau krim kecantikan berdasarkan informasi dari sosial media, situs *online* dan teman yang dikenalnya ketika berkeliling menawarkan minuman. Tentunya kualitas dan harga krim atau kapsulnya tidak semahal ibu yang pertama.

Secara sederhana yang membedakan antar kedua ibu tersebut adalah kebiasaan dan praktik keseharian dalam mempertahankan agar tetap awet muda. Tetapi kesamaannya adalah keduanya berusaha mempertahankan dirinya agar tetap awet muda di kondisi yang tidak muda lagi. Sebuah usaha yang mungkin dilakukan oleh banyak ibu dan mungkin bapak di Indonesia. Imajinasi untuk tetap muda seperti Sofia Latjuba, Yuni Sarah bahkan Titik Puspita adalah dambaan banyak orang.

Menunda penuaan

Proses penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur seseorang. Manusia mengalami perubahan sesuai dengan bertambahnya umur seseorang tersebut. Semakin bertambah umur semakin berkurang fungsi-fungsi organ tubuh. Dalam dunia medis penuaan dapat dijelaskan dengan berbagai macam teori.

Banyaknya produk-produk berupa krim, obat kapsul dan hal lain yang sejenis yang dilabeli sebagai obat anti-penuaan “anti-aging” merupakan implikasi dari perkembangan dunia medis yang berhasil menunda penuaan. Toruan (2008) menjelaskan dalam teori medis tentang penuaan yang dianut selama ini secara garis besar ada 3: yaitu genetika, radikal bebas dan teori hormon. Teori genetika memandang bahwa manusia sudah ditetapkan usianya sesuai dengan gen yang diperoleh dari orang tua. Teori radikal bebas melihat bahwa penuaan terjadi karena sel tubuh yang rusak lebih cepat dari yang seharusnya akibat diserang oleh radikal bebas yang berasal dari berbagai macam sumber. Sedangkan teori hormon

berasumsi bahwa setelah usia 30 tahunan, hormon tubuh manusia khususnya hormon pertumbuhan mengalami penurunan yang berefek pada kulit.

Penemuan tersebut merupakan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia medis. Penemuan yang bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolak kini menjadi suatu hal yang bisa ditunda. Hal tersebut menandakan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan mampu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia. Wolf (2002) dalam bukunya *Mitos Kecantikan* menilai bahwa ada usaha dari industri kecantikan (kosmetik dan fashion) yang menjadi induk semang dari sistem kapitalis untuk mengontrol kebebasan perempuan. Alih-alih menindas mereka secara langsung, industri kecantikan menyerang perempuan dengan mitos kecantikan. Jika kita kaitkan dengan cerita di atas, apa yang dilakukan dua perempuan tadi merupakan upaya dari ketidakpuasan terhadap tubuhnya, bisa juga rasa tidak bisa memuaskan laki-laki, bahkan membenci dirinya sendiri. Dari kacamata Wolf usaha keras untuk menjadi tetap awet muda adalah alat penyiksaan.

Kelas sosial, distingsi dan *lifestyling*

Menjadi tua bagi sebagian orang memang ancaman. Sehingga banyak orang berusaha mati-matian tetap awet muda. Ada yang terbukti berhasil, ada yang gagal. Gambaran dua ibu dari kelas sosial yang berbeda di atas tentunya menyimpan motif. Apa yang membuat mereka berusaha sedemikian kuat agar tidak menjadi tua. Meskipun hal tersebut cukup berisiko bagi kelas sosial yang menengah ke bawah. Dengan biaya pas-pasan membayangkan punya kulit tetap muda. Tentunya hal tersebut cukup berisiko dan berbahaya.

Secara spontan saya bertanya kepada istri saya. Apa yang membuat banyak perempuan begitu terobesi tetap awet muda. Obralan santai itupun sampai pada sebuah kesimpulan. Bagi kelas sosial menengah-atas hal tersebut dilakukan agar jadi terlihat berbeda dengan orang se-usianya dan mungkin juga kelompok di luar dirinya. Hal tersebut mengingatkan saya pada praktik distingsi

(*distinction*). *Distingsi* sebagai sebuah perbedaan yang digunakan untuk menunjukkan posisi status kelas tertentu (Bourdieu dikutip Haryatmoko : 2013).

Bourdieu mendiskusikan panjang lebar betapa selera itu sama sekali tidak netral. Dari pengamatan tersebut, apa yang dilakukan oleh ibu yang pertama menggambarkan bahwa selera diorganisasikan sesuai dengan posisi di dalam masyarakat. Selera selalu merupakan representasi khas dari suatu kelompok kelas. Representasi dari hasrat membedakan diri (*distingsi*) dengan kelompok sosial yang lain, terutama yang lebih bawah. *Distingsi* kurang lebih bisa disederhanakan sebagai perbedaan yang merujuk pada pengelompokan suatu kelas sosial tertentu. Pengelompokan tersebut tergambar dari kebiasaan mereka dalam mempertahankan diri bersama kelompok sosialitanya. Membiasakan diri ke klinik kecantikan yang mahal yang orang dengan kelas sosial bawah susah untuk menjangkau.

Terus bagaimana ibu dengan ekonomi pas-pasan yang juga saya ceritakan tadi. Dari situ tergambar bagaimana gaya hidup cenderung mengeksklusi orang dengan kelas sosial tertentu. Modernitas memang menciptakan perbedaan, pengucilan dan peminggiran (Gidden:1991).

Institusi modern telah menciptakan mekanisme penindasan daripada aktualisasi diri. Apa yang terjadi pada diri perempuan dengan kelas sosial bawah tadi bisa dipahami sebagai eksklusi dari menciptakan gaya hidup sendiri. Dia dipaksa untuk mengikuti gaya hidup dan perilaku tertentu oleh orang-orang yang mempunyai otoritas. Penampilan untuk tetap muda seolah menjadi standar dan hal tersebut yang membuatnya melakukan usaha-usaha agar dirinya tetap kelihatan muda. Apa yang dilakukannya juga bisa dilihat sebagai praktik *lifestyling*, yakni perilaku yang sekadar mempertunjukan gaya hidup tertentu tanpa didukung oleh kemampuan ekonomi yang merupakan dasar konsumsi sesungguhnya. Sebuah usaha yang mungkin bagi sebagian orang cukup menyiksa tetapi rasanya susah keluar dari imaji tersebut. Yakni imaji tetap tampak muda selama-lamanya.

Lathi Challenge dan Mitos Hantu Perempuan



Belantika musik tanah air di tahun 2020 lalu tengah dimeriahkan dengan sebuah lagu berjudul *Lathi*. Sebuah lagu yang mengulas tentang hubungan *toxic relationship* dalam kehidupan anak muda. Lagu tersebut menggabungkan musik modern dan tradisional. Hal yang menarik dari lagu itu adalah respons dari para penggemarnya.

Booming-nya lagu tersebut ternyata diikuti euforia para penggemarnya dengan membuat *Lathi Challenge*. Sebuah tantangan di mana seseorang menampakkan perubahan dua karakter berbeda dalam satu waktu sekaligus, berawal dari cantik hingga berubah menjadi menyeramkan. Tantangan ini memang membutuhkan kreativitas yang tinggi untuk melakukannya, terutama dalam berdandan.

Cara berdandan yang menyeramkan yang identik dengan hantu dan unsur mistis lainnya beberapa hari ini sedang marak dan diikuti oleh banyak netizen. Terutama netizen perempuan. Beberapa orang menganggap hal tersebut bagian dari memanggil atau memuja setan. Tetapi saya tidak ingin mengulas hal itu, karena memang tidak menarik untuk diulas.

Sayasebenarnya tidak terlalu menyimak perkembangan tersebut. Hal yang mendorong saya untuk menulis hal ini berangkat dari sebuah diskusi kecil di sebuah kolom media sosial. Seorang teman perempuan sedang mengunggah video pendek lagu tersebut dan memberi narasi bahwa

video tersebut menggambarkan seorang perempuan yang selalu menjadi korban dari subordinasi dan penindasan berulang.

Perempuan tak bisa keluar, tak bisa bersuara, dan akhirnya gundah antara memilih akur dengan penindasan yang coba dinikmatinya atau melawan dengan puing-puing kekuatan yang entah bisa atau membuat jatuh lagi, dan kalah. Dan apa yang dia digambarkan tersebut dia sebut sebagai *toxic relationship*.

Lathi dan melawan *toxic relationship*

Dalam lagu *Lathi* yang menceritakan *toxic relationship* digambarkan bahwa pasangan yang seharusnya menjalin hubungan dengan saling mencintai, berubah lantaran salah satu di antaranya melakukan kekerasan terhadap yang lain. Menurut pencipta lagunya, lirik dari lagu ini terinspirasi dari banyak orang yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Pada lirik berbahasa Inggris tersebut, digambarkan kesulitan untuk keluar dari *toxic relationship*, namun akhirnya pengalaman tersebut merupakan pelajaran sekaligus seperti kutukan.

Dilansir dari *Health Scope*, hubungan dalam *toxic relationship* didominasi oleh perasaan tidak aman, egois, dan keinginan untuk memegang kendali. Kondisi ini tidak dapat diremehkan, karena dapat menyebabkan berbagai risiko serius bagi pasangan yang terlibat. Dengan kata lain, istilah *toxic relationship* merujuk pada sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku-perilaku 'beracun' yang merusak fisik maupun emosional diri sendiri maupun pasangan. Jika dalam hubungan yang sehat didominasi oleh kasih sayang, rasa saling menghormati, dan penerimaan, maka *toxic relationship* adalah kebalikannya.

Pertanyaan selanjutnya, penggambaran yang menyeramkan atas sosok perempuan apakah selaras dengan spirit lagunya? Yakni melawan *toxic relationship*.

Mitos hantu perempuan

Upaya keluar dari hubungan yang disebut *toxic relationship* yang digambarkan dalam video lagu *Lathi* yang diperankan oleh perempuan secara sekilas menggambarkan bagaimana perempuan harus mampu keluar dari jeratan tersebut. Dalam konteks masyarakat kita yang cenderung patriarkal menjadi relevan bahwa perempuan harus berusaha keluar dari dominasi laki-laki yang cenderung tidak setara.

Persoalannya kemudian, apakah visualisasi dan respons netizen melalui *Lathi Challenge* selaras dengan ide tersebut? Wajah seram dan mistisme apakah relevan dijadikan sebagai media menyuarakan hal tersebut?

Bumbu-bumbu mistisme atas produksi lagu dan video tersebut ditegaskan juga oleh Sara Fajira, penyanyi lagu *Lathi*. Dalam wawancara dengan *Youtuber Vandam* berjudul *20 Kesaksian Sarah Fajira Bertemu Sosok Tak Terlihat*, ia menyatakan, “*Saya merasakan sesuatu yang tidak biasa (lokasi shooting), dan memang benar ada (hantu) sosoknya perempuan berambut panjang.*”

Selain penyanyinya, banyak para netizen atau penggemar lagu tersebut membumbuinya dengan hal serupa yang mengaitkannya dengan kekuatan gaib, Nyai Roro Kidul, cerita zaman dulu dan tradisi Jawa yang keramat serta mistis.

Kehadiran *Lathi* dengan gambaran perempuan yang menyeramkan bukan hal baru di Indonesia. Meskipun dalam media yang berbeda, film-film Indonesia banyak menceritakan kaitan antara mistisme dan perempuan.

Beberapa film bergenre horor di Indonesia periode 2000-an banyak menampilkan representasi tersebut. Film-film horor perempuan seperti *Suzanna*, *Kutukan Suster Ngesot*, *Suster Keramas*, *Suster Keramas*, *Terowong Rumah Sakit*, *Kembalinya Suster Gepeng*, dan banyak film sejenis lainnya.

Kehadiran hantu perempuan dalam budaya layar di Indonesia tidak lahir di ruang hampa. Contohnya terkait sosok Sundel Bolong dalam mitos Indonesia. Ghaliyah (2018) dalam jurnal perempuan mengulas sosok Sundel Bolong yang dapat ditafsirkan sebagai simbol dari perempuan yang tidak diinginkan dan bahkan dianggap menjijikkan melalui penggambaran isi perutnya yang terlihat.

Mitos yang bermula dari film-film horor yang secara berkelanjutan terus dipercaya dan masih menjadi buah bibir masyarakat ini pun bisa dimaknai sebagai penanda tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, teror yang dilakukan para arwah gentayangan juga dapat mengartikulasikan betapa rendahnya upaya penegakan hukum di Indonesia terhadap para pelaku.

Jika dicermati lebih dalam, terbentuknya mitos-mitos mengenai hantu perempuan di Indonesia mengindikasikan adanya campur tangan ideologi politik untuk mengendalikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan. Sosok hantu perempuan merupakan langkah strategis untuk membungkam kaum perempuan dan melanggengkan ideologi patriarki.

Melalui wacana yang terus-menerus direproduksi melalui media film, bahasa dan simbol, ideologi patriarki telah mengakar di dalam alam pikiran masyarakat, sehingga tidak mudah untuk diubah, termasuk mengubah tafsir masyarakat terhadap mitos-mitos arwah para perempuan tersakiti tersebut.

Selain itu juga, Hatib Kadir (2017) dalam sebuah artikel menjelaskan mengapa hantu sering kali diperankan oleh perempuan. Di situ dijelaskan bahwa hampir semua struktur kekerabatan di Asia Tenggara dan Jawa bersifat bilineal. Dalam masyarakat bilineal, harta warisan rumah dan urusan domestik biasanya diserahkan kepada anak bungsu atau kepada perempuan.

Oleh karena itu, perempuan sering kali digambarkan menjadi penghuni rumah. Bahkan, kelak hingga mati, ia masih menghantui tata urusan warisan di generasi selanjutnya. Struktur masyarakat tersebut secara tidak sadar menempatkan secara dekat representasi hantu dan perempuan dalam sebuah film.

Dalam konteks yang lain, Stephen Galdwin dalam "*Witches, Spells, and Politics: The Horror Films of Indonesia*", dikutip dalam Tirto menjelaskan bahwa banyak kontribusi film horor di Indonesia memiliki pengaruh politis. Bahwa horor, teror, dan ancaman yang dihadirkan tokoh-tokoh hantu atau dukun perempuan yang ada pada 1970-an merupakan elemen pengendali. Bahwa perempuan yang kuat, berkuasa, dan menakutkan adalah salah, sementara perempuan yang patuh, pendiam, dan penurut merupakan representasi yang benar. Kemunculan hantu perempuan yang kuat dan dominan dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan salah. Hal tersebut jika kita kaitkan dengan sosok Lathi akan menjadi relevan.

Apakah kemunculan *Lathi Challenge* adalah usaha dari menciptakan wacana baru bahwa wacana perempuan yang kuat, berkuasa dan menakutkan adalah benar. Sehingga banyak netizen melakukan hal tersebut. Kita semua bisa menilainya.

Tetapi apa pun itu, sedikit ulasan di atas bisa saja dibantah bahwa gambaran sosok perempuan dalam video dan *Lathi Challenge* yang sedang marak itu bukan hantu seperti perdebatan saya dengan seorang teman beberapa hari lalu. Tetapi rasanya susah tidak mengaitkan keseraman yang ditunjukkan dalam video dan respons netizen melalui *Lathi Challenge*-nya ditambah cerita dari penyanyinya langsung dengan representasi hantu.

Sebuah video dan lagu yang berusaha digambarkan untuk melawan *toxic relationship* bisa jadi kontra produktif dengan tujuannya. Alih-alih melawan, yang ada malah melanggengkan mitos-mitos patriarkal dan mendomestifikasi perempuan.



Membaca Papua Melalui Buku Sekolah Dasar

Saya adalah generasi yang lahir di era 80-an akhir. Masa Sekolah Dasar (SD) adalah satu masa yang benar-benar berkesan. Apalagi di masa awal-awal mengenal tulisan. Nama Budi dan Ani begitu menancap dalam ingatan kita. Bagaimana tidak, ketika proses belajar menulis dan mengeja bacaan selalu menyebut nama keduanya. Dua nama yang saya yakin generasi 80-an atau 90-an tidak asing.

Buku teks SD yang dulu hanya didominasi oleh nama Budi dan Ani kini sudah banyak mengakomodasi nama lain. Atas nama reformasi, keberagaman mulai dihadirkan. Hal tersebut diungkapkan Muhammad Nuh (Mendiknas 2009-2014) kala itu. Dia mencontohkan bahwa nama-nama dalam buku kurikulum 2013 mulai beragam, Siti mewakili dari Jawa, Beni (Sumatera, Batak), Lina (Menado), Udin (Sunda, Jawa), Dayu (Bali), dan Edo (Papua). Wajahnya beda-beda. Artinya dari awal yang ingin menghadirkan representasi Indonesia yang beragam.

Nama-nama dalam buku SD tersebut adalah identitas yang diberikan negara sebagai bentuk konstruksi terhadap identitas. Karakteristik biologis dan atribut kultural yang menempel pada nama bertujuan mendefinisikan dan menjadi penanda etnis. Jadi diakui ataupun tidak, buku teks sekolah adalah alat diskursif negara. Tumbuhnya orde baru dan memasuki era reformasi mendorong negara harus mampu merepresentasikan Indonesia yang multikultur.

Salah satu hal yang menarik untuk diulas adalah terkait kemunculan nama Edo (representasi Papua) dalam buku sekolah. Hal tersebut mempunyai implikasi bagaimana representasi Papua dihadirkan oleh negara.

Persoalannya kemudian, apakah hal tersebut cukup? Cukup bagi generasi kita untuk menganggap keberadaan Papua sebagai bagian dari Indonesia? Cukup bagi etnis Papua untuk diakui eksistensinya oleh negara dan masyarakat di luar Papua?

Rasisme dan kondisi Papua

Beberapa waktu lalu dunia diramaikan dengan kejadian seorang pria kulit hitam di Minneapolis, George Floyd, meninggal pada Senin (25/5) setelah diborgol dan diinjak ke tanah oleh polisi. Kematian pria tersebut direkam dalam video dan kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Diskriminasi, rasisme dan tindak kekerasan terhadap orang kulit hitam kerap kali masih sering terjadi di dunia. Imajinasi tentang dunia damai, anti-diskriminasi dan toleran masih harus terus menerus diusahakan. Apa yang terjadi di Minneapolis sebenarnya pernah terjadi di Indonesia.

Beberapa tahun lalu tepatnya 16 Juli 2016, Obby Kogoya, anak Papua yang berkuliah di Jogja mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan George Floyd. Kepalanya diinjak sepatu berlogo N yang dikenakan aparat dan wajahnya tertelungkup ke tanah. Foto tersebut tersebar di *Facebook*. Kemudian Obby ditangkap di depan asrama mahasiswa Papua yang tengah dikepung oleh aparat.

Tahun lalu tepatnya 16 Agustus 2019 peristiwa serupa juga terjadi ketika polisi menangkap 43 mahasiswa Papua di asrama mereka di Surabaya, Jawa Timur. Mereka dituduh telah menodai bendera merah putih selama perayaan hari kemerdekaan. Oknum aparat meneriakkan berbagai penghinaan rasis, menyerbu asrama mahasiswa,

dan menggunakan gas air mata untuk memaksa mereka keluar.

Dalam konteks Indonesia, diskriminasi, *stereotype* etnis dan tindakan rasisme yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara merupakan persoalan pelik yang kerap kali terjadi. Macleod (2011) menjelaskan bahwa stereotipe kuat ini muncul berkaitan dengan konteks sosial dan sejarah yang panjang. Orde baru yang secara masif mempropagandakan kebencian kepada pihak yang dianggap anti Pancasila dan anti-NKRI yang dalam hal ini termasuk masyarakat Papua. Hal tersebut dipicu dari kegagalan referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 yang membuat Papua dengan terpaksa harus menjadi bagian dari Indonesia. Selain disebabkan oleh faktor sosial dan sejarah, tentunya faktor lain juga menjadi pemicu.

Lantas apa hubungannya dengan buku teks SD?

Buku SD dan posisi identitas Papua

Buku sekolah merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran. Buku teks sekolah adalah alat transformasi ilmu pengetahuan yang efektif. Melalui buku teks sekolah praktik ideologisasi oleh negara berjalan. Althusser (1971) menjelaskan bahwa negara memiliki apa yang ia sebut sebagai *Ideological State Apparatus* (ISA). Praktik ISA adalah alat ideologisasi negara yang berjalan secara masif dan difungsikan secara sekunder sebagai alat represi (penekanan) secara halus dan tak sadar bahkan simbolik. Dalam konteks pendidikan bisa melalui buku teks terbitan negara.

Ada nama Edo yang merepresentasikan Papua. Persoalannya kemudian, apakah hal tersebut cukup? Irawan (2014) dalam penelitiannya tentang identitas ke-Indonesiaan dalam buku SD menjelaskan bahwa meski ada kehadiran representasi Papua, tetapi relasinya dengan figur yang lain tetap saja nilai inferior dan penuh *stereotype*. Di satu sisi berusaha menghadirkan yang berbeda tetapi di sisi lain tetap saja kehadirannya dianggap sebagai pelengkap.

Apa yang digambarkan dalam buku SD kelas 1 di atas nampaknya punya relevansi dengan kondisi hari ini. Bahwa kehadiran Papua diakui tetapi pengakuan tersebut tidak dibarengi dengan sikap yang humanis terhadap mereka. Papua diakui sebagai bagian Indonesia tetapi dalam praktik yang lain tindak rasisme, diskriminatif dan tindak kekerasan kerap terjadi terhadap mereka.

Apakah yang tergambar dalam buku SD tersebut sebuah kebetulan jika kita kaitkan dengan kondisi hari ini? Tentu saja tidak, buku teks bisa jadi ikut menjaga dan menaturalisasikan hirarki etnis. Etnis minoritas ditempatkan pada minor atau tersubordinasi dari posisi mayoritas. Pembuat buku baik secara sadar atau tidak memposisikan Papua dalam posisi yang berbeda dan hal tersebut dilegitimasi negara.

Buku teks SD menggambarkan kondisi nyata relasi negara terhadap Papua. Mengakui keberadaannya tetapi tidak diperlakukan sama seperti ikon tokoh yang lain. Hal tersebut relevan dengan kondisi Papua hari ini. Disatu sisi ada usaha untuk mempertahankan Papua agar tidak pisah dari Indonesia tetapi di sisi lain peristiwa rasis yang berujung pada tindak kekerasan masih kerap terjadi.

Sikap negara rasanya tidak jauh berbeda meski sudah kesekian kali berganti Presiden. Pernah ada secercah harapan ketika Gus Dur menjadi presiden dan secara aktif membuka ruang dialog yang terbuka kepada masyarakat Papua. Namun upaya tersebut harus terhenti seiring dengan pemakzulannya. Pengakuan atas identitas politik, ekspresi kultural dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat Papua adalah hal penting. Hal tersebut menegaskan tentang keberadaan orang Papua yang harus diperlakukan setara dengan etnis lain di Indonesia. Semoga segera ada jalan terbaik untuk Papua.



Perayaan

Masa kecil saat Ramadan adalah ingatan tentang suka cinta dan kemeriahan. Bagaimana tidak, suasana riuh dan gegap gempita selalu dirindukan banyak orang. Ada dua momen di desa yang membuat masyarakatnya begitu antusias, yakni Ramadan dan peringatan 17 Agustus. Masa kecil dengan puasa setengah hari adalah ingatan yang menyenangkan. Meski kerap mengeluh karena lemas dan tidak jarang melihat jam dinding menjadi momen dramatis, tetapi saat-saat seperti itu jika dikenang akan terasa indah.

Keindahan itu diperkuat dengan aktivitas yang menyenangkan pula. Menjelang sore warga desa sudah lalu lalang menyiapkan keperluan berbuka. Sementara saya dan gerombolan teman se-umuran riuh berbongdong-bongdong untuk pergi mengaji atau mengisi riuh masjid dengan berlari berkejaran. Halaman masjid seketika tidak ubahnya seperti pasar malam dengan beberapa penjual dadakan di pinggir jalan.

Adzan maghrib adalah waktu yang ditunggu. Perut kenyang karena terlalu banyak makan seolah lazim kala itu. Sehingga tidak jarang waktu terawih terasa berat karena perut kekenyangan. Riuh ramadhan yang indah makin dipercantik dengan ceramah-ceramah tentang besarnya pahala yang harus direbut dengan suka cita.

Penceramah begitu semangat, sementara kami anak-anak masih saja asyik berlarian di halaman dan bahkan di dalam area masjid. Suara teguran dan cambukan dari sajadah jadi satu momen mendebarkan kala itu. Tetapi besarnya kami sudah lupa dan mengulangnya lagi.

Selanjutnya tidak berhenti di situ. Bahwa setelah tarawih adalah momen melanjutkan bermain sehingga tidak jarang saya harus pulang larut malam ke rumah atau terpaksa tidur di masjid. Karena lelah bermain, momen makan sahur adalah momen berat tahan kantuk. Kantuk itu hilang setelah selesai menjalani sholat subuh. Karena momen bermain harus berlanjut. Bergerombol menuju desa sebelah dengan mengumbar celoteh khas anak-anak di sepanjang jalan, membunyikan petasan dan saling tegur sapa kepada teman desa lain. Semua itu kita lalui sampai menjelang siang.

Momen berkirim kebutuhan pokok kepada sanak keluarga adalah salah satu momen yang ditunggu pada penghujung Ramadan. Dengan menjadi juru kirim, kita akan mendapat semacam upah dari keluarga yang kita kirim. Akhir ramadhan dengan simpanan uang yang banyak lazim dialami oleh para anak kala itu. Momen tersebut adalah salah satu momen yang ditunggu, selain baju dan sandal baru tentunya. Saya akan merasa kehilangan jika perayaan itu mulai berakhir, suasana riuh nan gembira yang akan saya nantikan setiap tahun. Ramadan masa kecil adalah perayaan sehari penuh tanpa henti. Yang ada dibenak kala itu hanya kata bahagia. Sebuah perayaan yang ketika kita kenang hari-hari ini energinya masih terasa.

Perayaan yang berubah

Aktivitas Ramadan yang saya ceritakan di atas tentunya harus berubah seiring waktu. Fase bukan lagi menjadi bocah adalah penyebabnya. Menjalani sekolah di luar desa dan fase beranjak dewasa merubah semuanya.

Bagi saya, pindah ke kota adalah salah satu biang kerok dari perubahan itu. Kota merubahnya secara drastis. Sudah tidak ada lagi aktivitas berlari-lari di pelataran masjid, adegan saling dorong saat sholat tarawih dan aktivitas seru lainnya. Selain kota tentunya usia juga mengharuskan itu berubah.

Di kota dengan label baru sebagai mahasiswa mempunyai kesan khusus bagi saya. ramadhan masa itu lebih banyak dihabiskan dengan acara diskusi kampus dan buka puasa bersama. Momen buka bersama kala itu menyimpan dua motif penghematan dan pendekatan. Penghematan biaya agar tidak keluar uang untuk berbuka dan pendekatan dengan orang yang kita sukai.

Menjadi mahasiswa dengan uang saku seadanya menjadikan Ramadan penuh makna. Bagaimana tidak, gabung di banyak agenda jelang berbuka adalah momen penting yang tidak bisa kita jumpai di luar bulan Ramadan. Banyak organisasi, institusi bahkan pribadi yang berbondong-bondong merebut pahala dengan memberikan secara cuma-cuma makan sahur dan berbuka. Kala itu saya menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan jariah pahala. Selain penghematan, pendekatan dengan orang yang kita sukai adalah momen penting kala itu. Tidak jarang momen ramadhan jadi semacam peluang untuk sekadar berucap selamat berbuka dan membangunkan sahur kepada orang yang kita sukai.

Ramadhan adalah momen mendekatkan diri kepada Allah, meski selalu saja ada bunga-bunga buka bersama sebagai dalih agar bisa dekat dengan orang yang kita sukai. Ramadhan menjadi momentum saling mengingatkan. Mengingatkan untuk bangun makan sahur, bertanya menu makanan yang dimakan dan terkadang agak naif mengingatkan agar banyak mengaji. Hal tersebut tentunya hanya berlaku untuk orang yang kita sukai juga. Penghematan dan pendekatan adalah perayaan baru yang berubah. Apapun itu, hal tersebut tetap layak disebut perayaan.

Bagi saya, mengingat ramadhan yang sudah-sudah adalah bagian dari menghibur diri di tengah pandemi Covid-19. Meskipun banyak orang dipaksa mengambil hikmah karena kondisi yang berbeda, saya memilih mengenang ramadhan yang sudah-sudah. Sebuah perayaan yang layak kita rayakan.

Rasis Sejak Dini: Temuan Diskriminasi dalam Tontonan Dan Bacaan Anak tentang Papua



Masyarakat Papua menjadi korban rasisme dan diskriminasi di negaranya sendiri. Hingga saat ini pun, kejadian rasis dan diskriminatif kerap kali kita temukan. Kasus rasisme yang berujung pada kekerasan menimpa Oby Kagoya di tahun 2017, mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta. Kepala Oby Kagoya diinjak sepatu yang dikenakan aparat dan wajahnya tertelungkup ke tanah. Selain itu ada juga ujaran rasis yang menimpa para mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur tahun lalu.

Saya melihat aksi rasis dan diskriminatif terhadap warga Papua ini sudah tertanam di dalam diri anak-anak Indonesia sejak dini lewat konstruksi orang Papua yang disuguhkan melalui media populer. Melalui film, tayangan televisi dan buku teks sekolah, negara melanggengkan sikap rasis terhadap warga Papua dalam diri anak.

Rasisme dalam film

Film, tayangan televisi, dan buku sekolah merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran anak. Wening Udasmoro, ahli bahasa dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, mengungkapkan bahwa anak adalah peniru ulung. Melalui pengalaman kesehariannya, mereka mengamati dan meniru hal-hal yang ditonton dan dibaca. Keseharian anak yang dekat dengan media populer berpengaruh dalam membentuk kesadaran, tingkah laku, dan karakter mereka.

Dari beberapa film tentang Papua yang tayang di televisi, saya menemukan masih cukup banyak film anak bertema Papua yang mengandung unsur diskriminatif dan rasis. Misalnya film *Denias*, *Senandung di Atas Awan*, yang merupakan salah satu contoh film anak yang bercerita tentang anak Papua. Film tersebut masih saja menggambarkan citra anak-anak Papua yang primitif, terbelakang, miskin, dan cenderung suka berkelahi.

Gambaran yang penuh *stereotype* juga akan mudah kita temui dalam beberapa film anak bertema Papua. Stereotipe senada juga ditemukan dalam serial drama remaja *Diam-Diam Suka* di salah satu televisi swasta. Serial tersebut menggambarkan bahwa orang Papua itu bodoh, aneh, dan primitif.

Tayangan lain yang sejenis bisa kita jumpai dalam tayangan komedi Keluarga Minus. Dalam tayangan tersebut kita akan mengingat sosok Minus yang lucu dan terkadang berlaku konyol. Tayangan tersebut memberikan sesuatu hal yang relatif baru, yakni kemunculan wajah Papua dalam televisi. Tetapi kemunculan tersebut cenderung memposisikan Papua sebagai bahan olok-olok dan layak ditertawakan. Padahal secara tidak sadar hal tersebut akan melanggengkan stigma terhadap orang Papua, yakni stigma bodoh dan konyol.

Rasisme dalam buku teks

Setelah era Reformasi, buku teks pelajaran anak berusaha menghadirkan lebih banyak keragaman Indonesia. Buku teks SD (Sekolah Dasar) yang dulu hanya didominasi oleh nama Budi dan Ani. Kini juga menghadirkan tokoh Edo yang merepresentasikan Papua. Tapi itu tidak cukup.

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa meski etnis Papua sudah sering hadir dalam buku teks SD, tetapi relasinya dengan figur yang lain tetap saja inferior. Ketika disandingkan dengan etnis lain, etnis Papua masih dianggap lebih rendah dan dianggap sebagai pelengkap saja.

Mengapa negara membiarkan?

Gambaran di atas menegaskan betapa rasis dan diskriminatifnya tontonan dan bacaan tentang Papua yang disuguhkan untuk anak. Imajinasi Papua yang primitif, bodoh, miskin, dan hal-hal negatif lainnya sudah terinstitusionalisasi dalam film, tayangan televisi dan buku sekolah.

Sikap rasis dan diskriminatif tersebut didorong oleh sikap superior pembuat dan pencipta teks media yang dilegitimasi oleh negara. Legitimasi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam memahami keinginan masyarakat Papua. Negara sering kali absen dalam memperhatikan banyak aspek kehidupan orang Papua, baik soal pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hal-hal penting penting lainnya. Negara seharusnya perlu memperhatikan representasi Papua yang adil dan humanis dalam bacaan maupun tontonan untuk anak.

Representasi dalam bacaan maupun tontonan tentang Papua yang kerap kali muncul dalam buku, televisi, dan film bukan sesuatu hal remeh dan hanya dipandang sebatas hiburan. Kualitas bacaan dan tontonan tersebut mempunyai implikasi pada masa depan imajinasi anak-anak Indonesia.

Jika ingin memutus mata rantai diskriminasi dan rasis maka sejak dini negara harus memperhatikan kualitas bacaan dan tontonan anak-anak.

Anak adalah masa depan peradaban kita. Konstruksi hari ini membentuk perilaku masa depan. Anak adalah peniru dari lingkungannya. Apa yang dilihat, baca dan tonton sangat mungkin mempengaruhi sikapnya.

Apa yang bisa dilakukan

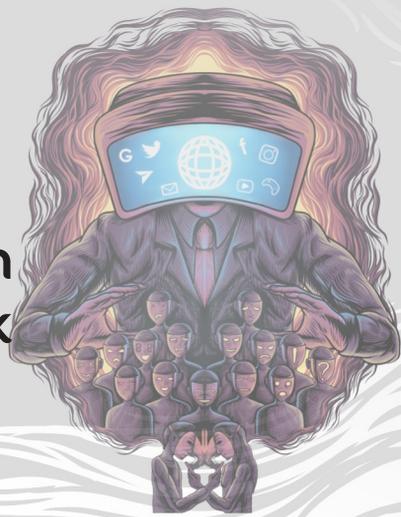
Peran orang tua menjadi penting dalam memutus cara pandang yang diskriminatif, rasis, dan tidak adil terhadap etnis Papua sejak dini. Kita harus terus menumbuhkan sikap kritis terhadap kualitas bacaan maupun tontonan anak-anak.

Bersikap kritis bukan hanya selektif tetapi berupaya memberi makna atau merekonstruksi sebuah narasi atau cerita yang dianggap bermuatan rasis dan diskriminatif. Dalam hal ini, orang tua tidak hanya melarang bacaan atau tontonan yang rasis dan diskriminatif, tapi justru menggugah kesadaran anak agar lebih peka.

Orang tua juga harus membiasakan anak untuk hidup dalam perbedaan. Perbedaan agama, ras, suku dan hal lain penting untuk ditanamkan sejak dini. Dengan perbedaan, anak akan mampu bersikap terbuka dan akan terhindar dari pola pikir sempit yang akan berujung pada tindakan rasis, diskriminatif hingga kekerasan.

Orang tua juga harus memastikan interaksi antar anggota keluarga yang ramah terhadap perbedaan karena hal tersebut akan banyak berdampak pada sikap anak. Tata keluarga yang demokratis adalah miniatur negara. Apa yang terjadi pada keluarga akan punya dampak yang signifikan pada kehidupan kebangsaan kita yang kaya dan beraneka ragam.

Oki Setiana Dewi dan Kualitas Bacaan Anak



Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengalami riuh perdebatan tentang perkataan Oki di media sosial. Banyak sekali yang mengkritik dan bahkan menghujat. Tetapi tidak sedikit pula yang berusaha memahami kealpaan Oki sebagai sesuatu hal yang harus dimaklumi sebagai manusia yang sedang khilaf. Tentunya keduanya mempunyai argument masing-masing. Oki adalah produk orang dewasa dengan pendidikan tinggi yang telah terjebak pada ucapan tidak adil gender.

Dalam tulisan ini saya tidak ingin masuk ke dalam riuh substansi tentang ucapan Oki yang diperdebatkan. Karena bagi saya sendiri ujaran yang bernuasa bias gender dalam keseharian kerap kali saya jumpai. Sebagai orang yang sejak kecil hidup di Jawa, hubungan yang menempatkan perempuan sebagai *the second sex* masih sangat kuat dalam budaya kita. Dalam beberapa aspek sudah ada kemajuan tetapi dalam sisi yang lain rasanya masih tidak jauh berbeda.

Respon masyarakat atas ucapan Oki adalah kemajuan. Respon tersebut membuktikan bahwa kesadaran gender dalam masyarakat telah menjadi norma yang kuat. Tentunya hal tersebut menjadi sesuatu hal yang positif. Tetapi apakah hal tersebut cukup? Tentu saja tidak. Adanya respon masyarakat tentang ujaran Oki yang bias gender adalah modal awal untuk mewujudkan masyarakat adil gender. Masyarakat harus diajak untuk melihat teks-teks lain yang berpotensi menanamkan paham patriarkal yang tidak adil gender. Salah satunya adalah bacaan anak kita.

Bacaan Anak yang Bias Gender

Satu hal yang menjadi konsentrasi saya beberapa tahun ini adalah tentang kualitas bacaan anak. Dalam penelitian yang saya lakukan dan telah terbit di Jurnal dengan judul *Patriarchal Discourse in Nusantara Classic Children Literature*. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2716–2725 menjelaskan bahwa banyak cerita anak bergenre cerita rakyat (folklore) seperti Sangkuriang, Bawang Merah Bawang Putih, Malin Kundang dan beberapa cerita rakyat lain memiliki tendensi untuk menanamkan karakter tidak adil gender. Perempuan dominan digambarkan berdasarkan standar kecantikannya serta selalu mendapatkan domestifikasi.

Gambaran tentang perempuan yang terdiskriminasi dalam wilayah privat dan cenderung gemar berkonflik untuk merebutkan laki-laki masih sangat kuat dalam cerita tersebut. Cara pandang misoginis masih sangat kuat dalam beberapa cerita tersebut. Misogini merujuk pada Manne (2017) menyebutkan sebuah lingkungan atau sistem sosial di mana perempuan menghadapi perlakuan koersif, tak bersahabat, dan yang berbau kebencian, hanya karena mereka adalah perempuan di dunia para laki-laki yang maskulin.

Tidak hanya terjadi pada sastra anak bergenre cerita rakyat. Hal serupa juga bisa kita lihat dalam penelitian saya tentang bacaan anak bergendre Islami. Dalam jurnal yang berjudul *Gender Bias in Islamic Children's Literature: Case Study in Indonesia*. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10 (2), 62-75 mengungkap bahwa ada bias gender dalam bacaan tersebut. Perempuan digambarkan lebih banyak memerankan peran domestik dan kerap mengalami stereotipe. Perempuan dalam beberapa cerita aktivitasnya dibatasi hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah dan kerap mengalami stereotipe yang tidak adil seperti perempuan cenderung lemah, tidak mandiri dan stereotipe lain yang serupa. Hal di atas tentunya sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Di tengah fenomena sosial yang saya amati tentang tingginya keinginan orang tua untuk mendidik anak menjadi lebih religius dan menjamurnya

buku anak islami. Buku bacaan islami yang diharapkan menjadi perantara utama bagi orangtua menyampaikan pesan kepada anak mereka agar menjadi anak sholeh dan sholihah, ternyata beberapa buku tersebut justru menanamkan pesan tidak ramah gender. Hal tersebut tentunya patut menjadi perhatian kita semua.

Anak adalah Peniru Ulung

Kesadaran kesetaraan gender yang tumbuh atas ucapan Oki adalah sesuatu hal yang positif. Tetapi tidak cukup hanya itu, kita semua juga harus secara kritis melihat sesuatu hal yang dekat dengan keseharian kita. Yakni bacaan anak. Bacaan anak adalah sesuatu hal yang dekat dan berpotensi mempengaruhi cara pandang anak. Anak adalah peniru ulung melalui pengalaman kesehariannya lewat proses mengamati dan meniru hal-hal yang dia amati (Udasmoro, 2012). Menyediakan bacaan yang ramah gender adalah upaya strategis jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat adil gender. Tentunya bacaan yang baik bukan satu-satunya. Bacaan yang ramah gender adalah salah satu hal dan harus didukung dengan mewujudkan lingkungan yang ramah sehat pula. Lingkungan yang sehat adalah sebuah kondisi dimana interaksi yang ada didasarkan atas kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan seksual, baik di sektor pendidikan, politik, ekonomi dan sektor lain yang berkaitan.

Tingginya angka kekerasan seksual akhir-akhir ini adalah buah dari pendidikan masyarakat kita beberapa tahun lalu yang alpa akan penanaman nilai-nilai adil gender. Sejak dini generasi kita perlu ditanamkan akan pentingnya kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama yang harus saling menjaga. Penghargaan atas sesama makhluk adalah sesuatu hal mutlak. Pendidikan gender hari ini akan menggambarkan kondisi masyarakat kita di masa depan. Momentum kesadaran gender yang mulai menguat harus diarahkan untuk melihat bagian-bagian penting dari keseharian kita. Salah satunya adalah bacaan anak.



Ketika Media Baru Mengancam Otoritas Pemeluk Agama

Beberapa tahun lalu sebuah video seorang ustaz yang bernama Zainal Abidin beredar luas. Tanpa sumber yang jelas dia menyebutkan bahwa lagu *Balonku* dan *Naik ke Puncak Gunung* menyimpan agenda membenci Islam dan dianggap sebagai agenda kristenisasi terselubung.

Seketika perasaan saya menjadi jengkel bercampur gundah. Bagaimana tidak, karena lagu tersebut adalah salah satu lagu favorit anak saya yang sedang memasuki taman kanak-kanak (TK). Perasaan tersebut cukup berdasar untuk memicu kejengkelan saya karena lagu itu juga yang dulu sering saya nyanyikan sewaktu kecil dan sampai hari ini terbukti agama saya tetap Islam. Selain itu, perasaan gundah tiba-tiba datang atas masa depan narasi-narasi dakwah Islam.

Bahkan dalam hati terdalam, saya yakin bahwa pencipta lagunya sendiri tidak pernah terpikirkan kalau lagunya punya misi seperti yang dituduhkan sang ustaz. Dari mana sang ustaz mendapat informasi tersebut. Buku apa yang dibaca atau dia pernah berguru pada siapa?

Saya yakin sang ustaz sedang melakukan malpraktik seperti sebutan dalam sebuah artikel di islami.com. Malpraktik tersebut bukan tuduhan yang salah, karena berdasarkan rujukan yang saya baca Malpraktik adalah sebuah tindakan salah, kekurangan ilmu dan keterampilan dalam ukuran yang tidak wajar.

Istilah tersebut biasanya digunakan untuk menyebut sikap atau tindakan yang menyalahi aturan oleh seorang dokter, pengacara, akuntan dan mungkin profesi lain. Dan kali ini istilah tersebut cocok disematkan pada sang ustaz yang tanpa dasar dan pengamatan yang ilmiah menyebut sesuatu hal secara serampangan.

Apa implikasi dari sikap malpraktik tersebut?

Hal tersebut jelas mempunyai implikasi yang serius terhadap masa depan imajinasi anak-anak Islam.

Lagu dan Imajinasi Anak

Pandemi yang sudah berjalan berbulan-bulan ini kerap kali menyebabkan kebosanan yang luar biasa bagi anak-anak. Saya mengalaminya sendiri bagaimana orang tua harus berpikir keras agar anak-anak tidak terjebak pada kebosanan akut. Lagu anak adalah salah satu bagian penting di masa pandemi yang saya gunakan sebagai hiburan dan alat edukasi. Hal tersebut menegaskan bahwa lagu dekat dengan anak dan menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Diakui atau tidak lagu anak memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk watak dan cara berpikir seseorang ketika dewasa. Dengan lagu, anak mengasah imajinasi, rasa sosial, rasa etis dan bahkan kemampuan fantasionalnya. Bandura (2012) menjelaskan bahwa anak adalah peniru ulung atas apa yang dilihatnya. Melalui pengalaman kesehariannya, mereka mengamati dan meniru hal-hal yang dia amati.

Dalam konteks tersebut, kekhawatiran sang ustaz cukup berdasar apabila lagu yang dinyanyikan oleh seorang anak mengandung unsur kebencian, *sexis* dan bahkan kekerasan. Lagu atau media lain yang sangat dekat dengan anak akan sangat mungkin mempengaruhi pola dan tingkah laku anak. Karena tadi, anak adalah peniru ulung atas apa yang dia dengar, dia rasa dan dia lihat.

Persoalannya adalah apakah lagu *Balonku* dan *Naik ke Puncak Gunung* liriknya bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai kemanusiaan?

Jelas tidak, perhatikan saja liriknya dan faktanya. Selama ini lagu tersebut baik-baik saja dan tidak pernah ada fakta atau kejadian yang mendorong anak berbuat tidak benar menurut agama atau negara karena lagu tersebut.

Teror Kebencian

Saya tidak bisa membayangkan ketika ceramah yang mengatasnamakan dakwah tersebut berubah menjadi semacam teror bagi anak-anak. Bagaimana tidak, anak-anak selama ini menikmati lagu tersebut, tiba-tiba dalam lagunya dihakimi berpotensi menebarkan kristenisasi dan dianggap membenci Islam.

Entah sumber dari mana yang membuat ustaz tersebut menyampaikan hal tersebut. Hal tersebut bisa jadi menjadi teror kebencian yang mengancam masa depan anak-anak kita. Mengapa saya katakan teror?

Pertama, isi ceramahnya jelas mengusik kenyamanan banyak orang, terutama anak-anak. Sebuah lagu yang dinyanyikan selama bertahun-tahun dan terbukti tidak pernah membuat orang berpindah agama gara-gara lagu tersebut. Secara tiba-tiba dihakimi menyimpan misi kristenisasi dan melemahkan iman.

Kedua, berpotensi menjadi teror kebencian bagi anak. Anak yang semula tidak menyimpan kebencian terhadap orang yang berbeda agama terutama Kristen bisa jadi akan tertanam benih kebencian jika percaya pada pemaknaan sang ustaz atas lagu tersebut. Saya tidak bisa membayangkan jika anak-anak kita sejak kecil sudah menyimpan benih kebencian atas mereka yang berbeda. Hal tersebut bisa menjadi bom waktu bagi masa depan Indonesia yang multikultur.

Ketiga, yang sangat saya sayangkan adalah informasi tersebut dikemas dalam arena yang disebut sebagai dakwah. Dakwah yang harusnya menyeru kepada kebaikan dan kedamaian berubah dari ajang menanam kebencian, konyolnya lagi ditujukan pada anak. Saya bisa memaklumi kalau hal tersebut disampaikan dalam forum lain, tetapi ketika hal tersebut dalam ruang yang mengatasnamakan dakwah maka kita semua patut gelisah.

Keempat, di era digitalisasi yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk menjadi produsen konten jelas menyimpan ancaman. Kemunculan ceramah yang viral tersebut jelas menjadi alarm bagi kita semua terutama orang tua. Apa maksudnya? Kebencian-kebencian atas nama agama bisa sangat cepat masuk ke dalam imajinasi anak-anak kita.

Kita semua perlu menjadi bagian penting dari penyebaran atau penciptaan konten-konten digital yang ramah anak dan penuh pesan kedamaian. Selain itu juga perlu menjadi pendamping yang cerdas bagi anak kita ketika berhadapan dengan konten-konten berpotensi menanamkan kebencian.

Anak-anak kita adalah masa depan agama dan negara kita. Mari kita jaga imajinasinya dari anasir-anasir kebencian yang kerap kali hadir di tengah dunia yang bergerak begitu cepat.

BAB 3

BUDAYA POPULER DAN MEDIA BARU





Bencana Demokratisasi dan Kecemasan Kita

Satu tahun lalu dan ke depan adalah tahun yang berat. Di awal 2021, dalam jarak yang tidak terlalu lama, bencana terjadi secara beruntun. Dari kecelakaan pesawat, banjir, longsor, erupsi gunung merapi, gempa dan yang terbaru tenggelamnya kapal selam KRI Manggala 402.

Belum sempat hilang rasa cemas karena Covid-19, bencana hadir bertubi-tubi menaikkan tensi kecemasan dan kepanikan kita. Di tengah informasi mulai menurunnya tren Covid-19 di belahan dunia termasuk Indonesia. Beredar berita dan video tentang lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat drastis di India.

Visual tentang jenazah yang memenuhi rumah sakit dan korban yang menjalani perawatan di luarnya secara langsung membuat rasa khawatir kembali meningkat. Pacu jantung kita belum sempat mereda, sudah ada lagi berita duka lainnya.

Berita duka menyelip di beranda sosial media kita dan menjelma menciptakan kecemasan dan kepanikan publik. Intensitas kecemasan dan kepanikan akan semakin tinggi ketika informasi tersebut dibicarakan secara terus menerus di media, baik media sosial maupun media *mainstream*.

Kecepatan dan bencana

Hari ini kita sedang memasuki satu kondisi di mana demokratisasi informasi sedang berlangsung melalui teknologi. Thomas L. Friedman (2005) menyebut dalam

bukunya sebagai pendataran bumi (*the world is flat*). Akses informasi tidak lagi didominasi oleh bagian belahan tertentu, tetapi melalui teknologi terutama internet semua orang bisa mendapat hak yang sama atas informasi.

Teknologi membuat batas antara yang di sana dan di sini menjadi kabur. Batas antara kota dan desa, negara maju dan berkembang sudah tidak ada bedanya selama terkoneksi dalam satu modal komunikasi yakni internet. Teknologi internet yang menjadikan akses kecepatan informasi banyak merubah tatanan dunia.

Kecepatan menjadi kata kunci penting yang merubah banyak hal. Di satu sisi internet menciptakan pola agaliterisme baru tetapi di sisi lain kecepatan justru menciptakan petaka.

Virilio dalam Nugroho (2020) menjelaskan bahwa kecepatan teknologi juga menciptakan kecenderungan yang mengarah pada kepanikan dan kecemasan global. Diksi “kecepatan” tidak selamanya baik. Justru semakin cepat semakin banyak risiko yang dihadapi.

Kemajuan teknologi yang mendengungkan kecepatan dan akselerasi, seolah tidak memberi pilihan ruang dan semua hal dipaksa mengikuti arus yang serba cepat. Dalam konteks tersebut Virilio menyebutkan bahwa kemajuan juga memiliki cacat, yaitu kecenderungan totaliter.

Kejadian beberapa bulan terakhir di mana bencana mendera secara terus menerus dan diberitakan secara masif dapat meningkatkan intensitas kecemasan publik. Dalam konteks cepatnya akses informasi atas bencana yang mendera tidak sedikit membuat orang kehilangan nalar reflektif dan rasa empatinya.

Hoax dan empati.

Ketika bencana melanda di era teknologi, banyak pihak, baik individu maupun media berusaha menjadi yang utama menyebarkan kondisi terkini. Berebut menjadi yang utama memberi informasi adalah salah satu ciri era ini.

Konsekuensi dari hal tersebut tanpa budaya *check dan re-checks* seseorang dengan mudah mendapatkan sekaligus membagikan informasi. Namun, dari kemudahan itu muncul suatu masalah baru, yakni tersebarnya *hoax* dengan mudah.

Hoax merupakan kekacauan informasi yang sering dipahami sebagai misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar. Namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain.

Sementara disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu kalau itu tidak benar. Hal ini merupakan kebohongan yang sengaja disebar untuk menipu, membahayakan dan bahkan menciptakan kecemasan.

Penyebarnya atau pembuat *hoax* merupakan manusia yang minim nalar reflektif. Betapa bahayanya ketika *hoax* mampu menciptakan kecemasan, kerusuhan dan bisa jadi sampai menghilangkan nyawa.

Dalam kondisi bencana, disinformasi kerap kali dilakukan oleh pihak, oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai panggung politik. Ada agenda tertentu atas bencana yang sedang terjadi.

Melalui pemberitaan yang masif atas sebuah bencana, dengan harapan intensitas kecemasan meningkat, sebisa mungkin ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Dalam kondisi masyarakat yang cemas, agenda politik mereka mudah untuk dijalankan.

Sementara dalam konteks matinya empati, sebagian media kita mungkin lebih tertarik memberitakan kesedihan korban atau keluarga korban. Mereka suka menjual air mata dan narasi-narasi irasional atas bencana. Demi *rating* atau *adsense*, mereka tidak lagi memperdulikan rasa empati.

Hal tersebut bisa kita lihat dalam kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 beberapa bulan lalu dan semoga hal yang sama tidak terjadi pada kejadian tenggelamnya kapal selam KRI Manggala 402. Gambaran di atas menggambarkan bagaimana kecepatan teknologi sangat mungkin menciptakan petaka yang tidak kalah dahsyat dari era-era sebelumnya. Demokratisasi informasi yang diagung-agungkan juga menciptakan paradoksal. Sebuah kondisi di mana teknologi juga bisa menciptakan petaka-petaka baru.

Maka bisa dikatakan bahwa salah satu bencana kita hari ini adalah kecepatan teknologi. Ketika kecepatan tidak mampu lagi membuat orang mampu berpikir mendalam (*reflektif*) sehingga dengan mudah menyebar informasi yang belum jelas asalnya. Ketika kecepatan dimanfaatkan untuk membangun gelembung-gelembung citra untuk kepentingan pragmatis. Maka ketika itu pula petaka itu hadir. Dunia sedang menghadapi masalah baru ketika hal tersebut tidak mampu diatasi



Ferdian Paleka dan Ambiguitas Sikap Kita

Beberapa tahun lalu publik dibuat geram dengan aksi tidak beradab seorang Ferdian Paleka, seorang *youtuber* asal Bandung. Sebuah aksi nge-prank beberapa transpuan dengan memberikan bingkisan berisi sampah. Hal tersebut sontak membuat banyak netizen geram. Setelah beberapa hari menghilang, akhirnya dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Kejadian di atas mengingatkan saya pada suatu agenda *Youth Camp* antar agama di Jogja beberapa tahun lalu. Sebuah agenda yang diikuti oleh para remaja sebaya lintas agama dan gender. Dalam agenda tersebut, panitia membuat aturan bahwa satu kamar tidak boleh dari satu daerah. Tujuannya agar saling mengenal. Ketika diumumkan, ternyata saya harus satu kamar dengan teman laki-laki yang secara orientasi seksual berbeda (gay).

Semalaman saya tidak bisa tidur karena di hantui rasa takut dan imajinasi buruk. Hebatnya, pagi itu teman sekamar saya bisa tahu. Bahwa saya tidak bisa tidur dan dia berkata, "*Jangan khawatir, mas, saya tidak seperti yang mas bayangkan kok.*"

Seketika itu saya merasa malu dan gugup mendengar ucapan tersebut. Ingatan atas kejadian tersebut menjadi penanda akan keterbukaan saya pada perbedaan orientasi seksual. Tentunya proses itu setelah melalui dialog dan interaksi yang panjang.

Ketika menonton video Ferdian, saya juga termasuk orang yang ikut geram. Dalam kondisi begini, kok tega-

teganya ada orang berbuat bodoh begitu. Tapi seketika itu juga saya bercermin. Bukannya selama ini kita belum benar-benar menganggap orang yang punya orientasi seks berbeda adalah manusia normal seperti kita?

Kejadian beberapa tahun lalu, yang membuat saya begitu panik, penuh dengan imajinasi yang buruk, menganggap mereka adalah makhluk yang tidak normal adalah *stereotype* yang kerap kali masih menempel dalam diri kita.

Padahal sangat mungkin anggapan atau imajinasi yang muncul sangat tidak berdasar. Contohnya teman sekamar saya tadi. Bagaimana mungkin menganggap dia tidak normal? Wong teman saya tadi kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan jurusan favorit yang diidam-idamkan banyak anak muda.

Bagaimana mungkin orang tidak normal bisa meraih itu? Sebuah gugatan personal kala itu. Bahwa dia punya orientasi seksual berbeda? Iya. Akan tetapi apa frasa tidak normal pantas disandingkan padanya?

Kita kerap kali mengidap cara pandang yang tidak adil terhadap kelompok minoritas seksual. Saat menonton video Ferdian, saya geram tetapi dalam diri ini mulai bertanya, bukannya selama ini praktik dan perilaku kita tidak jauh berbeda dengan Ferdian? Sikap fobia terhadap mereka yang berbeda bukannya telah menjalar dari ruang publik ke ruang privat kita?

Apa bedanya kita dengan Ferdian?

Ada empat argumen yang menjelaskan bahwa kita tidak jauh beda dengan Ferdian. Tentunya jika anda bukan bagian dari keempat hal tersebut, maka Anda bukan bagian dari "kita" yang saya maksud dalam tulisan ini. Atau bisa jadi ini cuma terjadi pada saya.

Pertama, anggapan tentang ketidak-normalan terhadap transpuan. Anggapan tersebut berimplikasi pada ketidakadilan atas sikap kita kepada mereka. Dalam

sebuah perjalanan mobil bersama teman kantor, kami didatangi seorang transpuan di sebuah lampu merah yang hendak mengamen.

Kondisi pada saat itu kaca jendela mobil terbuka karena salah satu dari teman sedang merokok. Ketika transpuan itu datang, tiba-tiba pada heboh dan meminta teman yang di sebelah pintu untuk segera menutup kaca jendela. Semua sepakat. "*Sudah, ndak usah dikasih.*"

Padahal kondisi yang sama juga kita alami pada lampu merah sebelumnya. Ketika ada seorang laki-laki tua mengamen, dengan *enteng* kami memberikan uang receh pada mereka.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kita kerap kali bersikap tidak adil karena didorong atas anggapan bahwa mereka yang berbeda secara seksual itu tidak layak mendapat empati. Padahal normal atau tidaknya seorang, terutama yang berkaitan dengan seks, adalah bagian dari kuasa rezim pengetahuan.

Mayoritas menguasai definisi atas mana yang normal dan mana yang tidak. Sebuah kondisi dalam dunia ilmu pengetahuan yang telah lama mengalami perubahan. Mereka yang berbeda tidak lagi dianggap sakit atau tidak normal.

Sedangkan yang *kedua*, kita kerap kali melakukan kekerasan verbal (*simbolik*) dengan menyebut identitas mereka secara minor. Kata *bencong* contohnya. Kata tersebut biasanya kita tempelkan pada orang yang tidak mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu hal, contohnya: "*Ah, bencong kamu, gitu saja gak berani.*"

Selain itu, kata tersebut sering kali digunakan untuk mengasosiasikan sesuatu hal yang berkaitan dengan umpatan atau makian. Mengapa hal yang sifatnya verbal itu penting untuk jadi perhatian? Bukannya akar kekerasan itu berasal dari yang verbal kemudian beranjak pada kekerasan psikis dan berujung pada kekerasan fisik?

Sedangkan yang *ketiga*, meski tidak bermaksud membandingkan dengan beberapa negara maju, ruang publik di Indonesia tidak berpihak pada kelompok

minoritas *sexual*. Dalam konteks itu sebenarnya bisa dipahami bagaimana cara pandang negara.

Harus diakui bahwa negara kerap kali belum siap menghadapi perbedaan dalam hal tersebut. Terbukti dengan rentetan kejadian persekusi terhadap minoritas seksual. Ketidaksiapan dan terkesan abainya negara didorong atas berbagai faktor.

Dari agama, hukum, psikologi, dan budaya. Bahwa ketidaksukaan atau ketidaksetujuan atas nama apa pun boleh saja ditujukan kepada para transpuan. Tetapi, sebagai bagian dari warga negara, tetap saja tak boleh mereka direndahkan dan didiskriminasi.

Apalagi Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik lewat UU No. 12 tahun 2005. Termasuk di dalamnya ada kelompok-kelompok minoritas seksual.

Konsekuensinya, Indonesia menjunjung tinggi pemenuhan HAM lewat hak kemerdekaan, kewarganegaraan, kedudukan yang sama di mata hukum, pekerjaan, berserikat dan berkumpul, hingga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Keempat, dalam kondisi krisis seperti sekarang, kelompok transpuan masih belum dianggap kelompok rentan yang terdampak Covid-19. Implikasinya, mereka tidak perlu dibantu.

Kita bisa saksikan dalam media *online* maupun media sosial kita. Solidaritas warga, komunitas atau organisasi sosial masih sangat minim memasukkan transpuan dalam kelompok yang layak mendapat bantuan.

Padahal kalau boleh jujur, dalam kondisi sebelum pandemi saja mereka susah sekali mencari nafkah. Kelompok transpuan adalah kelompok rentan yang kehadirannya kerap kali dipandang sebelah mata baik oleh masyarakat maupun negara.

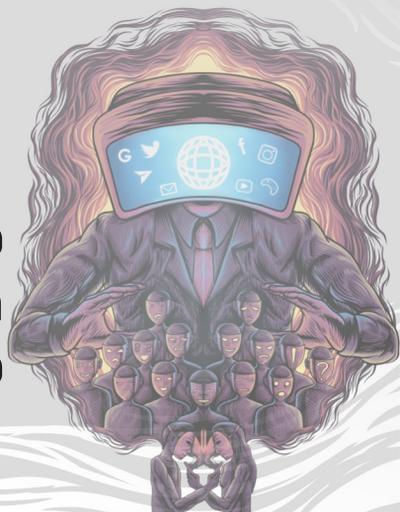
Perilaku diskriminatif dan pelecehan sering kali mereka dapatkan sehari-hari. Apalagi dalam kondisi sekarang. Mereka harus berjuang ekstra untuk tetap bisa bertahan hidup di tengah ketidakpastian.

Gambaran di atas menjelaskan adanya ambiguitas sikap pada diri kita. Di satu sisi kita marah pada Ferdian. Di sisi lain kita kerap kali mempertontonkan sikap tidak adil terhadap mereka yang berbeda atau minoritas seksual.

Tetapi apa pun itu, kejadian Ferdian memberi hikmah atas pentingnya membiasakan diri bersikap adil sejak dalam pikiran meskipun sulit. Mengingat sejak kecil imaji tentang transpuan sudah mendarah daging.

Semoga saja kejadian di atas membuka mata kita bahwa transpuan adalah bagian dari warga yang tetap harus dilindungi dan berhak mendapatkan rasa empati yang tulus.

Horornya Perawat dalam Film Indonesia



Pada saat pandemi saya terpaksa menjalani banyak aktivitas di rumah. Sebuah kondisi yang tidak mudah karena menggeser banyak aktivitas di luar masuk dalam rumah. Butuh hiburan ekstra untuk menghilangkan panik atas berita di media yang tidak menggembirakan. Salah satunya terkait tingginya angka tenaga medis yang terpapar Covid-19 dan berujung pada kematian.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, per 06/05/2020, sudah ada 55 tenaga medis meninggal dunia di Indonesia. Mereka yang wafat terdiri 38 dokter dan 17 perawat. Tenaga medis menghadapi kondisi sulit. Dari kelangkaan alat pelindung diri (APD), pengusiran dari tempat tinggal, hingga penolakan jenazahnya. Survei dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI mencatat, pada April 2020, terhadap lebih dari 2.000 perawat menunjukkan setidaknya 135 perawat pernah diusir dari tempat tinggalnya.

Sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan. Besarnya peran tenaga medis di tengah pandemi tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka dapatkan. Kondisi tersebut seketika menyadarkan saya akan pentingnya peran tenaga medis, terutama perawat. Perawat adalah profesi yang banyak disorot hari ini. Mereka sering kali mengalami diskriminasi dan tindak intimidatif.

Di tengah informasi yang tidak menggembirakan di atas, saya kerap kali menggunakan waktu di rumah untuk menonton film-film lama. Menonton film adalah aktivitas yang menyenangkan. Mengingat sudah tidak mungkin lagi kita ke bioskop untuk menonton film terbaru. Satu per satu saya membuka folder-folder film. Dari komedi, roman, sampai horor.

Secara tidak sengaja saya melihat sebuah film horor Indonesia, *Suster Ngesot*. Ada sesuatu hal yang membuat saya mengerutkan dahi dan mengumpat dalam hati. Bagaimana mungkin perawat digambarkan tidak pantas begini?

Karena film tersebut pula akhirnya saya berusaha mencari dan mengumpulkan film sejenis. Dalam jangka waktu 2001-2012, terdapat 7 (tujuh) film sejenis. Semua film merepresentasikan kehadiran seorang perawat.

Dari film kita tahu bagaimana posisi sebuah komunitas direpresentasikan. Baik komunitas profesi atau komunitas sosial lainnya. Ariel Heryanto dalam sebuah diskusi tentang *Historiografi Indonesia yang Rasis* mengungkapkan bahwa film-film komersil dibuat bukan untuk tujuan politik, tetapi untuk mencari uang. Film bisa menghasilkan uang jika hal tersebut menyenangkan orang dan orang tersebut mau membayar.

Dengan kata lain, film secara metodologis penelitian menarik untuk diperhatikan karena film merupakan kristalisasi atau penegasan atas norma dominan yang ada di masyarakat. Pembuat film tidak mau risiko membuat film yang aneh-aneh. Mereka hanya menegaskan kembali apa yang sudah diyakini di masyarakat.

Film mungkin tidak mencerminkan realitas, tetapi jelas menegaskan norma-norma yang sudah dominan.

Dari uraian di atas, bisa jadi film-film horor tentang atau yang menggambarkan perawat merupakan sebuah penegasan atas norma dominan yang ada di masyarakat. Melalui tulisan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana

profesi perawat yang mulia digambarkan dalam film Indonesia.

Hasil pembacaan awal, representasi perawat lebih banyak dimunculkan dalam film horor Indonesia. Saya tidak tahu betul apa yang melatarbelakangi profesi ini lebih banyak dihadirkan dalam film horor.

Dugaan saya sementara, karena aktivitas horor yang identik dengan orang meninggal lebih banyak menghadirkan rumah sakit sebagai *setting*/lokasi dalam *scene* film selain kuburan. Ketika rumah sakit dijadikan *setting*, maka secara otomatis profesi perawat mengisi ruang tersebut.

Film horor dan representasi perawat

Film horor di Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam perkembangannya. Tercatat *Tengkorak Hidoep* (1941) karya *Tan Tjoei Hock* dan *Lisa* karya M. Shariefuddin yang diproduksi tahun 1971 yang menjadi peletak dasar genre film horor di Indonesia.

Wicaksono & Asyhadie (2006) menjelaskan adanya perbedaan penentuan film horor pertama Indonesia itu tampaknya terjadi karena pendasaran definisi horor yang dipakai berbeda. *Tengkorak Hidoep* menampilkan sebuah *horror of the demonic*, monster yang bangkit dari kubur dan ingin membalas dendam pada reinkarnasi orang yang telah membunuhnya dalam sebuah pertarungan. Sementara *Lisa* merupakan sebuah *horror of the personality*, yang menampilkan seorang ibu tiri yang meminta seseorang membunuh anak tirinya. Selanjutnya sang ibu dihantui bayangan anak tirinya yang sesungguhnya masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat.

Apabila kita mengambil *Lisa* sebagai film horor pertama, maka sejarah film horor Indonesia dimulai oleh *horror-of-personality*. Sedangkan apabila kita menerima *Tengkorak Hidoep* sebagai film horor pertama kita, maka sejarah film horor Indonesia dipelopori

oleh film berjenis *horror of the demonic* atau horor hantu. Memasuki tahun 2000an, film horor Indonesia memulai era baru. Generasi sineas baru yang muncul sebagian besar tidak memiliki ikatan langsung dengan sejarah film horor Indonesia sebelumnya.

Salah satunya adalah *Jelangkung* (2001) karya Rizal Mantovani dan Jose Purnomo langsung mencuat, memberi sentuhan yang berbeda dengan mengandalkan kekuatannya dalam fotografi, editing dan suara. Film ini menandai kembalinya penonton ke bioskop-bioskop. Film tersebut mencapai rekor 1,5 juta penonton. Selain itu, film-film horor yang diproduksi dan diedarkan tahun 2006-2007 yang secara meyakinkan mampu meraup penonton lebih dari 500 ribu orang. Maka tidak mengherankan dari sisi komersial, film-film horor ini menjadi andalan bagi para produser yang ingin segera mendapatkan kembali modalnya dan mendapatkan keuntungan dengan cepat.

Dari sekian banyak film horor yang muncul, ada beberapa film bertema atau menghadirkan representasi perawat. Film tersebut dimunculkan oleh para sineas film dan itu ditandai dengan kemunculan film *Jaelangkung* dan ditegaskan dalam film *Suster Ngesot*.

Kedua film tersebut menjadi penanda direpresentasikan film hantu dalam sosok perawat. Adapun beberapa judul film sejenis terdiri dari: *Kutukan Suster Ngesot* (2009), *Suster Keramas* (2009), *Suster Keramas* (2011), *Terowong Rumah Sakit* (2009), dan *Kembalinya Suster Gepeng* (2012).

Representasi yang eksploitatif dan seksis

Representasi sebagai sebuah konstruksi sosial mengharuskan kita mengeksplorasi pembentukan makna tekstual dan menghendaki penyelidikan tentang cara yang dihasilkannya makna pada beragam konteks (Barker: 2008). Representasi memiliki materialitas tertentu.

Mereka melekat pada bunyi, prasarti, objek, citra, buku, majalah, program televisi dan melalui film tentunya. Berdasarkan pengamatan saya terhadap beberapa film di atas, tergambar beberapa representasi sosok perawat atau yang biasanya disebut *suster* yang cenderung tidak tepat, *eksploitatif* dan *seksis*.

Pertama, perawat yang dihadirkan sebagai hantu dalam film dan hampir semuanya diperankan oleh perempuan. Hatib Kadir (2017) dalam sebuah artikel menjelaskan mengapa hantu sering kali diperankan oleh perempuan. Di situ dijelaskan bahwa hampir semua struktur kekerabatan di Asia Tenggara dan Jawa bersifat bilineal.

Dalam masyarakat bilineal, harta warisan rumah dan urusan domestik biasanya diserahkan kepada anak bungsu atau kepada perempuan. Oleh karena itu, perempuan sering kali digambarkan menjadi penghuni rumah.

Bahkan, kelak hingga mati, ia masih menghantui tata urusan warisan di generasi selanjutnya. Struktur masyarakat tersebut secara tidak sadar menempatkan secara dekat representasi hantu dan perempuan dalam sebuah film.

Kedua, film-film tersebut lebih banyak menonjolkan keseksian tubuh. Perawat perempuan dalam film hadir dalam wujud *sexy* dan menggoda. Tubuh perempuan dianggap ornamen. Dalam konteks budaya, hal tersebut didasarkan pada suatu pandangan yang menganggap bahwa norma laki-laki yang menjadi pusat (*center*) dari relasi-relasi sosial yang ada, sehingga hampir bisa dipastikan bahwa perawat perempuan yang sering kali dihadirkan dan mengalami eksploitasi. Kehadiran perawat laki-laki dibuat absen. Padahal faktanya perawat laki-laki cukup banyak.

Ketiga, adanya humor yang seksis. Dalam setiap adegan film-film tersebut terdapat humor-humor yang cenderung merendahkan perempuan. *LaFrance & Woodzicka (1998)* menyatakan bahwa humor yang sifatnya

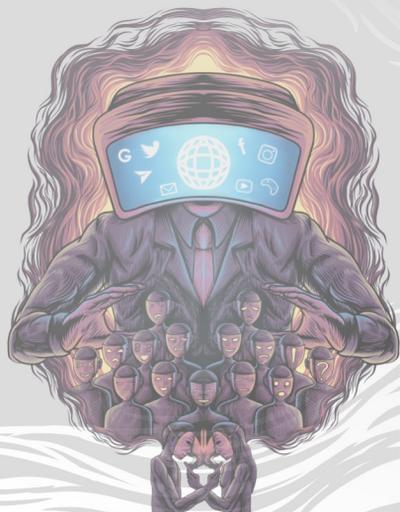
merendahkan, menghina, hingga mengobjektifikasi seseorang telah masuk ke dalam humor seksis.

Humor semacam ini hanya akan melanggengkan pengobjektifkasian perempuan atas nilai-nilai patriarkis. Hal tersebut juga akan memperparah stigma bahwa tubuh perempuan dapat dieksploitasi sedemikian rupa.

Gambaran di atas memang film-film lama jauh sebelum pandemi Covid-19. Sebuah representasi yang jauh dari kata baik. Tentunya melalui pandemi ini orang mulai banyak yang sadar dan terbuka betapa pentingnya posisi perawat. Tidak berlebihan ketika disebut sebagai pahlawan.

Dari hal tersebut, ada harapan akan ada film yang mengangkat sisi kepahlawanan mereka. Alih-alih mengisi ruang representasi atas mereka yang selama ini dicitrakan kurang tepat dan baik. Beberapa hari yang lalu teman-teman perawat memperingati Hari Perawat Internasional, melalui artikel ini saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Jasa dan peranmu akan dikenang sepanjang sejarah.

Ketika Cyber Sex jadi Solusi untuk Lajang Menjelang New Normal



Pandemi Covid-19 ini telah banyak membuat orang depresi dan stres. Perubahan banyak hal dan adaptasi dengan hal-hal baru adalah kondisi yang membuat banyak orang tidak siap. Bahwa ada sebagian orang yang berusaha bijak, dengan berkata wabah ini membuat kita makin dekat dengan keluarga, makin banyak waktu berkualitas dengan keluarga. Percayalah bahwa hal tersebut adalah upaya menghibur diri agar level stresnya tidak semakin akut. Saya termasuk orang yang berusaha agar punya aktivitas yang menyenangkan di rumah. Baik dengan keluarga atau dengan teman-teman.

Dalam satu kesempatan, terjadi sebuah obrolan di *WhatsApp Group* (WAG) dengan beberapa teman masa kuliah dulu. Sebuah perbincangan *ngalor-ngidul* (tidak tentu arah) orang Surabaya menyebutnya. Hal tersebut bagian dari mencari hiburan.

Dalam WAG tersebut, hampir semuanya laki-laki pembicaraannya tidak jarang terkait hal-hal yang berbau seks. Obrolan-obrolan yang menurut saya cukup menghibur di tengah info Covid-19 yang masih saja menjadi teror.

Dalam obrolan tersebut, ada beberapa teman yang sampai hari ini belum menikah. Tentunya bagi teman-teman lain yang sudah menikah adalah kesempatan untuk *bully* mereka yang belum menikah. Dari urusan siapa yang menemani ketika kerja dari rumah sampai urusan kebutuhan seks mereka.

Obrolan saling ejek pun terjadi. Sampai pada pembahasan siapa yang bakal memenuhi kebutuhan seks mereka. Agak terkesan tabu sih perbincangan terbuka tentang seks di budaya kita. Tapi obrolan tentang itu setidaknya yang mendorong saya menulis cerita ini.

Dalam obrolan tersebut, ada satu teman yang memang terkenal apa adanya, *cablak* (ngomongnya suka spontan) dan seperti sudah membuang jauh-jauh rasa gengsinya. Sebut saja si Fulan namanya, di usianya yang relatif matang, dia tidak juga memutuskan untuk menikah. Saya tidak tahu apa yang membuatnya tidak segera menikah dan andaipun saya tahu, saya juga tidak akan menceritakannya di sini.

Ketika teman-teman secara bertubi-tubi menyerangnya terkait apa aktivitas dia ketika dia harus di rumah kontrakannya di masa pandemi begini. Dengan santai dia menjawab, "*ya gimana lagi wong gak punya istri, ya kalau lagi pingin ya lihat bokep atau kengan di aplikasi chatting.... ha... ha...*"

Group makin menjadi-jadi. Ada yang makin semangat mem-*bully*, ada pula yang dengan gaya bijaknya menasihati. Bagi kebanyakan orang, pembicaraan tentang seks memang dianggap tidak patut dibicarakan di ruang publik. Hal tersebut dianggap tidak sopan dan jorok. Tapi hal tersebut tidak berlaku untuk teman saya tadi.

Bagi dia, mungkin itu salah satu aktivitas yang menolongnya dan menghiburnya di masa pandemi ini. Pembicaraan tentang seks bagi kebanyakan orang masih dianggap perbuatan yang tidak patut dibicarakan dengan banyak orang. Jangankan banyak orang, berdua dengan pasangannya saja terkadang agak canggung.

Aktivitas *cyber sex* tentunya sudah tidak asing lagi bagi generasi milenial atau generasi di bawahnya. Hal tersebut ada karena ruang *cyber* (*cyber-space*) menyediakan layanan tersebut. Bagi generasi pra-internet, aktivitas tersebut pastilah asing karena mereka besar dan tumbuh tidak di era internet.

Salah satu anasir dari *cyber-sex* adalah fantasi seks yang dilakukan oleh partisipan dengan melukiskan tindakannya dan menanggapi lawan berbincang yang kebanyakan dalam bentuk tertulis dan dirancang untuk stimulasi seks maupun fantasi (Harley, 1996).

Fantasi adalah sebuah ruang privat dalam diri kita dan itu merupakan tempat yang paling jujur. Dalam ruang fantasi tersebut, kita bisa membayangkan apa saja yang kita sukai dan nikmati, namanya saja fantasi.

Mungkinkah jadi solusi?

Kebiasaan memanfaatkan situs porno atau aplikasi *chatting* sebagai bagian dari *cyber-sex* di masa pandemi ternyata meningkat lumayan signifikan. Hal tersebut didorong oleh anjuran atau larangan untuk *stay at home* dalam rangka menghambat laju virus. Dan peningkatan tersebut juga diikuti sisi buruk yakni pelecehan terhadap perempuan melalui daring.

Sebagaimana dikatakan Komnas Perempuan dan LBH APIK, Iqraa dan Mazuma dalam Magdalene (24/4/2020) yang berasumsi bahwa pelaku merasa bosan di tengah karantina sehingga timbul niat jahat untuk melecehkan perempuan.

Yang ingin saya ulas bukan terkait hal tersebut tetapi bagaimana aktivitas *sexual* di dunia *cyber* dan mungkinkah bisa menjadi solusi untuk para lajang tanpa harus melecehkan atau merugikan siapa pun?

Ada beberapa poin pembicaraan yang menarik untuk saya ulas dalam obrolan di WAG tadi. Ketika banyak teman-teman mem-*bully* si Fulan tadi, dia spontan melakukan pembelaan. Dengan obrolan yang makin tidak menentu, dia berseloroh, "*Mending aktivitas di internet bos, tidak menyebabkan hamil di luar nikah dan gak kena penyakit HIV, ha...ha...*".

Jika kita mau jujur, ungkapan tersebut ada benarnya. Dalam kondisi nyata, masyarakat kita kerap mengalami persoalan hubungan seks bebas yang tidak sehat dalam hal fisik maupun psikologi, seperti penularan penyakit kelamin, kehamilan, aborsi, dan perasaan terluka ditinggalkan pasangan. Meski terkesan bercanda, ungkapan itu benar adanya bahwa *cyber sex* dianggap aman karena mampu menjauhkan dari sejumlah perkara di dunia nyata yang kerap dikaitkan dengan seks yang berpenyakit.

Hal di atas seperti yang diungkapkan Arthur Kroker ketika menjelaskan karakteristik *cyber sex* dalam sebuah frasa yang menarik: "*sex without secretions*" (disitir dalam Bell: 2000, Irawanto: 2017), yakni aktivitas seks tanpa pertukaran cairan tubuh tetapi pelakunya bisa menikmati seperti berhubungan secara langsung. Gambaran atas aktivitas seksual dan justifikasinya di atas yang mendorong saya untuk mengajukan pertanyaan. Mungkinkah *cyber-sex* bisa menjadi solusi di tengah kebosanan? Solusi bagi populasi lajang yang belum siap untuk menikah. Terdengar agak ngawur tetapi faktanya, si Fulan tadi mengakui itu. Alih-alih menghindari penyakit kelamin atau persoalan lain, dia bisa jadi mewakili banyak orang di luar sana yang tidak siap untuk menikah. Mengingat menikah bukan hanya persoalan seks saja.

Bagi si Fulan, *cyber-sex* menyelamatkannya. Meski konsekuensinya jelas dianggap bertentangan dengan ajaran agama, budaya bahkan negara. Praktik *cyber-sex* menjadi tantangan bagi agama dan budaya kita.

Kecepatan teknologi harus dibarengi dengan kemampuan membangun justifikasi yang otoritatif atas perilaku seks di dunia *cyber*. Tujuannya adalah agar agama dan budaya tidak mengalami kegagalan menghadapi masa depan (*shock future*) yang terus memunculkan praktik-praktik baru. Tidak cukup menghalau perubahan hanya dengan menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kegagalan atas realitas banyak dicontohkan negara melalui Menkominfo, yang seolah tidak ada solusi

lain selain sensor dan blokir situs atau akun. Padahal menghadapi hal tersebut, generasi hari ini lebih cerdas. Dengan sebuah program yang tidak terlalu mahal pun blokir bisa ditembus. Jadi mending hadapi perubahan ini dengan tangan terbuka dan pahami kondisinya.



Millennial, Cybersex dan Pandemi Covid-19

Rasa bosan dan lelah karena berdiam diri di rumah terlalu lama kerap kali dihadapi oleh para *millennial*. Mereka yang terbiasa aktif dan mempunyai mobilitas yang tinggi tiba-tiba dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas mereka. Mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri menghadapi situasi ini. Salah satu hal yang kerap menjadi ruang aktualisasinya adalah ruang siber. Ruang tersebut akan banyak membantu mengusir kebosanan mereka di tengah kondisi krisis yang belum juga membaik.

Mereka tidak akan canggung berinteraksi di ruang siber dengan berbagai fungsi. Berinteraksi yang sifatnya kolektif maupun privat. Salah satu hal yang kerap kali dijadikan sebagai ruang mengusir kebosanan di tengah pandemi adalah aktivitas *cybersex*.

Seiring perkembangan dan meluasnya penggunaan internet memunculkan revolusi seksual yang memungkinkan mereka melakukan eksplorasi seksual yang melampaui batas-batas budaya, gender, usia, agama, bangsa, bahkan bentuk fisik. Ekspresi diri yang erotis dapat mereka salurkan melalui *email*, sosial media, aplikasi digital, webcam interaktif, atau teknologi sentuhan (*sense of touch*). Karena anonimitas ruang siber, mereka dapat mengekspresikannya dengan atau tanpa identitas asli mereka.

Adanya peningkatan akses internet yang berkaitan dengan *sex* ditegaskan dalam sebuah data situs pornografi

pornhub pada 20 Maret 2020 memperlihatkan ada peningkatan *traffic* 13,7 persen di era pandemi dibandingkan bulan sebelumnya. Bisa jadi peningkatan *traffic* ini terjadi karena situs porno ini menawarkan akses gratis akun premium selama sebulan.

Selain itu juga, berbagai data juga menunjukkan aktivitas penggunaan internet mengalami peningkatan yang pengaksesnya juga banyak dari kaum *millennial*.

Millennial dan Varian *Cyber-Sex* dalam ruang digital

Generasi *millennial* yang hidup di era digital pasti mudah sekali adaptasi dengan kondisi baru. *Cybersex* bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia, tetapi prediksi saya dalam kondisi yang mengharuskan orang untuk jaga jarak dan mengurangi intensitas bertemu seperti saat ini akan terjadi peningkatan aktivitas seksual di ruang siber. Ruang siber (*cyber-space*) menyediakan layanan tersebut.

Salah satu anasir dari *cybersex* adalah fantasi seks yang dilakukan oleh partisipan dengan melukiskan tindakannya dan menanggapi lawan berbincang yang kebanyakan dalam bentuk tertulis dan dirancang untuk stimulasi seks maupun fantasi (Harley, 1996). Fantasi adalah sebuah ruang privat dalam diri kita dan itu merupakan tempat yang paling jujur. Dalam ruang fantasi tersebut, kita bisa membayangkan apa saja yang kita sukai dan nikmati, namanya saja fantasi.

Cybersex bisa jadi menyediakan ruang untuk mengaktualisasikan fantasi. Berbagai aktivitas seksual bisa dilakukan. Piliang (2007) mengulas aktivitas seksual yang kerap dilakukan di ruang *cyber*. Dalam *cybersex* terdapat berbagai pintu masuk ke dalam berbagai bentuk *simulacrum* seks dan seksualitas, berbagai tindak dan adegan seksual (berupa foto, video, dan film), yang 'menawarkan' berbagai aktivitas seksual: 'melihat' (*voyeurism*); 'role playing' atau memainkan peran seksual tertentu; 'permainan seksual' (*adult sexual gaming*); kegiatan seksual 'terhadap' internet (*cyber-fetishism*), dan; kegiatan seksual jarak jauh melalui internet (*teledildonic*).

Cybersex, sebuah tantangan zaman

Berbagai aktivitas *cybersex* tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai budaya (etika dan adat) dan agama (fiqih, akhlak, iman), tetapi lebih jauh lagi mengancam otoritas agama dan teks-teks suci tentang kesucian dan keadaban manusia. Agama atau norma sosial yang hidup di masyarakat yang mengatur batasan-batasan kini berhadapan dengan sebuah dunia yang di dalamnya tidak ada aturan, norma dan batasan itu sendiri.

Pastinya tidak cukup menghalau perubahan hanya dengan menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kegagapan atas realitas banyak dicontohkan negara melalui Menkominfo, yang seolah tidak ada solusi lain selain sensor dan blokir situs atau akun. Padahal menghadapi hal tersebut generasi hari ini lebih cerdas. Dengan sebuah program yang tidak terlalu mahal pun blokir bisa ditembus.

Tatanan sosial baik agama maupun budaya masyarakat mengatur tubuh, organ tubuh, hasrat dan penggunaan tubuh kini sedang menghadapi fenomena baru tersebut. Dalam konteks tersebut setidaknya ada dua hal yang hendak saya ulas yang berkaitan dengan *cybersex*.

Pertama, *cybersex* dianggap aman karena mampu menjauhkan dari sejumlah perkara di dunia nyata yang kerap dikaitkan dengan seks yang berpenyakit. Hal di atas seperti yang diungkapkan Arthur Kroker ketika menjelaskan karakteristik *cybersex* dalam sebuah frasa yang menarik: "*sex without secretions*" (disitir dalam Bell : 2000, Irawanto : 2017). Yakni aktivitas *sex* tanpa pertukaran cairan tubuh tetapi pelakunya bisa menikmati seperti berhubungan secara langsung.

Kedua, konsep tentang aurat dalam dunia siber yang bergerak. Tubuh dalam aturan agama diatur sedemikian mungkin. Ada batasan 'halal'/'haram', mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak. Tubuh hanya dapat dilihat dan disentuh oleh orang sah secara agama (suami-istri).

Dalam konteks *cybersex*, hal tersebut mengalami perubahan. Piliang (2007) menegaskan bahwa tubuh dan aktivitas seksual yang ditampilkan di dalam berbagai posisi, pose, detail dan ekspose kini menjadi milik siapa saja yang menginginkannya. Bahkan, masturbasi, yang dulu merupakan 'wilayah pribadi' kini dipertontonkan pada publik.

Cybersex menyediakan itu semua. Sebuah ruang yang bebas dan pengguna terkadang bisa menyembunyikan identitas diri. *Cybersex* seolah menjadi ruang resistensi bagi orang-orang di dunia nyata. Sesuatu hal yang tidak mungkin anda kerjakan di dunia nyata bisa dikerjakan di dunia siber. Terutama yang berkaitan dengan *sex*.

Dua hal tersebut menjadi fenomena yang menarik. Apalagi intensitasnya akan diprediksi meningkat ketika memasuki era *new normal*. Orang akan mengurangi interaksi langsung dan akan banyak bergulat di dunia digital. Sebuah tantangan bagi negara agama, dan tatanan sosial di masyarakat. Semoga kondisi tersebut tidak menjadi petaka di masa depan dan generasi kita mampu keluar dari jebakan dunia baru yang bergerak begitu cepat.



Panic-gogy, Belajarlh dari Fabel Kancil Vs Siput !

Istilah *Panic-gogy* diambil dari sebuah catatan Anya Kamenetz (2020) dalam artikelnya berjudul *Panic-gogy': Teaching Online Classes During the Coronavirus Pandemic*. Istilah tersebut berusaha menggambarkan kondisi saat ini, di mana wabah Covid-19 menghentikan aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan. *Panic-gogy* dari kata *panic* dan *pedagogy* (untuk panik + pedagogi). Diksi tersebut menjelaskan sebuah kondisi yang mengharuskan kita semua segera beradaptasi pada kondisi baru. Sebuah kondisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, aktivitas pembelajaran beralih dari pembelajaran di ruang kelas menjadi pembelajaran daring.

Hal tersebut hampir terjadi di semua level pendidikan. Di Indonesia, Telkomsel mencatat lonjakan kenaikan komunikasi khususnya layanan *broadband* tertinggi mencapai 16% sejak masyarakat dan pelaku industri mulai menjalankan himbauan dari Pemerintah RI untuk beraktivitas dari rumah guna menekan penyebaran pandemi Covid-19. Pemicunya adalah tumbuhnya pengguna aplikasi belajar berbasis daring (*e-learning*) seperti Ruang Guru, aplikasi yang tergabung dalam Paket Ilmupedia, situs *e-learning* kampus dan *Google Classroom*.

Sebuah kondisi yang banyak orang menyebut, Covid-19 adalah penyebab yang mendorong transformasi digital bisa begitu cepat di Indonesia. Wabah ini menjadi katalis utama dari transformasi digital yang bergulir dengan kencang. Selain itu juga, wabah ini menjadi pembuktian

bagi Mas Menteri (Panggilan Akrab Mendikbud), orang yang dianggap berhasil memanfaatkan teknologi untuk melakukan perubahan sosial melalui Go-Jek. Kali ini bisakah Mas Menteri melakukan hal yang revolusioner di tengah kondisi yang tidak normal begini. Meskipun menyamakan Gojek dan Kemendikbud bukan *apple to apple*, karena Gojek adalah bisnis sementara Kemendikbud lebih dari itu. Justru kondisi ini menjadi tantangan tersendiri baginya. Semua orang menunggu langkah-langkah inovatifnya selain menggunakan TVRI sebagai TV untuk pembelajaran.

Internet dan kecepatan

Thomas L. Friendmen dalam bukunya "*The World is Flat*" menggambarkan bahwa proses demokratisasi internet yang menyebar ke seluruh dunia membuat semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengonsumsi dan memanfaatkan informasi. Dunia hari ini telah didatarkan, semua orang di belahan dunia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menyampaikan apa yang mereka mau. Dalam buku tersebut digambarkan bahwa kita telah memasuki globalisasi 3.0 yang terdapat 10 pendataran.

Globalisasi 3.0 ini menyusutkan dunia dari ukuran kecil menjadi sangat kecil sekaligus mendatarkan permainan. Kalau motor penggerak globalisasi 1.0 adalah mengglobalnya negara; dan motor penggerak globalisasi 2.0 adalah mengglobalnya perusahaan, uniknya, motor penggerak globalisasi 3.0 adalah kekuatan baru yang bekerjasama dan bersaing secara individual dalam kancan global. Individu dengan *smartphone* yang dimiliki bisa berinteraksi tanpa menghiraukan jarak. Itulah gambaran dunia hari ini. Kecepatan yang dimediasi oleh internet dan ruang digital dianggap banyak merubah dunia. Kecepatan dianggap sebagai kata kunci dari perubahan. Akan tetapi apakah yang cepat yang selalu menang? Yang cepat yang akan menguasai banyak hal? Pembelajaran digital menyelamatkan keberlangsungan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Meski kerap dianggap tetap

menghadapi persoalan karena tidak semua institusi pendidikan dianggap siap, tetapi perangkat digital banyak membantu mengatasi persoalan-persoalan pendidikan di tengah wabah.

Kecepatan internet yang banyak membantu kembali proses komunikasi antara pendidik dan yang dididik. Internet secara cepat mengatasi proses komunikasi di banyak bagian dalam pendidikan. Anggapan bahwa akses internet banyak membantu proses pembelajaran memang benar akan tetapi hal tersebut akan memunculkan persoalan jika terdapat kebergantungan kepada aktivitas digital yang berlebihan.

Mitos Kancil vs Siput

Budayawan Seno Gumira Adjidarma pada perayaan Dewan Kesenian Jakarta ke 51 di Taman Izmail Marzuki, secara reflektif menyampaikan sebuah pidato kebudayaan. "Dalam gambar-gembar kenyingiran 4.0, terkesan betapa apa yang berlangsung dalam dunia industri telah dengan sendirinya menjadi gejala kebudayaan, yang memang tidaklah keliru, tetapi yang dalam pendapat saya tidak harus selalu secara harfiah bermakna adu kecepatan dan perihal kecepatan, manusia cukup sering tenggelam dalam mitos bahwa pencapaian terbaik adalah menjadi yang tercepat," Untuk membuktikan argumennya, secara cerdas Seno melogikakan dengan bercerita tentang Siput Vs Kancil. Siput, binatang yang dikenal begitu lambat. Peralnya, ketika kancil bertanya posisinya, siput yang di depannya selalu menjawab. Kita tahu jumlah Siput itu bukan hanya banyak, melainkan tak terhingga. Sehingga praktis sebenarnya Siput tersebut tidak perlu bergerak sama sekali untuk menjadi pemenang. Apa kaitannya cerita di atas dengan kondisi saat ini? Internet dan ruang digital yang menjadi simbol kecepatan faktanya memang banyak menciptakan perubahan di dunia ini.

Akan tetapi apakah yang cepat selalu jadi pemenang? cerita Kancil vs Siput memberikan gambaran yang menarik tentang itu. Yang tercepat tidak selalu mampu mengantarkan orang jadi pemenang. Begitu juga Siput,

meskipun lambat tidak selalu identik dengan kekalahan. Apa kaitannya dengan pembelajaran? Dalam kondisi yang tidak normal begini, berharap sepenuhnya pada internet tidak seutuhnya benar. Setiap hari anak-anak kita harus dipaksa menghadap layar monitor untuk alasan agar tidak tertinggal pelajaran. Bahwa internet hanyalah alat dan kita butuh itu. Tetapi dari kisah Kancil Vs Siput kita bisa ambil hikmah bahwa ada kerjasama tim dari makhluk lambat yang bernama Siput. Bahwa dalam konteks kompetisi hal tersebut tidak *fairplay*, itu urusan lain.

Tetapi satu hal yang harus menjadi perhatian adalah ada sisi lain yang perlu diperhatikan dalam pendidikan kita di tengah wabah. Bahwa dalam kondisi begini adalah momentum untuk menekankan pentingnya kerja tim dan saling peduli. Kita semua tidak berharap kondisi wabah begini anak-anak kita menjadi semakin egois atau *selfish*. Mereka lupa dengan dunia di luar mereka, menjadi a-sosial. Menjadi kecanduan dengan internet dan orang tua membiarkan dan memaklumi atas dasar alasan pembelajaran. Selain itu juga, sebulan berlalu jangan lagi ada curhat orang tua dan siswa atau mahasiswa akan beratnya beban belajar. Bagaimana caranya? ya ini tugas anda Mas Menteri untuk memikirkannya dan umpama anda gagal, hal tersebut bakal menambah deretan generasi millennial yang gagal menjadi pejabat negara.



Pinjaman Online dan Masyarakat yang Rapuh

Beberapa tahun terakhir, linimasa kita dihebohkan dengan banyaknya orang yang terjerat pinjaman *online* (pinjol). Beberapa merasa tertipu karena jumlah tagihannya melambung tinggi, beberapa lagi mengalami tekanan dan teror yang cukup membuat depresi.

Data pribadinya diumbar ke orang-orang terdekat dan diinfokan dengan kata-kata yang tidak senonoh. Kekejian tersebut dilakukan tanpa henti sampai si peminjam uang mengembalikan uang beserta bunganya. Mereka menteror tanpa ampun dan memperlakukan si peminjam secara tidak pantas.

Selain *hoax* yang menjadi persoalan pelik dalam interaksi digital kita hari ini, jerat pinjaman *online* juga selayaknya menjadi perhatian penting, terutama di Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, penawaran pinjaman *online* semakin marak. Banyak sekali pinjol ilegal yang memberikan pinjaman dengan bunga mencekik.

Masyarakat seolah dibuat tak berdaya atas tipu daya agen pinjol. Di tengah tekanan ekonomi yang berat, pinjol hadir dengan kemudahan pinjaman yang sebenarnya adalah jebakan di kemudian hari.

Rentenir digital

Istilah rentenir barangkali sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Di beberapa daerah, profesi rentenir ini juga biasa disebut dengan tengkulak (pemborong hasil panen), toke, ceti, dan lintah darah.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat kita, rentenir telah lama menjadi bagian dari denyut nadi ekonomi masyarakat. Namanya seringkali dihujat, tetapi kehadirannya sering kali dibutuhkan masyarakat kita.

Era digital sekarang ini, rentenir telah bertanformasi dan beroperasi secara *on line* dalam bentuk yang biasa disebut *fintech* (*financial technology*). Secara pola serupa dengan rentenir konvensional, yaitu meminjamkan uang kepada orang dengan bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi.

Kalau dalam banyak cerita rentenir di pedesaan tidak segan menyita barang yang dimiliki atau bahkan mengusir dari rumah, rentenir *online* era sekarang dinilai tidak kalah kejam.

Mereka memberi pinjaman dengan relatif sangat mudah, tidak perlu tatap muka, pinjaman langsung cair. Namun, apabila terlambat membayar, penagihan dilakukan terus menerus tanpa kenal waktu dengan bahasa yang cenderung sangat memojokkan, menghina, hingga dirasakan peminjam sebagai teror.

Selain itu juga, meminjam sama halnya dengan menyerahkan data privasi kita pada aplikasi pinjol. Aplikasi tersebut ternyata bisa mencuri data pengguna seperti nomor telepon dan beragam jejak digital. Sebuah kerugian yang besar, mengingat era digital seperti sekarang ini data privasi adalah aset yang sangat berharga.

Kecepatan dan masyarakat yang rapuh

Tinggi dan maraknya masyarakat pengguna jasa pinjol ilegal menegaskan bahwa masyarakat kita kian rapuh. Baik secara ekonomi maupun secara mental.

Tekanan ekonomi membuat orang cenderung mengambil jalan pintas tanpa berpikir dampak selanjutnya.

Mudahnya percaya dan tidak berpikir panjang adalah dampak dari persoalan mental masyarakat yang lebih senang hidup dengan pola instan dan cepat.

Paul Virilio, seorang filsuf asal Perancis, dalam bukunya *Speed and Politics: An Essay on Dromology (1986)* menyatakan, realitas kebudayaan dewasa ini digerakkan oleh logika dan obsesi akan kecepatan.

Kemajuan teknologi yang mendukung kecepatan dan akselerasi, seolah tidak memberi pilihan ruang dan semua hal dipaksa mengikuti arus yang serba cepat. Dalam konteks tersebut Virilio menyebutkan bahwa kemajuan juga memiliki cacat, yaitu kecenderungan totaliter.

Diksi “kecepatan” tidak selamanya baik. Justru semakin cepat semakin banyak risiko yang dihadapi. Mudahnya informasi tentang akses pinjol dan bahkan terkadang datang tanpa dicari adalah konsekuensi dari era digital. Informasi bergerak begitu cepat yang kecepatannya mampu membunuh nalar kritis dan reflektif seseorang.

Peminjam diperdaya oleh kemudahan yang hadir dari kecepatan teknologi. Tanpa berpikir panjang dan karena tekanan ekonomi, jerat pinjol pun akhirnya mampu memperdaya. Tidak jarang pula untuk membayar hutang pinjaman, orang menggunakan aplikasi pinjol yang lain untuk membayar. Tutup lubang gali lubang, bagai lingkaran setan dalam *simulacrum* digital yang tidak berujung.

Gambaran di atas menegaskan bahwa kecepatan yang menjadi ruh era teknologi hari ini bisa sangat mungkin menciptakan kekacauan dan kerusakan harmoni dalam masyarakat. Teknologi menyediakan sarana untuk mencuri data privasi secara mudah dan menjadikannya sebagai bahan teror yang jahat.

Ketika fenomena tersebut tidak mampu dihentikan oleh otoritas tertinggi kita, yakni negara. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada kekacaun-kekacaun baru yang secara tidak langsung disebabkan oleh kecepatan teknologi .

Dalam kondisi masyarakat kita yang rapuh seperti sekarang ini. Ekonomi yang lemah, ketidakpastian hukum atas pelanggaran hak privasi dan ketidakmampuan otoritas tertinggi beradaptasi dengan kecanggihan bisa jadi akan menciptakan petaka dahsyat yang kita semua tidak akan mampu menghindarinya.

Dalam kondisi begini negara perlu berperan atas perlindungan warganya. Terutama mereka-mereka yang dilemahkan dan dibuat rapuh oleh kondisi. Baik kondisi yang diciptakan oleh sistem ataupun non-sistem.



Populisme dan Demokrasi Digital

Peristiwa politik dan tema Teatrical adalah dua hal yang berkaitan dan mempunyai praktik kerja yang sama. Keduanya memerlukan aktor, *setting*, sutradara dan menyimpan pesan yang ingin disampaikan. Hal tersebut terbukti dengan munculnya frase "*aktor politik, siapa dalangnya dan sutradara di balik kejadian*" yang sudah lama bertebaran dalam wacana politik Indonesia. Bahkan kerap kali dikatakan bahwa banyak peristiwa politik yang *didesign* layaknya sandiwara yang naskahnya tidak tertulis.

Erving Goffman (1959) secara menarik membaca realitas keseharian dalam politik dengan menggunakan kacamata pagelaran. Dalam konteks politik apa yang diperankan atau ditampilkan di atas panggung oleh seorang aktor selalu syarat motif tertentu. Hal tersebut terkait erat dengan perilaku simbolik yang perwujudannya bisa berupa ekspresi diri (marah, menangis, simpati, kelucuan dan lain-lain), orasi politik atau perilaku lainnya. Tentunya kesemuanya diarahkan pada keinginan untuk meyakinkan khalayak.

Usaha-usaha untuk menampilkan pagelaran politik agar dipilih dan mendapatkan simpati rakyat dengan gaya komunikasi dan varian perangkat lainnya sudah menjadi hal yang wajar dalam wajah demokrasi hari ini. Hal tersebut kita sebut sebagai populisme, yakni gaya komunikasi di mana sekelompok politisi menganggap

diri mereka mewakili kepentingan rakyat, yang kemudian dikontraskan dengan kepentingan elit. Urbinati (2019, 20) “populisme terdiri dari penghancuran prinsip-prinsip demokrasi, mayoritas rakyat, dengan cara yang ditujukan untuk mengelu-elukan sebagian rakyat melalui pemimpinnya, yang menggunakan dukungan penonton untuk memurnikan pemilihan karakter prosedural dan formalistik mereka”.

Fenomena populisme menemukan momentumnya seiring dengan era demokratisasi internet. Sebuah era di mana banyak realitas termediasi melalui layar. Era tersebut seolah memberikan kebebasan banyak orang untuk bersuara dan merayakan pendapatnya secara terbuka. Demokrasi seolah menemukan alat yang strategis untuk membantu proses partisipasi warganya. Hal tersebut yang saya sebut demokrasi digital.

Demokrasi digital

Dunia digital yang dulu dielu-elukan dapat mendaratkan dunia dengan egaliter dan demokratis seperti dalam catatan Friedman (2014) dalam perjalanannya ternyata banyak menghasilkan anarki, kemelut politik dan kebisingan publik. Dalam konteks demokrasi, kehadiran media digital secara signifikan banyak merubah perilaku aktor politik. Di satu sisi demokrasi digital membantu proses transformasi demokrasi berjalan egaliter dan partisipatif tetapi di sisi lain kehadirannya banyak merusak tatanan nilai demokrasi itu sendiri.

Hal tersebut bisa kita jumpai dengan kemunculan para pemimpin daerah maupun negara yang kehadirannya ditopang oleh kekuatan digital media tetapi dalam praktiknya seringkali memungungi spirit dari demokrasi itu sendiri. Para pemimpin yang lahir dari rahim populisme tidak jarang menggunakan berbagai cara mendapat apa yang disebut sebagai citra diri. Hal tersebut tidak jarang dibangun dengan membunuh karakter lawan maupun memanipulasi citra. Disinformasi dan malinformasi adalah jalan yang dipilih. Disinformasi adalah informasi palsu

yang disebar dengan niat untuk menipu, menghasut, dan memecah belah. Biasanya dalam bentuk konten buatan, manipulatif, atau dibuat-buat. Sedangkan malinformasi; informasi pribadi yang disebarluarkan ke publik dengan motif menjatuhkan individu atau sekelompok orang (Ireton & Posetti, 2018).

Gambaran di atas menegaskan bahwa demokrasi di era digital juga menghadapi tantangan dan jalan terjal baru. Selain kebisingan di ruang digital, demokrasi yang dibangun melalui cara disinformasi dan malinformasi akan menghasilkan pemimpin yang cenderung manipulatif. Kita bisa membayangkan ketika demokrasi digital menjadi alat aktor politik untuk membangun citranya. Populisme memanfaatkan ruang digital untuk hal tersebut. Hubungan populisme dan demokrasi akan sarat dengan berbagai kepentingan. Dalam ruang digital kepentingan dan wacana yang menguntungkan kelompok tertentu akan disuarakan. Ruang-ruang digital akan berisi racun-racun yang membahayakan demokrasi.

Selain itu, populisme juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memobilisasi masa dan menggalang dukungan. Dari ruang digital polarisasi akan bergerak menjadi kekuatan yang saling bertentangan. Pertentangan tidak lagi terjadi secara vertikal antara elit yang korup yang berkuasa dan rakyat, tetapi secara horizontal sesama masyarakat yang berbeda pada cara pandang atau pilihan politik. Pertentangan tersebut akan menghasilkan masyarakat yang hanya sibuk melegitimasi golongannya sendiri dan cenderung tertutup kepada golongan lain yang berbeda dengan kelompoknya. Kalau sudah demikian, maka demokrasi kita sedang berada dalam kondisi berbahaya dan kita perlu waspada.

Tontonan Kita Menggambarkan Cara Pandang Dominan Terhadap Orang Papua



Kematian George Floyd 2020 lalu oleh polisi di *Minneapolis* mengingatkan saya pada Obby Kogoya, anak Papua yang berkuliah di Jogja. Kalau Floyd diinjak lehernya menggunakan lutut, Kogoya diinjak kepalanya menggunakan sepatu berlogo N.

Apa yang sama dari keduanya bukan sekadar pelaku kekerasannya sama-sama aparat, tapi juga bahwa Floyd dan Kogoya sama-sama berkulit hitam. Insiden keduanya memperlihatkan betapa diskriminasi, rasisme dan tindak kekerasan terhadap orang berkulit hitam masih sering terjadi di dunia.

Tindakan diskriminatif dan rasisme yang kerap kali hadir memunculkan kekhawatiran saya sebagai seorang ayah apabila hal tersebut menurun kepada anak-anak kita. Karena itu, penting kiranya memperhatikan konstruksi imajinasi yang disuguhkan kepada anak-anak kita tentang orang kulit hitam, salah satunya Papua, melalui film dan televisi.

Kolonialisme dan warisan orba

Sikap diskriminasi, rasis, dan intoleran terhadap orang Papua adalah warisan Orde Baru (Orba). Purba (2010) menekankan tentang pembangunan wacana ke-indonesian-an ala Orba yang sangat Jawa-sentris. Wacana kolonial tampaknya tidak bisa dilepaskan dalam proses tersebut. Masyarakat Papua dianggap sebagai makhluk yang belum dewasa dan hendak didewasakan.

Sebuah anggapan yang menempatkan kultur kelompok yang dijajah sebagai “kekanak-kanakan” berarti mengandaikan bahwa logika kedewasaan hanya bisa dicapai oleh si terjajah apabila masuk ke dalam sistem kuasa si penjajah. Kekanak-kanakan yang dimaksud adalah sebuah sikap yang dianggap jauh dari rasional, maju, dan beradab menurut si penjajah. Logika tersebut relevan digunakan untuk melihat relasi Indonesia dengan Papua, di mana ada usaha memaksa Papua untuk menjadi seperti kelompok identitas yang dominan, yakni Jawa.

Implikasi dari sistem pewacanaan seperti itulah yang melegalkan masuknya kultur dominan baik melalui pendidikan, sistem kelola sosial, dan hal lain sejenis. Hal tersebut yang saya sebut sebagai praktik kolonialisme di Papua.

Perangai kolonialis bukan hanya terjadi antar-negara, tetapi sangat mungkin terjadi di dalam satu negara, misalnya antara kelompok mayoritas yang berkuasa dengan kelompok minoritas yang tertindas seperti orang Papua. Robert Blauner dalam Gutiérrez (2004) menyebut praktik tersebut sebagai “kolonialisme internal”. Kolonialisme internal ini menjelma menjadi modus penaklukan atas nama pembangunan: menolak keberadaan minoritas, mengusir atau membunuh sejumlah besar dari mereka, memaksa mereka untuk tunduk pada tanah dan budaya mayoritas. Hal tersebut terjadi di Papua.

Meskipun Orba telah tumbang bukan serta merta warisan tentang cara pandangnya hilang juga. Tontonan populer yang merepresentasikan orang Papua menunjukkan hal itu.

Representasi orang Papua di film dan TV

Pasca Orba, mulai banyak film Indonesia yang mengambil tema Papua. Beberapa di antaranya adalah *Aku Ingin Menciummu Sekali Saja* (2003); *Denias, Senandung di Atas Awan* (2006); *Lost in Papua* (2011); *Di Timur Matahari* (2012); *Cinta dari Wamena* (2013); *Tanah Mama* (2015); dan *Epen Cupen* (2015). Dari beberapa studi

tentang representasi orang Papua di film, tergambar kesimpulan yang masih kurang menggembirakan.

Pertama, dalam penelitiannya tentang film *Denias, Senandung di Atas Awan*, Rato R. (2013) menggambarkan bahwa anak-anak Papua dalam film diposisikan sebagai *other* (liyan). Orang Papua masih dianggap bukan bagian dari manusia. Masih sangat kuat *stereotype* tentang anak Papua yang primitif, bodoh, dan suka berkelahi. Sebuah anggapan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan lama. Sebuah anggapan khas kolonial yang menganggap yang dijajah perlu dijadikan beradab seperti yang menjajah.

Kedua, dalam studi atas *Lost in Papua*, Larasati (2014) menegaskan representasi orang Papua yang cenderung identik dengan tindak kekerasan. Penggambaran kekerasan itu ada dalam dua wujud: kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan fisik yang dilakukan orang Papua direpresentasikan dengan sebuah kebiasaan makhluk hidup memakan sesama manusia (kanibalisme), sedangkan penggambaran kekerasan seksual direpresentasikan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh 16 perempuan Papua terhadap pemeran utama dalam film.

Sementara itu, di televisi dulu pernah ada sitkom di *Trans TV* berjudul "Keluarga Minus". Apa yang digambarkan dalam sitkom tersebut tidak ubahnya sebagai praktik eksploitasi stereotip terhadap orang Papua. Olivia (2013) menegaskan bahwa eksploitasi terhadap orang Papua diciptakan melalui kelucuan-kelucuan dari keluguan para karakter di sitkom.

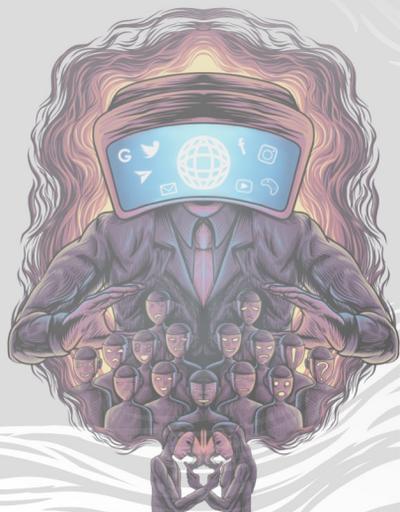
Kelucuan tersebut digambarkan melalui citra sikap primitif dan kepercayaan terhadap animisme oleh para pemainnya. Kedua hal tersebut seolah dijadikan bahan lelucon yang menghibur. Padahal secara tidak sadar kelucuan yang rasis tersebut melanggengkan stigma terhadap orang Papua. Identitas Papua dalam sitkom menjadi semacam olok-olok yang menghibur.

Dalam konteks kolonialisme, hal tersebut tidak ubahnya seperti orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Belanda kerap membuat semacam agenda hiburan dengan mempergunakan orang lokal. Salah satu contohnya adalah acara panjat pinang, di mana menyaksikan tingkah konyol masyarakat jajahan yang berebut hadiah adalah hiburan bagi para bangsawan Belanda.

Gambaran-gambaran di atas menegaskan bahwa representasi orang Papua di film dan TV bukanlah sesuatu yang menyehatkan bagi nalar. Tontonan macam itu akan sangat mungkin melanggengkan cara pandang stigmatis terhadap orang Papua.

Sembari tetap kritis pada kebijakan negara atas Papua, saatnya kita juga perlu mengupayakan tontonan yang humanis dan lebih akurat menggambarkan orang Papua. Ini juga demi masa depan anak-anak Indonesia yang anti-diskriminasi dan anti-rasisme.

Virus 'Lookism' Tidak Kalah Berbahaya dari Rasisme dan Seksisme



Beberapa tahun lalu, media sosial kita dibuat ramai oleh kehadiran Tante Erni, perempuan dengan usia matang yang tampak bugar dan awet muda. Kehadirannya menjadi perbincangan hangat sampai saat ini. Netizen menjulukinya secara berlebihan dengan sebutan “Tante Pemersatu Bangsa”.

Perempuan ideal oleh sebagian masyarakat kita bisa jadi dipersepsikan seperti Tante Erni. Cantik, putih, awet muda, berisi, dan label-label sejenis lainnya. Hal tersebut juga terbukti dari riuhnya pembahasan tentangnya di media sosial, yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki.

Lantas apa hubungannya dengan “lookism”?

Lookism atau tampilanisme dalam Chancer dikutip dalam Saraswati (2019) dalam buku yang berjudul *Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional* dijelaskan sebagai tindak diskriminasi terhadap perempuan yang bersumber dari ekspektasi kecantikan.

Diskriminasi tersebut kerap kali terjadi pada perempuan yang merasa dirinya *insecure* dan *anxious* jika dia tidak bisa tampil cantik layaknya konstruksi dominan. Kemunculan Tante Erni dengan ingar bingar pemberitaannya sangat mungkin menciptakan gambaran ideal bagi masyarakat tentang perempuan masa kini.

Tetap tampil cantik dan energik di usia matang, berkulit putih nan kencang, dan bertubuh langsing. Sebuah kondisi yang sangat mungkin diinginkan

banyak perempuan. Implikasi dari hal tersebut dapat mendiskriminasi perempuan dengan kelas sosial atau usia yang sama dengan Tante Erni untuk berpenampilan seperti halnya.

Kita dapat menjumpai realitas tersebut dari masyarakat urban. Di mana mereka berusaha untuk menjaga kulit dan tubuh mereka agar tetap awet muda. Hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Perempuan harus berjuang menjaga pola makan, olahraga, dan mengonsumsi krim anti-aging (anti penuaan). Sebuah usaha yang diakui ataupun tidak sebagai sesuatu hal yang menyiksa. Usaha-usaha untuk mempertahankan tampilan tersebut kerap kali mendiskriminasi perempuan.

Lantas apa bahayanya *lookism* atau praktik diskriminasi melalui tampilan? Apa benar lebih bahaya dari rasisme dan seksisme?

Menunda penuaan

Proses penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan usia seseorang. Semua manusia pasti mengalami perubahan tersebut. Penuaan yang bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditunda.

Dengan mengonsumsi obat, menggunakan krim anti-aging, dan tindakan-tindakan lain, terbukti bisa menunda penuaan. Hal tersebut menandakan bagaimana ilmu pengetahuan mampu mempengaruhi cara berpikir dan membawa dampak yang signifikan pada kehidupan.

Wolf (2002) dalam bukunya *Mitos Kecantikan* menilai bahwa ada usaha dari industri kecantikan (kosmetik dan *fashion*) untuk mengontrol kebebasan perempuan. Alih-alih menindas mereka secara tidak langsung, industri kecantikan menyerang perempuan dengan mitos kecantikan.

Perempuan sering kali merasa tidak puas dengan kondisinya yang mulai berubah seiring usia. Dari kaca mata

Wolf, usaha keras untuk menjadi tetap awet muda adalah alat penyiksaan.

Gambaran di atas menemukan relevansinya bahwa *lookism* atau tampilanisme mempunyai implikasi yang berbahaya. Hal tersebut menjadi relevan seperti dalam Saraswati mengutip Etcoff (1999) bahwa *lookism* lebih berbahaya dari rasisme dan seksisme.

Rasisme dan seksisme sudah banyak disadari oleh banyak orang, sementara implikasi dari *lookism* banyak membuat orang terlena dan tidak sadar bahwa sedang terjadi diskriminasi berlandaskan tampang.

Orang akan terobsesi dengan tampilan yang menawan yang dikonstruksi media. Alhasil, usaha-usaha yang terkadang menyiksa harus ditempuh. Tidak jarang kita temui kegagalan yang berujung pada rusaknya wajah atau bagian tubuh lain, dan hal tersebut bisa menjadi penyesalan seumur hidup.

Lantas apa yang membuat orang tidak sadar atas praktik diskriminasi melalui tampang?

Menjadi tua bagi sebagian kita memang ancaman, sehingga sebagian kita harus berusaha mati-matian untuk tetap dalam kondisi muda. Ada yang terbukti berhasil, ada yang gagal. Hal tersebut cukup berisiko, apalagi bagi orang dengan ekonomi *pas-pasan*.

Secara sederhana saya membagi dua motif berdasarkan kelas, apa yang mendorong orang begitu terobsesi awet muda dan tetap tampak cantik.

Bagi kelas sosial menengah-atas, hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendapat pengakuan kelompok sosialnya. Selera selalu merupakan representasi khas dari suatu kelompok kelas.

Representasi dari hasrat membedakan diri dengan kelompok sosial yang lain, terutama yang lebih bawah. Pengelompokan tersebut tergambar dari kebiasaan mereka dalam mempertahankan diri bersama kelompok

sosialnya. Seperti kebiasaannya ke klinik kecantikan atau institusi medis lainnya.

Terus bagaimana orang dengan ekonomi *pas-pasan*?

Gaya hidup cenderung mengeksklusi orang dengan kelas sosial tertentu. Gaya hidup modern cenderung menciptakan pengucilan atau peminggiran bagi mereka yang tidak mempunyai modal finansial yang cukup.

Banyak orang dengan ekonomi *pas-pasan* dipaksa untuk mengikuti gaya hidup dan perilaku kelas tertentu. Mereka secara tidak sadar terkondisikan mengikuti gaya hidup yang mereka susah untuk menjangkaunya.

Jadi, *lookism* bisa menjadi sebuah virus berbahaya bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran kritis dalam praktik konsumsi. Implikasi dari itu semua akan mendiskriminasi secara tidak sadar. Hal tersebut yang saya maksud bahwa *lookism* tidak kalah berbahaya dari rasisme dan seksisme.

Apakah hal tersebut juga bisa terjadi pada laki-laki?

Sangat bisa. Citra ideal aktor yang muncul di media bisa membuat laki-laki terdiskriminasi melalui tampang. Jadi apa pun gendernya, virus *lookism* ini bisa menyerang siapa saja. Waspadalah!

Teaterikal Politik di Era Sosial Media



Peristiwa politik dan tema teaterikal adalah dua hal yang berkaitan dan mempunyai praktik kerja yang sama. Keduanya memerlukan aktor, setting, sutradara, dan menyimpan pesan yang ingin disampaikan. Hal tersebut terbukti dengan munculnya frase “aktor politik, siapa dalangnya dan sutradara di balik kejadian” yang sudah lama bertebaran dalam wacana politik Indonesia. Malah kerap kali dikatakan bahwa banyak peristiwa politik yang didesain layaknya sandiwara yang naskahnya tidak tertulis.

Erving Goffman (1959) secara menarik membaca realitas keseharian dalam politik dengan menggunakan kacamata pagelaran. Dalam konteks politik apa yang diperankan atau ditampilkan di atas panggung oleh seorang aktor selalu syarat motif tertentu. Hal tersebut terkait erat dengan perilaku simbolik yang perwujudannya bisa berupa ekspresi diri (marah, menangis, simpati, kelucuan dan lain-lain), orasi politik atau perilaku lainnya. Tentunya kesemuanya diarahkan pada keinginan untuk meyakinkan khalayak.

Apa yang ditunjukkan presiden Jokowi dalam banyak video, salah satunya pada (28/6/2020) menarik untuk diletakkan sebagai sebuah teatrikal politik. Masyarakat disuguhkan sebuah video presiden yang menegur para menterinya dalam rapat kabinet. Selain menegaskan akan melakukan *reshuffle* dan membubarkan beberapa lembaga negara, Jokowi juga meminta para menterinya untuk melakukan kerja yang ekstra dalam menangani pandemi covid-19.

Dalam konteks tersebut, apa maksud istana menyebarkan video tersebut dan pesan apa yang ingin disampaikan ke publik?

Teater sebagai Metafor

Dalam konteks politik jelas tidak ada sesuatu hal yang dilakukan tanpa tujuan. Aktor politik dan sutradara jelas sedang berusaha untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah telah bekerja keras. Ekspresi kemarahan di depan publik tentunya bukan sesuatu yang ditunjukkan tanpa maksud.

Secara metafor pemerintah ingin menunjukkan bahwa ekspresi marah itu digunakan untuk menegur sesuatu hal yang tidak tepat. Jokowi ingin menunjukkan ke publik bahwa beberapa hal yang mengecewakan publik itu bukan semata-mata karena salahnya. Selain itu juga, Jokowi ingin menunjukkan bahwa selama ini dirinya benar-benar serius dan akan membuat langkah-langkah baru terkait penanganan dampak covid-19.

Dalam konteks Indonesia, teater politik kerap kali digunakan penguasa untuk memperoleh simpati publik. Pertunjukan dramatis seringkali ditunjukkan untuk memperoleh simpati. Hal tersebut terjadi di berbagai rezim kekuasaan. Tentunya semua mempunyai ciri khas masing-masing.

Diakui ataupun tidak, Jokowi adalah salah satu presiden yang cukup sukses memainkan peran dalam pegelaran politik Indonesia. Blusukan adalah satu hal yang sempat menarik perhatian publik dan hal tersebut terbukti menjadi salah satu instrumen yang mampu menjadikannya presiden.

Tetapi persoalannya, apakah lalu aktor politik selalu direspon positif oleh penontonya? Lantas, bagaimana khalayak menerima pesan kemarahan Jokowi beberapa hari lalu ?

Respon di Sosial Media

Membaca peristiwa politik dengan kaca mata pagelaran atau teater tentunya bukan hal baru di Indonesia. Perilaku ekspresif dengan perangkat kamera yang menanti dan siaga dimaksudkan untuk dilihat publik dengan tujuan tertentu kerap kali dilakukan oleh para aktor politik.

Beberapa hal yang kerap kali tidak mampu diprediksi oleh aktor politik atau sang sutradara adalah kehadiran sosial media dalam wacana politik Indonesia. Aktor politik tentunya harus mampu mengukur sejauh apa tindakan yang dilakukan agar mampu mempengaruhi penonton atau khalayak masyarakat.

Aktor politik harus menyadari bahwa sebuah peristiwa yang disuguhkan ke publik meski bertujuan baik belum tentu juga mendapatkan respon yang baik. Kehadiran sosial media sangat mungkin merubah dan bahkan membalik pesan dari penguasa sehingga berlawanan dengan pesan yang direncanakan. Ibarat dalam sebuah pagelaran, bukan tepuk tangan yang didapat tetapi makian dan cemoohan.

Respon melalui sosial media bisa jadi memunculkan energi politik di luar prediksi yang mengemuka dalam wacana publik. Sosial media cukup "*powerful*" untuk dimanfaatkan dalam proses pembentukan maupun *counter* opini di tengah kelompok-kelompok masyarakat. Tidak sedikit orang yang merespon secara negatif pidato presiden. Mereka secara spontan merespon dengan argumen-argumen kritis dan terkadang satire. Dengan kemarahannya, Jokowi dianggap sedang memamerkan kelemahan kabinet yang dipimpinya. Telah lama berhadapan dengan covid-19 dan baru sekarang menegur para menteri-menterinya yang dianggap tidak serius.

Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa apa yang dilakukan tidak ubahnya seperti drama. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan ideal yang diyakini dan pengalaman yang dialami atas penanganan covid selama ini. Hal tersebut tentunya cukup berdasar.

Penanganan covid-19 di Indonesia yang kerap kali dikritik banyak pengamat karena dianggap *anti-science* dan minim koordinasi antar lembaga ditambah perilaku pejabat yang sering kali melakukan blunder adalah alasan rasional atas respon negatif terhadap pidato tersebut.

Dalam kondisi Indonesia yang masih darurat covid-19 seharusnya tidak tepat merilis video kemarahan presiden ke publik. Karena dalam konteks kepemimpinan, atasan memarahi bawahan adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu diumbar ke publik. Harusnya cara memperoleh simpati masyarakat tidak dengan cara-cara simbolik tersebut. Masyarakat butuh tindakan radikal di tengah meroketnya jumlah orang yang terpapar covid-19. Bukan ungkapan marah-marah yang malah membuat kita tersadar bahwa selama ini pemerintah memang tidak serius membendung laju virus. Semoga pasca kemarahan tersebut memang benar-benar membawa dampak yang signifikan dan tidak ada lagi episode baru yang serupa.

Fetism, Aktivitas Virtual dan Ancaman Pelecehan Sexual



Beberapa tahun lalu sosial media dikejutkan dengan dua kejadian yang cukup membuat dahi berkerut. Kejadian pertama adalah sebuah praktik tidak wajar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Gilang bungkus netizen menyebutnya. Mahasiswa yang telah melakukan pelecehan seksual berkedok riset. Gilang yang meminta korbannya untuk mengirim foto dan video diri sedang dibungkus kain jarik. Warganet menyimpulkan, Gilang memiliki fetish terhadap kain jarik, orang yang dibungkus dan bagian tubuh orang seperti jempol kaki.

Sementara kejadian yang kedua dilakukan oleh seorang dosen di Yogyakarta. Kasus Bambang Ariyanto yang mempunyai fetish dan fantasi swinger (bertukar pasangan) dengan modus yang sama, yakni penelitian. Berdasarkan pengakuannya, penyimpangan seksual tersebut akibat dari kecanduan menonton tontonan porno di Youtube. Aktivitas tersebut dilakukannya sejak tahun 2014 lalu. Menurutnya, ia terobsesi dengan perempuan berjilbab. Modus yang digunakan untuk menjerat korban antara lain dengan alasan mau curhat tentang istrinya yang suka menyiksa, cerita krisis orang tuanya, pernikahannya tak punya anak dan dalih-dalih lain yang dilakukan via *chatting*.

Kesamaan dari kejadian di atas adalah sama-sama tindakan pelecehan sexual dan memanfaatkan teknologi online atau virtual untuk menjalankan aksinya. Keduanya bisa dikatakan kecanduan *sex* virtual untuk membangun fantasi seksual

Sex dan Teknologi

Dua kejadian di atas juga menegaskan bahwa praktik pemuasan hasrat *sexual* dan teknologi media menjadi sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Pemuasan hasrat *sex* hari ini bukan lagi bertemunya tubuh dengan tubuh secara langsung. Tetapi kejadian di atas menegaskan bahwa *sex* bergerak dengan aneka fantasi yang beragam dan terkadang berada di luar batas logika pada umumnya. Fantasi *sexual* lebih sensual dibanding *sex* itu sendiri.

Frase di atas mengingatkan saya pada nukilan Jean Baudrillard, seorang pemikir post-modern Prancis. "Pornografi lebih sensual ketimbang seks itu sendiri". Meskipun secara sekilas apa yang dilakukan Gilang dan Bambang bukan pornografi tetapi kesamaannya terletak pada fantasinya. Baik pornografi maupun praktik fetish sama-sama meletakkan fantasi *sex* sebagai pendorong untuk memuaskan hasrat *sexual*. Hal tersebut bisa begitu menjadi candu, dan bagi pecandunya akan sangat mengasyikkan ketimbang aktivitas seks itu sendiri.

Tentunya hal tersebut terjadi dalam situasi di mana batas antara realitas dan bukan-realitas sudah benar-benar kabur. Yang nyata adalah fantasi itu sendiri. Kalau sudah begitu maka pemuasan *sex* telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dimana representasi atas suatu obyek justru menggantikan kedudukan obyeknya itu sendiri. *Sex* bertransformasi menjadi simulasi-simulasi yang beragam dan menemukan para pecandu-pecandunya.

Fantasi dalam *Cyber Sex*

Ruang *cyber* (*cyber-space*) menyediakan berbagai layanan *sexual* yang beragam. Piliang (2007) mengulas aktivitas *sexual* yang kerap dilakukan di ruang *cyber*. Dalam *cyber-sex* terdapat berbagai pintu masuk ke dalam berbagai bentuk *simulacrum* seks dan seksualitas, berbagai tindak dan adegan seksual (berupa foto, video, dan filem), yang 'menawarkan' berbagai aktivitas seksual: 'melihat' (*voyeurism*); 'role playing' atau memainkan peran seksual tertentu; 'permainan seksual' (*adult sexual gaming*); kegiatan

seksual 'terhadap' internet (*cyber-fetishism*), dan; kegiatan seksual jarak jauh melalui internet (*teledildonic*).

Apa yang dilakukan oleh kedua pelaku di atas bisa jadi bagian dari *cyber-sex*. Demi membangun fantasi *sexual* aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan. Keduanya tidak peduli bahwa yang dilakukan adalah tindakan pelecehan yang merugikan orang lain. Fantasi adalah dunia baru para pecandu dalam ruang *cyber*. Sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa salah satu anasir dari cybersex adalah fantasi seks yang dilakukan oleh partisipan dengan melukiskan tindakannya dan menanggapi lawan berbincang yang kebanyakan dalam bentuk tertulis dan dirancang untuk stimulasi seks maupun fantasi (Harley, 1996).

Fantasi adalah sebuah ruang privat dalam diri dan itu merupakan tempat yang paling jujur. Dalam ruang fantasi tersebut, kita bisa membayangkan apa saja yang kita sukai dan nikmati, Namanya saja fantasi. Representasi seksual dalam *cyber-sex* justru telah melampaui seks itu sendiri. Inilah situasi ketika adegan dalam *cyber-sex* lebih sensual ketimbang seks. *Cyber sex* bisa jadi menyediakan ruang untuk mengaktualisasikan fantasi. Berbagai aktivitas *sexual* bisa dilakukan.

Kondisi di atas tentunya menjadi tantangan baru bagi kehidupan. Sebuah kondisi yang barangkali merubah banyak hal terkait apa itu *sex* dan *sexualitas*. Kondisi tersebut akan menjadi ancaman serius ketika *cyber-sex* memakan korban. Ketika ruang *cyber* tersebut mendorong terciptanya predator-predator *sex* baru dengan kebiasaan baru di luar batas kewajaran. Ruang *cyber* akan memakan banyak korban atas ulah para predator *sex*. Hal tersebut diperparah apabila tatanan hukum, agama dan sosial tidak siap mengantisipasi hal tersebut.

Dalih tidak cukup bukti dan tidak ada saksi akan menjadi frase yang menjengkelkan ketika pelaku pelecehan seksual di ruang *cyber* bisa bebas tanpa hukuman. Semoga saja institusi hukum, agama dan budaya siap atas kondisi tersebut. Semoga saja !



DAFTAR PUSTAKA

Larasati, Cindy Erika. (2014). "Representasi Identitas Etnis Papua Dalam Film *Lost in Papua*", *Jurnal Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3/ No. 3.

Rato R., Daeng Lanta Mutiara. (2013). "Representasi Sosok Anak-Anak Pedalaman Papua dalam Film *Denias, Senandung di Atas Awan*", skripsi Tesis Universitas Diponegoro.

Olivia, Firda (2013). "Representasi Etnis Papua Dalam Sitkom *Keluarga Minus Trans TV*", skripsi Tesis Universitas Airlangga.

Gutiérrez, Ramón A. (2004). "Internal Colonialism: An American Theory of Race", *Du Bois Review*, 1.2, 281-295.

Purba, Y. Sahana. (2010). "Melawan Sekaligus Meniru: Siswa Papua Di SMP Kanisius Kalasan, Yogyakarta, Dalam Wacana (Post) Kolonial" dalam *Budiawan (Ed) : Ambivalensi Post-Kolonialisme: Membedah Musik Sampai Agama Di Indonesia*.

Virilio, P. (1986) *Speed and Politics*, trans. M. Polizzotti, New York: Semiotext(e).

A.A Wattimena, Reza, 2013, Dunia Dalam Gelembung , PT Evolitera Jakarta

Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu

- Bourdieu, Pierre. 2006. *Distinction*. New York: Routledge.
- Casanova, Pablo Gonzalez. 1965. "Internal Colonialism and National Development." *Studies in Comparative International Development* 1(4).
- Julie A. Woodzicka, Thomas E. Ford A, 2010. Framework for Thinking about the (not-so-funny) Effects of Sexist Humor. *Europe's Journal of Psychology*, 6(3), pp. 174-195
- Udasmoro, Wening, *Sastra Anak Dan Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Prodi sastra Perancis FIB UGM, 2012)
- Danandjaja, James. 1997. *Folklore Indonesia* Jakarta. PT Pustaka Utama Grafiti.
- Setiyawan, R., & Lestari, S. (2020). Patriarchal Discourse in Nusantara Classic Children Literature. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2716-2725.
- Citraningtyas, C.E. "Sastra Anak: Edutainment dengan Catatan". Makalah Seminar Sastra Anak. [online] tersedia: <http://www.academia.edu/816363/Sastra-Anak-Edutainment-dengan-Catatan>
- Bourdieu, Pierre, 1991, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Polity.
- Citraningtyas, C. E. 2004 *Breaking a Curse Silence: Malin Kundang and Transactional Approaches to Reading in Indonesian Classrooms - an Empirical Study*. Unpublished thesis. Sydney: Macquarie University
- Heryanto, A. (2012). *Budaya Populer di Indonesia; Identitas Mencair di Masa Pasca-Orde Baru*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Brenner, Suz Anne. 1999. On the public intimacy of the new order: images of women in the popular Indonesian print media, *Indonesia*, no.67, Diakses 09 Agustus 2013 dari <http://www>.

[jstor.org/stable/3351375?origin=JSTOR-pdf](https://www.jstor.org/stable/3351375?origin=JSTOR-pdf)

Giddens, Anthony. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Cambridge, UK: Polity

Althusser, Louis, *"Ideology and Ideology State Apparatuses"* Dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays*. (New York: Monthly Review Press, 1971)

Irawan, Benni, 'Menjadikan Indonesia: Politik Identitas Nasional Dalam Buku Teks Sekolah Dasar' (Universitas Gadjah Mada, 2014)

Friedman, T. L. (2005). *Its a Flat World, After All*. New York Times, 1-10.

<https://econanthro.wordpress.com/2017/10/20/mengapa-hantu-indonesia-selalu-perempuan-jawaban-antropologis/>

Bell, David. 2000. Introduction. Dalam *The Cybercultures: Reader*. Editor D. Bell dan B. Kennedy, London & New York: Routledge.

Yasraf Amir Piliang, Tele-seksualitas dan 'Cyberculture': 'Cyberporn' dalam Perspektif Budaya dan Agama, Makalah dalam acara Seminar "Cyber Crime dan Cyber Porn dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana", diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM RI, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah, Semarang, 6-7 Juni 2007

Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Jakarta: Erlangga.

Urbinati, N. (2019). Political Theory of Populism. *Annual Review of Political Science*, 1-26.

Saraswati, L. Ayu. 2017. Putih: Warna Kulit, Ras, dan

Kecantikan di Indonesia Transnasional. Serpong:
Marjin Kiri

Wolf, Naomi. (2002). *The Beauty Myth; How Images of
Beauty Are Used Against Women*. New York: Harper
Collins

Manne, Kate (2017) *Down Girl: The Logic of Misogyny*,
Oxford University Press

Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in
Everyday Life*. Jakarta: Erlangga.

Adorno, T.W. & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of
Enlightenment*. California: Stanford University Press.

Danesi, Marcel. 2007. *The Quest for Meaning: A Guide to
Semiotic Theory and Practice*. Toronto: University of
Toronto Press.

Ariel Heryanto (Ed.), *Budaya Populer di Indonesia;
Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*. Translated By
Eka S. Saputra. YOGYAKARTA: Jalasutra, 2012

Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis
Sekolah Frankfurt: Max Horkheimer dan Theodor W.
Adorno*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2019

Saiful Mujani, Nicholas Kuipers. Who Believed
Misinformation during the 2019 Indonesian Election?
Asian Survey (2020) 60 (6): 1029–1043.

[www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/152954065/
bts-pop-culture-hiburan-politik-dan-situs-
pertarungan-dominasi?page=all](http://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/152954065/bts-pop-culture-hiburan-politik-dan-situs-pertarungan-dominasi?page=all)

dorno, T.W. & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of
Enlightenment*. California: Stanford University Press.

Danesi, Marcel. 2007. *The Quest for Meaning: A Guide to
Semiotic Theory and Practice*. Toronto: University of
Toronto Press.

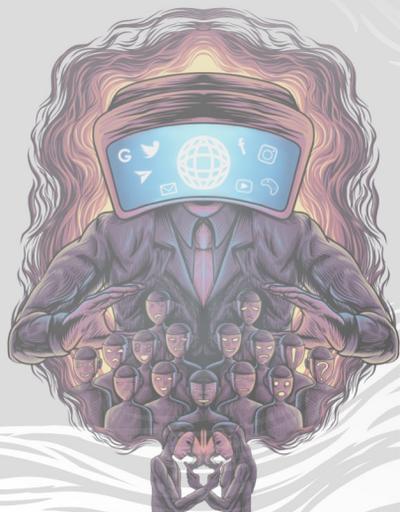
[www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/152954065/
bts-pop-culture-hiburan-politik-dan-situs-
pertarungan-dominasi?page=all](http://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/152954065/bts-pop-culture-hiburan-politik-dan-situs-pertarungan-dominasi?page=all)

Ariel Heryanto (Ed.), *Budaya Populer di Indonesia; Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*. Translated By Eka S. Saputra. YOGYAKARTA: Jalasutra, 2012

Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt: Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2019

Saiful Mujani, Nicholas Kuipers. Who Believed Misinformation during the 2019 Indonesian Election? *Asian Survey* (2020) 60 (6): 1029–1043.

Tentang Penulis



Radius Setiyawan lahir di Surabaya, 9 November 1986. Setelah menamatkan pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Surabaya (2009) ia melanjutkan studi S2 Kajian Budaya dan Media di Universitas Gadjah Mada (2015), setelah lulus ia kembali ke kampus masa S1 nya untuk mengabdikan menjadi dosen dan peneliti. Di tengah aktivitasnya sebagai dosen dan peneliti, kini ia kembali melanjutkan studi S3 Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga.

Banyak karya publikasi dan buku yang telah dihasilkan. Dari tema terkait gender, sastra hingga politik-kebudayaan. Hal tersebut bisa diakses dalam google scholar atas nama Radius Setiyawan.

Banyak karya ilmiah yang pernah diterbitkan diantaranya: Muhammadiyah dan Peristiwa 1965 (2015), *Cyberporn: Sebuah Ruang Resistensi dan Negoisasi* (2015), *Sastra Anak Nir-Kekerasan* (2016), *Usaha Meubel Jedong Sekarputih Balongpanggung Gresik* (2016), *Symbolic Power of Patriarchal Discourse in Children Literature: Critical Discourse Analysis of Folklore, Fairytale, Islam Story and Fable* (2016), *Multikulturalisme dalam Sastra Urban (Bergerak dari Otoritas)*(2016), *Pemberdayaan Usaha Binatu Lokasi Terdampak Eks-Lokalisasi Daerah Morokrembangan Surabaya* (2017), *Engaging Students Attention By Using Discourse Makers: Study Of Lecturer-Students Interaction In*

English Class Discussion (2017), *Bergerak dari Otoritarisme Orde Baru ke Reformasi: Kuasa Negara atas Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Ideological State Apparatus* (Isa) Lous Althusser (2019), *Symbolic Efforts for Maintaining Anti Communist Discourse on Matan Magazine* (2019), *Pemberdayaan Ekonomi UKM dengan ECO-Produk Handicraft di Jedong Sekarputih Balongpanggung Gresik* (2020), *Alam Pikir Era Pandemi: Kajian Lintas Ilmu Lelucon yang tak Lucu saat Pandemi* (2020), *Technology Era, Global English CLIL: Influence and its Impact on English Teaching for Young Learners in Indonesia* (2020), *Patriarchal Discourse in Nusantara Classic Children Literature* (2020), *Gender Bias in Islamic Children's Literature Case Study In Indonesia* (2021), *Cybersex and Religion Intimacy, Resistance and Negoitation of Islamic Students In Indonesia* (2022).

Selain menjadi seorang dosen. Ia juga dipercaya menjadi Kepala Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB) di UM Surabaya. Sebuah lembaga yang berfokus pada kehumasan, branding dan rekrutmen mahasiswa baru.

Selain itu juga, penulis yang pernah meraih penghargaan sebagai peneliti pengabdian paling produktif tahun 2018 di kampusnya, dan dalam konteks nasional, ia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Top 10 Finalis Makerfest 2018 yang diselenggarakan oleh Tokopedia. Sebuah ajang kompetisi bagi maker lokal atas produk kreatif yang dihasilkan.

Berbagai pelatihan bergengsi di tingkat nasional maupun internasional telah diikuti. Salah satunya mewakili kampusnya dalam pelatihan profesional *Leading and Managing Internationalisation in Higher Education* (LMIHE) di Monash University, Australia.

Jika ingin menyapanya bisa melalui akun media sosial Instagram @radiussetiyawan atau menyapa lewat email radius@ums-surabaya.ac.id.

Buku yang ditulis oleh kawan saya, Radius Setiyawan, ini sangat menarik dan kontekstual. Setidaknya karena dua hal. Pertama, berbicara tentang sebuah topik yang cenderung dihindari oleh banyak orang. Perbincangan tentang dampak revolusi teknologi informasi pada literasi masyarakat memang sudah sering dibicarakan. Tetapi, bagaimana bersikap kritis terhadapnya, sangat jarang ditemukan. Karena nyatanya, hampir semua kalangan, tak terkecuali kalangan akademik, juga seringkali jatuh dalam kubangan literasi instan yang ditawarkan oleh media-media baru. Kedua, menarik hubungan antara populisme literasi pada hampir semua bidang kehidupan, dengan perubahan orientasi politik negara adalah juga hal yang sangat menarik. Membaca analisis-analisis dalam buku ini, kita jadi tersadar bahwa meskipun negara berusaha hadir untuk mengatasi dampak negatif populisme literasi, dalam banyak hal ternyata, tanpa sadar, negara juga mengalami dampak populisme itu.

Pradana Boy ZTF, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang.

Transformasi sosial terhubung erat dengan budaya populer. Elemen budaya populer mempengaruhi cara pandang yang tadinya, tak biasa, tak dianggap, tak menarik, dan bahkan absen dalam diskursus publik menjadi antitesanya. Ia bisa menjadi kekuatan politik, baik dari mesin kendali otoritatif dominan hingga artikulasi perlawanan publik yang anti mainstream. Tantangannya tentu menjadi kian tak mudah, terlebih berkaitan dengan reduksi bahkan degradasi sains, kuasa asimetris, dan menguatnya kehidupan yang kian manipulatif, menjadi produksi pembohongan yang tentu memanfaatkan simbolisme populer itu sendiri. Buku ini sungguh istimewa untuk menggugah pembacanya menyimak sekaligus menguji budaya populer dengan relasi kuasanya yang dilihat dari sisi tak biasanya (*the otherness*)

Dr. Herlambang P. Wiratraman, Dosen Universitas Gadjah Mada,
dan Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES

Prolifik! Buku ini menjadi penanda bahwa penulisnya memang produktif. Dari isu-isu yang dibahas, meski tanpa dibubuhi masa penulisan, tampak jeda waktu antara satu dan lain esai tak berjauhan. Pilihan topik diskusi pun sangat lekat dengan isu kekinian seperti kasus pinjaman online, Crazy Rich, Cybersex dan lainnya. Penulis tampak berani dan mampu memosisikan sikap kritis terhadap isu-isu aktual di sekitarnya. Argumentasi dalam bersikap tampak kuat karena disertai contoh nyata melalui bahasa yang tidak hanya bernas, tapi juga sangkil dan mangkus. Buku antologi esai budaya populer ini sangat inspiratif untuk mengasah kepekaan kita dalam memandang isu kekinian. Pun, semangat nilai dalam buku ini terasa menempatkan perempuan dan anak pada posisi mulia.

M.Rokib (Dosen Universitas Negeri Surabaya/Mahasiswa S3 Frangfurt University)



surabaya

Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 87701798766)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id
www.p3i.um-surabaya.ac.id

ISBN 978-623-99088-4-3

